

LKjIP 2020



LAPORAN KINERJA

*PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2020*



*Palembang Emas
Darussalam
2018-2023*

BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA PALEMBANG

**"KEBANGGAAN BAGI KITA SEMUA
KETIKA KOTA INI DAPAT MENCIPTAKAN
RUANG RUANG KEBAHAGIAAN
BAGI WARGANYA"**



H.HARNOJOYO
WALIKOTA PALEMBANG

FITRIANTI AGUSTINDA
WAKIL WALIKOTA PALEMBANG



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG INSPEKTORAT DAERAH KOTA

Jl. Kapuran No. 3 Kelurahan 22 Ilir Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352235 Fax (0711) 352235 Kode Pos 30131
E-mail: itkoplg@gmail.com Website : www.inspektorat.palembang.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang untuk tahun anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Palembang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Palembang, 19 Maret 2021



GUSMAH YUZAR, SE, M.Ak, CGCAE
Pembina Tingkat I
NIP. 19610825 198302 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala Puji dan Syukur kita sanjungkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tak terhingga bagi bangsa dan negara yang tercinta khususnya Kota Palembang, ikhtiar kita untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat melalui kegiatan pembangunan dapat diwujudkan secara bertahap.

Upaya untuk mewujudkan visi ***Palembang EMAS DARUSSALAM 2020*** telah dilakukan dengan semangat dan kerja keras melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi, guna mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Palembang khususnya kualitas pelayanan kepada masyarakat yang bersih, melayani, dan bebas dari praktek-praktek KKN sebagaimana harapan masyarakat. Tentunya ini semua adalah pekerjaan besar segenap aparatur Pemerintah Kota Palembang dalam mewujudkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dalam mewujudkannya Pemerintah Kota Palembang telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2018-2023 yang pelaksanaannya dijabarkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya sebagai tolak ukur Pelaporan Kinerja Pemerintah Kota Palembang.

Laporan Kinerja merupakan media pelaporan capaian atas Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palembang tahun 2020 ini adalah Laporan capaian kinerja selama tahun 2020 dan juga merupakan tahun akhir dari RPJMD 2018-2023, sehingga menempatkan Laporan Kinerja ini sebagai capaian akhir dari Visi Kota Palembang 2018-2023. Laporan ini telah disusun sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan perjanjian kinerja yang berorientasi pada hasil, yang memberikan informasi tentang pertanggungjawaban janji kinerja dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, pencapaian sasaran dalam mewujudkan ***Palembang EMAS DARUSSALAM 2023***.

Harapan kami Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palembang Tahun 2020 ini dapat menjadi media untuk membangun kebersamaan, bersinergi, dan komitmen bersama guna peningkatan kinerja kedepan secara produktif, efektif, dan efisien, baik dari aspek perencanaan pengorganisasian, serta manajemen keuangan guna mewujudkan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah serta perlindungan-Nya bagi kita, Aamiin Ya Robbal'alamiin.

Palembang, Maret 2021

WALIKOTA PALEMBANG,



H. HARNOJOYO

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kota Palembang telah berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKJiP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap OPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2020 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palembang Tahun 2018-2023, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, dan Peraturan Walikota Palembang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Tahun 2018-2023.

Hasil pengukuran pada 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama Kota Palembang yang telah ditetapkan pada tahun 2020, sebagai berikut :

- 7 indikator kinerja bermakna Baik Sekali;
- 5 Indikator kinerja bermakna Baik;
- 2 Indikator kinerja bermakna Cukup;
- 1 Indikator kinerja berkategori Kurang;
- 1 Indikator kinerja belum keluar hasil penilaian (Nilai SAKIP Kota Palembang).

Dalam Tahun Anggaran 2020, untuk pencapaian kinerja 10 (sepuluh) sasaran strategis dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Palembang yang dilaksanakan pada Badan, Dinas dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 4.180.568.812.333,76 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.534.430.114.826,75,- atau 84,54%.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vii
Daftar Bagan	viii
Daftar Gambar	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
1.3 GAMBARAN UMUM KOTA PALEMBANG	3
1.3.1 Kondisi Geografis	3
1.3.2 Kondisi Demografis	5
1.4 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	6
1.5 KONDISI PEMERINTAHAN	9
1.6 JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA.....	14
Bagan Struktural Organisasi Kota Palembang	16
1.7 INOVASI DALAM SISTEM AKIP DAN PENGELOLAAN KINERJA.....	17
1.8 CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI KOTA PALEMBANG	18
BAB II RENCANA STRATEGIS	19
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023.....	19
2.1.1 Visi	20

2.1.2 Misi.....	21
2.2 TUJUAN DAN SASARAN	21
2.3 STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	23
2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	34
2.5 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	35
2.6 PERJANJIAN KINERJA.....	36
2.7 PERJANJIAN KINERJA.....	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	41
3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	43
3.2 PENGUKURAN DAN EVALUASI DAN KINERJA SASARAN STRATEGIS....	47
3.3 ANALISA CAPAIAN KINERJA.....	53
Sasaran Strategis 1	53
Sasaran Strategis 2.....	58
Sasaran Strategis 4	72
Sasaran Strategis 5.....	97
Sasaran Strategis 6.....	113
Sasaran Strategis 7	115
Sasaran Strategis 8.....	120
Sasaran Strategis 9.....	122
Sasaran Strategis 10.....	129
Sasaran Strategis 11.....	159
3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN	172
BAB IV PENUTUP	183

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Palembang, 2015-2019	1
	5
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Menurut Kevcamatan di Kota Palembang	6
Tabel 1.3	Urusan Pemerintah Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014	14
Tabel 1.4	Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2020	
	Pemerintah Kota Palembang.....	16
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2020	
	Pemerintah Kota Palembang.....	16
Tabel 1.6	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2020	
	Pemerintah Kota Palembang.....	16
Tabel 1.7	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2020	
	Pemerintah Kota Palembang.....	17
Tabel 2.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, strategis dan Arah Kebijakan	
	Kota Palembang Tahun 2018-2023.....	28
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palembang	35
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	39
Tabel 2.4	Rencana Belanja Pemerintah Kota Palembang Tahun 2020	41
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palembang Tahun	
	2020	45
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2020	50
Tabel 3.3	Indikator Sasaran	52
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Palembang Tahun	
	2020	52

Tabel 3.5	Capaian Kinerja Sasaran Meratanya Kebutuhan Infrastruktur sebagai Penopang Daerah Tahun 2020	55
Tabel 3.6	Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintah di Kota Palembang (Km), 2019-2020	56
Tabel 3.7	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan Pemerintah di Kota Palembang (Km), 2019-2020	56
Tabel 3.8	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Palembang (Km), 2019-2020	58
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Sasaran Terlaksananya Tata Kelola Lingkungan Perkotaan Secara Lestari dan Berkelanjutan Tahun 2020	59
Tabel 3.10	Kolam Retensi Per Kecamatan di Kota Palembang	60
Tabel 3.11	Daftar Jenis dan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Palembang	62
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya kualitas SDM Tahun 2020	69
Tabel 3.13	Indeks Pembangunan Manusia 2019-2020	69
Tabel 3.14	Indeks Pembangunan Manusia di Kota Palembang 2011-2020	70
Tabel 3.15	Umur Harapan Hidup Sehat saat Lahir (UHH) Tahun 2019-2020	71
Tabel 3.16	Cakupan Indikator SPM Dinas Kesehatan Kota Palembang 2020	71
Tabel 3.17	Harapan Lama Sekolah Tahun 2019-2020	83
Tabel 3.18	Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2019-2020	84
Tabel 3.19	Pengeluaran perkapita disesuaikan (Ribuan Rupiah/Orang Tahun 2019-2020	91
Tabel 3.20	Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya daya saing angkatan kerja dan masyarakat Tahun 2020	92

Tabel 3.21	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Agustus 2019-2020.....	93
Tabel 3.22	Capaian Indikator Kinerja Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020	94
Tabel 3.23	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka.....	95
Tabel 3.24	Jumlah Penduduk berumur 15 Tahun keatas menurut jenis kegiatan dan Jenis Kelamin di Kota Palembang 2020	96
Tabel 3.25	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Agustus 2019-2020.....	96
Tabel 3.26	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan Jenis Kegiatan di Kota Palembang 2020.....	97
Tabel 3.27	Capaian Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Pendduduk Kota Palembang Tahun 2020	100
Tabel 3.28	Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Palembang Tahun 2020.....	101
Tabel 3.29	Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2020	102
Tabel 3.30	Data PUSH, Peserta KB Aktif, CPR, Unmet Need di Kota Palembang	104
Tabel 3.31	Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif menurut Kecamatan di Kota Palembang 2020	104
Tabel 3.32	Daftar Lokasi dan Nama Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Palembang Tahun 2020	105

Tabel 3.33	Capaian Kinerja Sasaran Berkembangnya Nilai-nilai Prikehidupan Umat Beragama dan Budaya yang Mengayomi semua Elemen Masyarakat Tahun 2020	107
Tabel 3.34	Tabel Pengguna Aplikasi Si Abuh	108
Tabel 3.35	Capaian Kinerja terlaksananya Good Governance Pratices dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020	110
Tabel 3.36	Capaian Indikator Kinerja Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2020.....	110
Tabel 3.37	Capaian Indikator Kinerja Hasil Evaluasi AKIP Kota Palembang Tahun 2020	113
Tabel 3.38	Capaian Kinerja Sasaran Merata Sebaran Hasil Pembangunan Tahun 2020	114
Tabel 3.39	Gini Ratio Menurut Provinsi Maret 2019, September 2019 dan Maret 2020	115
Tabel 3.40	Capain Kinerja Sasaran Meningkatnya Investasi Daerah Tahun 2020	117
Tabel 3.41	Rekapitulasi Realisasi Investasi PMDM Kota Palembang periode Pelaporan Triwulan I s.d IV (Januari s.d Desember) Tahun 2020	118
Tabel 3.42	Daftar Jumlah Layanan dan Jenis Layanan di Mal Pelayanan Publik Kota Palembang	119
Tabel 3.43	Capaian Kinierja Sasaran Berkembangnya Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi dan Daya Kreasi yang digerakan oleh Masyarakat (Comumunity Center) Tahun 2020	124
Tabel 3.44	Capaian Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang Tahun 2020	124

Tabel 3.45	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Kota Palembang 2013-2020	130
Tabel 3.46	Capaian Indikator Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020	132
Tabel 3.47	Rekapitulasi Data atau DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Tahun 2019-2020 di Kota Palembang	134
Tabel 3.48	Rekap Hasil Penjangkauan Tahun 2020	135
Tabel 3.49	Rekapitulasi Data BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) Tahun 2020 per Kecamatan di Kota Palembang	137
Tabel 3.50	Jumlah Penerima Bantuan (Kepala Keluarga) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan menurut Kecamatan di Kota Palembang 2020	138
Tabel 3.51	Rekapitulasi Lansia dan Disabilitas Program Keluarga Harapan Kota Palembang	139
Tabel 3.52	Rekapitulasi Industri Kecil dan Menengah Kota Palembang Tahun 2020	141
Tabel 3.53	Data Industri Rumahan Binaan Dinas PP PA PM Kota Palembang	143
Tabel 3.54	Capaian Indikator Kinerja Persentase Koperasi Aktif Tahun 2020	144
Tabel 3.55	Keragaan Koperasi Kota Palembang per 31 Desember 2020	145
Tabel 3.56	Capaian Indikator Kinerja Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi Tahun 2020	147
Tabel 3.57	Rekapitulasi Penilaian Kesehatan Koperasi dalam Kota Palembang Tahun Buku 2019 Triwulan IV (Semester II/2020)	148

Tabel 3.58	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2020	150
Tabel 3.59	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2020	151
Tabel 3.60	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Event Olah Raga Tingkat Lokal, Regional, Nasional dan Internasional Tahun 2020	159
Tabel 3.61	Jumlah Event Olah Raga Tingkat Lokal, Regional, Nasional dan Internasional Tahun 2020	160
Tabel 3.62	Komposisi Belanja Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2020	163
Tabel 3.63	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020	164
Tabel 3.64	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020	165
Tabel 3.65	Realisasi APBD Pemerintah Kota Palembang Tahun 2020	167
Tabel 3.66	Efisiensi Anggaran per Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang pada APBD Tahun 2020	169

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Bagan Struktur Organisasi	16
-----------	---------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Kota Palembang	4
Gambar 1.2	Aplikasi E-Sakip Kota Palembang.....	17

DAFTAR GRAFIK

Gambar 1.	Kontraksi Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2020	132
Gambar 2.	Sumber Kontraksi Pertumbuhan PDRB Tahun 2018-2020	132
Gambar 3.	PDRB Kota Palembang Atas Dasr Harga Berlaku Tahun 2016- 2020(dalam triliun rupiah)	133
Gambar 4.	PDRB Kota Palembang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2016-2020 (dalam triliun rupiah)	133
Gambar 5.	Struktur Ekonomi Kota Palembang Tahun 2019	135
Gambar 6.	Struktur Ekonomi Kota Palembang Tahun 2020	135
Gambar 7.	PDRB Per Kapita Kota Palembang Tahun 2016-2020 (dalam ribu rupiah)	136



1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut pelaporan kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Peberantasan Korupsi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Bupati/ Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi



Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023. Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang Tahun 2020 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai wujud keberhasilan/ kegagalan pencapaian target sasaran Tahun 2020 yang tercermin dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:



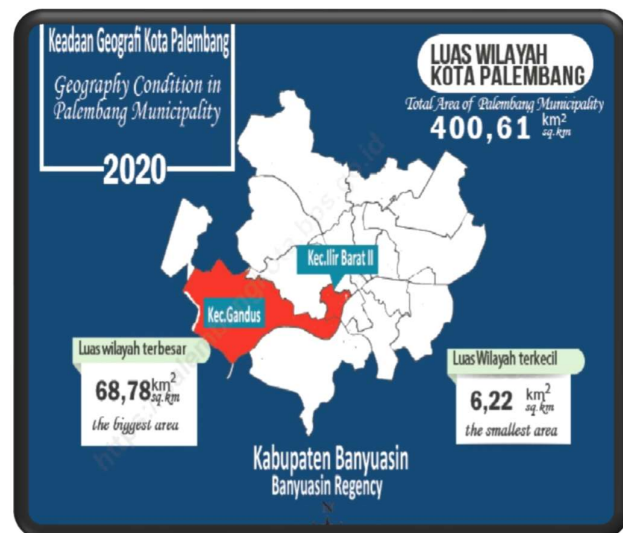
1. Untuk memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Palembang selama Tahun Anggaran 2020;
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Palembang pada Tahun 2020 berkaitan dengan hal-hal yang sudah dicapai dengan yang masih menjadi permasalahan untuk tahun kedepannya berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan di Tahun 2020;
3. Sebagai bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Palembang di tahun berikutnya dan masa yang akan datang.

1.3 Gambaran Umum Kota Palembang

A. Kondisi Geografis

Kota Palembang merupakan salah satu Kota Metropolitan di Pulau Sumatera dan merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan, terletak pada posisi antara 2°52' sampai 3°5' Lintang Selatan dan 104°37' sampai 104°52' Bujur Timur. Pada Tahun 2007 Kota Palembang dibagi 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Pada Tahun 2017, berdasarkan SK Nomor

136/4123/BAK, terbentuk Kecamatan Jakabaring yang merupakan pemekaran dari



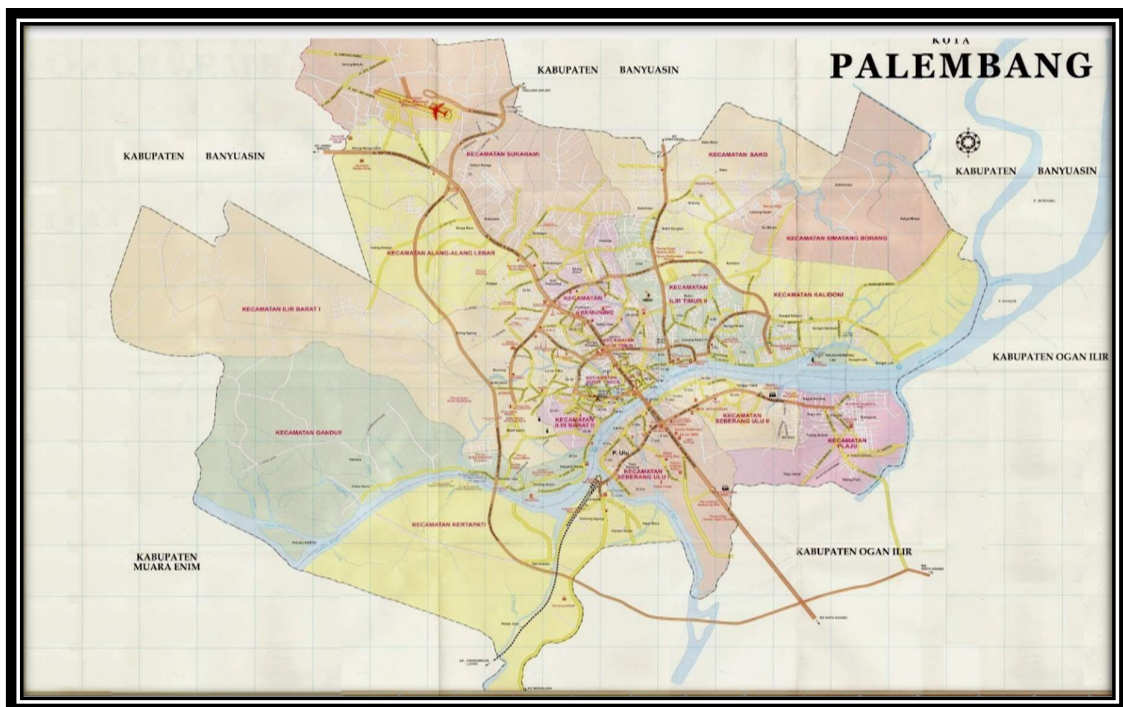


Kecamatan seberang Ulu I dan Kecamatan Ilir timur III yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Ilir timur II, sehingga saat ini wilayah administrasi Kota Palembang terbagi menjadi 18 kecamatan dan 107 kelurahan.

Secara administratif Kota Palembang mempunyai batas daerah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Banyuasin
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Banyuasin
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Banyuasin
- d. Sebelah Selatan : Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir

Gambar 1
Peta Kota Palembang



Wilayah Administrasi Pemerintahan Kota Palembang terbagi atas 18 Kecamatan dan 107 Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 1.1
Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Palembang, 2015-2019

No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Irir Barat II	7	7	7	7	7
2	Gandus	5	5	5	5	5
3	Seberang Ulu I	10	10	5	5	5
4	Jakabaring	-	-	5	5	5
5	Kertapati	6	6	6	6	6
6	Seberang Ulu II	7	7	7	7	7
7	Plaju	7	7	7	7	7
8	Irir Barat I	6	6	6	6	6
9	Bukit Kecil	6	6	6	6	6
10	Irir Timur I	11	11	11	11	11
11	Kemuning	6	6	6	6	6
12	Irir Timur II	12	12	6	6	6
13	Irir Timur III	-	-	6	6	6
14	Kalidoni	5	5	5	5	5
15	Sako	4	4	4	4	4
16	Sematang Borang	4	4	4	4	4
17	Sukarami	7	7	7	7	7
18	Alang - Alang Lebar	4	4	4	4	4

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2020



B. Kondisi Demografis

Berdasarkan data agregat kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Jumlah penduduk Kota Palembang pada periode Semester II 2020 adalah 1.668.164 (satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus enam puluh empat) jiwa yang tersebar dalam delapan belas kecamatan.

Berikut jumlah penduduk Tahun 2020 pada delapan belas kecamatan di Kota Palembang.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kota Palembang

No	Kode	Kecamatan	Jumlah (Jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	167101	Ilir Barat Dua	67.645
2	167102	Seberang Ulu Satu	90.914
3	167103	Seberang Ulu Dua	100.915
4	167104	Ilir Barat Satu	142.912
5	167105	Ilir Timur Satu	67.171
6	167106	Ilir Timur Dua	85.131
7	167107	Sukarami	183.246
8	167108	Sako	107.724
9	167109	Kemuning	81.255
10	167110	Kalidoni	121.073
11	167111	Bukit Kecil	38.238
12	167112	Gandus	72.154
13	167113	Kertapati	90.977
14	167114	Plaju	93.739
15	167115	Alang-Alang Lebar	104.862
16	167116	Sematang Borang	55.495
17	167117	Jakabaring	90.384
18	167118	Ilir Timur Tiga	74.329
TOTAL			1.668.164

Sumber : DKB Semester II 2020 Disdukcapil Kota Palembang, Tahun 2020



1.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Setelah melalui tahap pembangunan ditahun-tahun sebelumnya, maka tahap pembangunan Tahun 2020 merupakan tahap percepatan pembangunan melalui revitalisasi lingkungan dan permukiman serta penataan infrastruktur. Beberapa isu strategis Kota Palembang pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Perekonomian

Masih rentannya struktur perekonomian Kota Palembang terhadap potensii krisis.

2. Permukiman Kumuh dan Air Bersih

Besarnya luasan permukiman kumuh di Palembang menjadi hal ini sebagai salah satu isu strategis pembangunan.

3. Genangan dan Sampah

Masih rendahnya partisipasi warga untuk berperan aktif dalam kegiatan bank sampah maupun pemanfaatan bank sampah yang ada dan adanya 66 titik rawan banjir.

4. Kemacetan

Jumlah ruas jalan yang memiliki rasio kendaraan berbanding kapasitas yang tinggi, sehingga pada ruas-ruas tersebut sangatlah rawan kemacetan.

5. Pendidikan

Masih kurangnya sarana prasarana pendidikan yang menyebabkan belum optimalnya pelayanan pendidikan bagi warga.



6. Kesehatan

Adanya warga miskin yang belum terakses pelayanan kesehatan gratis dan juga dukungan asupan gizi yang memadai.

7. Perdagangan dan Investasi Daerah

Kontribusi sektor perdagangan di dalam PDRB Kota Palembang masih belum memenuhi target.

8. Pariwisata

Belum tercapainya target kunjungan wisatawan menunjukkan adanya program yang belum berjalan secara optimal.

Dengan memperhatikan beberapa isu strategis yang dihadapi Kota Palembang, maka fokus pembangunan kota Palembang dilakukan untuk :

1. Meningkatkan pembangunan **infrastruktur perkotaan, terutama peningkatan sarana dan prasarana sanitasi, pembangunan sarana dan prasarana transportasi, pengendalian banjir**; penanggulangan bencana kebakaran, **peningkatan ruang terbuka hijau** dan infrastruktur hunian lainnya sesuai dengan standar nasional;
2. Mendorong revitalisasi lingkungan permukiman berupa upaya **pengurangan kawasan kumuh** dengan disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana hunian yang layak;
3. Optimalisasi **pengembangan mutu sumber daya manusia** dengan meningkatkan jangkauan dan mutu layanan **pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi**, dan sosial budaya terutama di wilayah yang kumuh dan/atau memiliki angka kemiskinan yang relatif tinggi;



4. Mengoptimalkan **pengembangan pusat-pusat kegiatan perdagangan dan jasa**; pusat **industri**; pusat **kegiatan seni dan budaya**; pusat **kegiatan olahraga**; dan pusat **kegiatan wisata** sesuai standar nasional sebagai sumber utama peningkatan nilai tambah, pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah;
5. Memberdayakan dan menguatkan **usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM)** terutama dari akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran.

Berbagai pertimbangan dalam tahapan pembangunan diatas, maka dijabarkan kedalam program prioritas pembangunan kota Palembang, yaitu:

1. Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat;
2. Perbaikan dan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan;
3. Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman;
4. Penataan Tepian Sungai dan Anak Sungai Musi;
5. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan;
6. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Kelembagaan;
7. Pengendalian dan Penanganan Bencana;
8. Penanganan Kemiskinan dan Sosial Budaya;
9. Pengembangan Pusat-Pusat Kegiatan dan Inovasi Daerah.



1.5 Kondisi Pemerintahan

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang.

Susunan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Kota merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kota merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah Kota merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kota, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;



5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan bencana;
7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup serta sub urusan persampahan;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
10. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
11. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta bidang statistik dan bidang persandian;
12. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
14. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;



15. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat;
16. Dinas Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
18. Dinas Ketenagakerjaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
19. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
20. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
21. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
22. Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
23. Dinas Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan
24. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat subbidang urusan ketentraman dan ketertiban umum.



e. Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan, sub pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Badan Pengelolaan Pajak Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan pajak daerah;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A.

f. Kecamatan, terdiri dari :

1. Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Tipe A;
2. Kecamatan Ilir Timur Dua dengan Tipe A;
3. Kecamatan Seberang Ulu Satu dengan Tipe A;
4. Kecamatan Seberang Ulu Dua dengan Tipe A;
5. Kecamatan Ilir Barat Satu dengan Tipe A;
6. Kecamatan Ilir Barat Dua dengan Tipe A;
7. Kecamatan Sukarami dengan Tipe A;
8. Kecamatan Sako dengan Tipe A;
9. Kecamatan Kemuning dengan Tipe A;
10. Kecamatan Kalidoni dengan Tipe A;
11. Kecamatan Kertapati dengan Tipe A;
12. Kecamatan Plaju dengan Tipe A;



13. Kecamatan Bukit Kecil dengan Tipe A;
14. Kecamatan Gandus dengan Tipe A;
15. Kecamatan Alang-Alang Lebar dengan Tipe A;
16. Kecamatan Sematang Borang dengan Tipe A;
17. Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan Tipe A; dan
18. Kecamatan Jakabaring dengan Tipe A.

Tabel 1.3
Urusan Pemerintahan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Yang Menjadi Kewenangan Daerah

No	Urusan Wajib (Pelayanan Dasar)	Keterangan
1	Pendidikan	Pendidikan Dasar, PAUD dan Non Formal
2	Kesehatan	-
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
5	Perumahan Umum dan Penataan Ruang	-
6	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan	-
7	Sosial	-

No	Urusan Wajib (Non Pelayanan Dasar)	Keterangan
1	Tenaga Kerja	-
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
3	Pangan	-
5	Pertanahan	-
6	Lingkungan Hidup	-
7	Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana	-
8	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-
9	Perhubungan	-
10	Komunikasi dan Informatika	-
11	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Koperasi dan Usaha Mikro
12	Penanaman Modal	-
13	Kepemudaan dan Olahraga	-



14	Statistik	-
15	Persandian	-
16	Kebudayaan	-
17	Perpustakaan	-
18	Kearsipan	-

No	Urusan Pilihan	Keterangan
1	Kelautan dan Perikanan	Perikanan
2	Pariwisata	-
3	Pertanian	-
4	Perdagangan	-
5	Kehutanan	Pengelolaan Taman Hutan Kota
6	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penerbitan Izin Pemanfaatan Panas bumi
7	Perindustrian	-
8	Transmigrasi	-

1.6 Jumlah Aparatur Sipil Negara

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Keadaan Aparat Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang untuk mendukung kegiatan pemerintahan , pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun 2020 dengan jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Palembang berdasarkan data Simpeg Tahun 2020 sebanyak 10.880 orang, yang terdiri dari :



Tabel 1.4
Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2020 Pemerintah Kota Palembang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	SD	91
2.	SLTP	106
3.	SLTP Kejuruan	6
4.	SLTA	1.132
5.	SLTA Kejuruan	211
6.	Diploma I	101
7.	Diploma II	183
8.	Diploma III	885
9.	Diploma IV	137
10.	S-1/ Sarjana Muda	6.556
11.	S-2	1.463
12.	S-3/ Doktor	9
TOTAL		10.880

Sumber : BKPSDM Kota Palembang Tahun 2021

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2020
Pemerintah Kota Palembang

No	Golongan	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Golongan I	11	75
2.	Golongan II	782	626
3.	Golongan III	3.651	1.941
4.	Golongan IV	3.033	761
TOTAL		7.477	3.403

Sumber : BKPSDM Kota Palembang Tahun 2021

Tabel 1.6
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2020
Pemerintah Kota Palembang

No	Golongan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	Golongan III	984
2.	Golongan IV	369
TOTAL		1.353

Sumber : BKPSDM Kota Palembang Tahun 2021

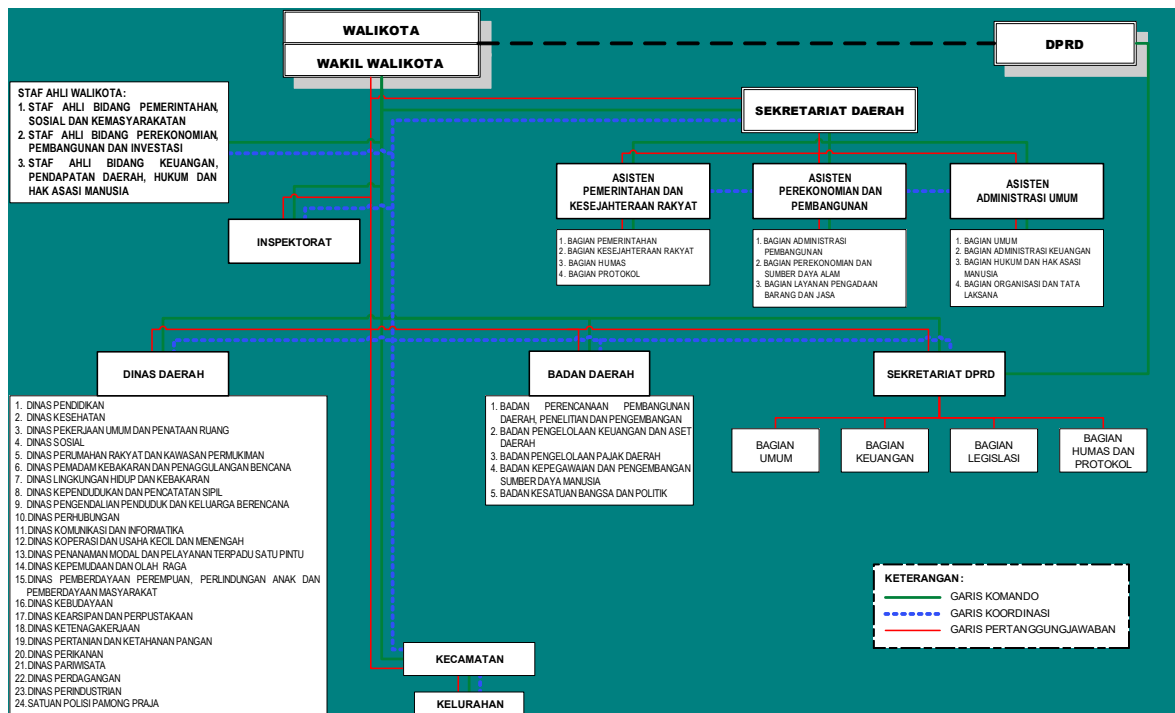


Tabel 1.7
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2020
Pemerintah Kota Palembang

No	Golongan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Tenaga Guru	5.227
2.	Tenaga Kesehatan	1.353
TOTAL		6.580

Sumber : BKPSDM Kota Palembang Tahun 2021

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Palembang

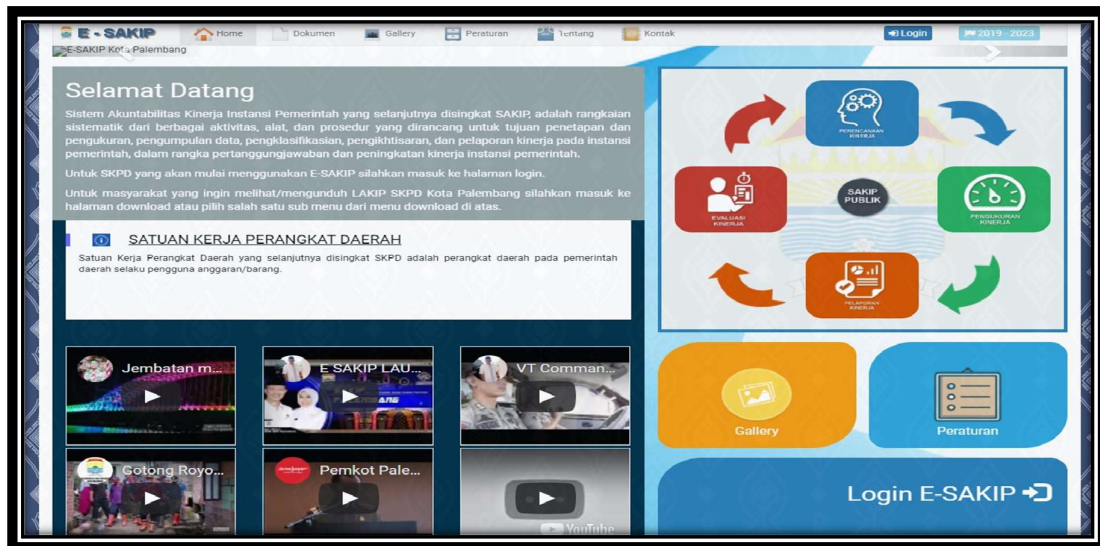




1.7 INOVASI DALAM SISTEM AKIP DAN PENGELOLAAN KINERJA

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Berbagai inovasi telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Palembang, salah satu inovasi yang dikembangkan adalah membangun sistem Instansi Pemerintah (E-SAKIP) *online* yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja, yang dimaksudkan untuk menjaga konsistensi Perencanaan pembangunan tahunan, pengumpulan data kinerja, monitoring dan evaluasi serta memberikan ruang transparansi akuntabilitas kinerja kepada masyarakat luas yang dapat di akses melalui tautan <http://esakip.palembang.go.id>.

Gambar 1.2
Aplikasi E-Sakip Kota Palembang





Aplikasi ini berisi tentang kinerja Pemerintah Kota Palembang dari semua OPD yang memuat dokumen perencanaan dan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Palembang.

1.8 Capaian Reformasi Birokrasi Kota Palembang

Melalui perbaikan pada delapan area perubahan Reformasi Birokrasi yaitu Organisasi, Tata Laksana, Peraturan Perundang-Undangan, SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas Publik, Pelayanan Publik, Pola Pikir (*Mindset*), dan Budaya Kerja Aparatur (*Cultureset*), Pemerintah Kota Palembang menjadikan Program Reformasi Birokrasi sebagai salah satu program prioritas sebagai jawaban dari tuntutan yang diinginkan oleh masyarakat. Penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini dilakukan penilaian mandiri oleh Pemerintah Kota Palembang yang dikoordinir oleh Inspektorat Kota Palembang.

Berdasarkan hasil evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Palembang pada Tahun 2020, terhadap Manajemen Perubahan, Penataan, dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Palembang sebesar 30,54 dari nilai indeks maksimal sebesar 50,00.



2.1 Rencana Strategis Tahun 2018-2023

Dokumen Perencanaan jangka Menengah Pemerintah Daerah (5 tahun) atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dokumen Perencanaan Pemerintah Kota Palembang tahun 2018 - 2023 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.



2.1.1 VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Walikota dan Wakil Walikota periode 2018 - 2023 adalah:

“PALEMBANG EMAS DARUSSALAM 2023”

Penjabaran visi di atas sebagai berikut :

ELOK : Kota Palembang memiliki lingkungan yang bersih, indah, hijau, tertata sehingga nyaman dan layak huni. Masyarakatnya ramah, santun, bersahabat, sehingga menarik untuk menjadi tempat tujuan melakukan berbagai aktivitas, baik ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, olahraga, dan investasi.

MADANI : Kota Palembang masyarakatnya menjunjung tinggi norma, nilai-nilai dan hukum, yang ditopang oleh penguasaan teknologi, beradab, beriman, berilmu, tertib dan patuh kepada peraturan yang berlaku, memiliki peradaban yang tinggi, mengedepankan kesetaraan, transparansi, demokratis dan berkeadilan sosial serta memiliki toleransi dalam pluralisme, partisipasi sosial yang luas dan supremasi hukum.

AMAN : Kota Palembang kondisinya kondusif, masyarakatnya aman untuk melakukan berbagai aktivitas, tidak terjadi konflik sosial baik vertikal maupun horizontal dan para investor aman untuk berinvestasi serta aman untuk menyelenggarakan event nasional maupun internasional.

SEJAHTERA : Kota Palembang memiliki masyarakat yang mempunyai taraf hidup berkualitas dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan, taraf dan pola konsumsi serta sosial lainnya.

DARUSSALAM : Kota Palembang menjadi kota yang aman, damai, tentram, makmur dan sejahtera serta adanya harmoni antara kehidupan manusia dan alam.



2.1.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada (lima) misi pembangunan Kota Palembang Periode 2018 - 2023, yaitu :

1	Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis teknologi dan informasi;
2	Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional;
3	Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan regional, nasional dan internasional yang kompetitif dan komparatif dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi;
4	Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing tinggi;
5	Menjadikan Palembang Kota Pariwisata sungai dan budaya serta event olahraga kelas dunia yang harmoni antara kehidupan manusia dan alam.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Pada dasarnya tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran sebagai target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai



melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Untuk menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi serta berdasarkan hasil evaluasi keselarasan tujuan dan sasaran terhadap isu strategis daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap tujuan dan sasaran serta indikator sasaran RPJMD dengan rincian sebagai berikut:

MISI 1

Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis teknologi dan informasi.

Tujuan Pertama	: Penyediaan Infrastruktur Penopang Pembangunan Daerah, dengan sasaran Meratanya Kebutuhan Infrastruktur sebagai Penopang Pembangunan Daerah;
Tujuan Kedua	: Pengelolaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup dengan sasaran Terlaksananya Tata Kelola Lingkungan Perkotaan secara lestari dan berkelanjutan;
Tujuan Ketiga	: Penyediaan Permukiman dan Kawasan Permukiman yang Layak dan Berwawasan Lingkungan Hidup dengan sasaran Tersedianya permukiman dan kawasan permukiman yang layak dan berwawasan lingkungan hidup.

Misi 2

Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional.

Tujuan Pertama	: Peningkatan Daya Saing dan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja dan Masyarakat;
Tujuan Kedua	: Mewujudkan pranata sosial yang kokoh dan solid di tengah masyarakat dengan sasaran Berkembangnya Nilai-Nilai Pri Kehidupan Umat Beragama Dan Budaya Yang Mengayomi Semua Elemen Masyarakat;
Tujuan Ketiga	: Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel dengan sasaran Terlaksananya Good Governance Practices dan Reformasi Birokrasi ;

Misi 3

Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan regional, nasional dan internasional yang kompetitif dan komparatif dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi.

Tujuan	: Membangun daya saing kota yang unggul sebagai pusat simpul pembangunan dan investasi tingkat kawasan ASEAN dengan Sasaran Meratanya Sebaran Hasil Pembangunan dan Meningkatnya Investasi Daerah.
---------------	--



Misi 4

Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing tinggi.

Tujuan : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berpusat pada masyarakat (community centered) berbasiskan inovasi dan daya kreasi dan berdaya saing tinggi dengan sasaran Berkembangnya ekonomi daerah berbasis inovasi dan daya kreasi yang digerakkan oleh masyarakat (community centered).

Misi 5

Menjadikan Palembang Kota Pariwisata sungai dan budaya serta event olahraga klas dunia yang harmoni antara kehidupan manusia dan alam.

Tujuan : Mewujudkan Palembang sebagai riverfront city dan pusat pengembangan olahraga terbaik di kawasan ASEAN dengan sasaran Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, kepemudaan dan olahraga.

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan daerah serta mencapai tujuan dan sasaran RPJMD 2018-2023, diperlukan startegi, arah kebijakan pembangunan yang jelas, terarah dan terukur. Strategi dan arah kebijakan pembangunan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama 5 tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi (lingkungan) pembangunan di Pemerintah Kota Palembang.

Untuk mendukung hal diatas, terdapat janji-janji kepala daerah yang harus diakomodasi sebagai program utama di dalam RPJMD ini. Program-program tersebut adalah sebagai berikut :



1. Mengembangkan kawasan baru dan pembangunan ruang publik serta ruang terbuka hijau di setiap kecamatan dan kelurahan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
2. Mengembangkan sistem dan manajemen pengelolaan sampah, sanitasi kawasan dan perkotaan;
3. Mengembangkan perbaikan sistem drainase dan manajemen banjir dengan memperbanyak membuat kolam retensi dan normalisasi sungai;
4. Mengembangkan pembangunan sarana dan prasana transportasi intermoda yang terpadu untuk angkutan massal yang berbasis Teknologi dan Informasi;
5. Mengembangkan keterpaduan jaringan jalan dan jembatan yang mendukung mobilitas barang dan jasa melalui penambahan kapasitas dan peningkatan jalan dan jembatan;
6. Mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana berbasis Teknologi dan Informasi;
7. Mengembangkan kesadaran masyarakat dalam pengembangan program gotong royong dan subuh berjama'ah dengan memberdayakan pemuka agama dan tokoh masyarakat setempat;
8. Mengembangkan kualitas pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah unggulan di setiap kecamatan dan kelurahan;
9. Mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan bagi masyarakat dengan membangun dan menjadikan seluruh puskesmas rawat inap yang terakreditasi paripurna dan membangun puskesmas pembantu diseluruh kecamatan di Kota Palembang;



10. Mengembangkan kualitas dan kuantitas peribadatan, pendidikan keagamaan, sarana dan prasarana budaya serta mengantisipasi bahaya penyalahgunaan narkoba;
11. Mengembangkan nilai-nilai etika masyarakat dan aparaturnya guna membangun daya kerja yang mendukung produktivitas kerja tinggi dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat;
12. Mengembangkan sistem dan regulasi pembangunan budaya integritas pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat;
13. Mengembangkan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui sistem reward dan punishment, sistem kepatutan (merit system) serta peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan;
14. Mengembangkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi;
15. Mengembangkan keterlibatan dan keberdayaan masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pembangunan;
16. Menjamin iklim investasi yang kondusif dari aspek hukum dan keamanan serta mengembangkan kerjasama investasi regional, nasional dan internasional;
17. Mengembangkan investasi sektor unggulan yang kompetitif dan komparatif;
18. Mengembangkan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung investasi;
19. Mengembangkan jejaring kerjasama antara pemerintah dan swasta dan mendorong program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility) untuk mengakselerasi kemajuan pembangunan;



20. Mengembangkan kawasan industri Gandus, Sukarami dan Karya Jaya yang bersinergi dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung Api-Api;
21. Mewujudkan kesetaraan gender dan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang kurang mampu;
22. Mengembangkan dan memperluas bantuan modal kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha keluarga (home industry);
23. Mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi melalui lembaga keuangan di tingkat kelurahan, rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT) dengan memberikan fasilitas pinjaman tanpa agunan dan tanpa bunga;
24. Mengembangkan kualitas dan kuantitas pelatihan dan pendampingan untuk pengembangan usaha ekonomi kerakyatan;
25. Mengembangkan pemberdayaan pengelolaan dan penataan pasar tradisional menjadi pasar tradisional modern;
26. Mengembangkan dan memperluas usaha ekonomi kerakyatan, sentra kuliner dan sentra kerajinan rakyat di berbagai sektor guna menurunkan jumlah penduduk miskin (Pro Poor), mengurangi pengangguran dan memperluas kesempatan kerja (Pro Job) serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Pro Growth);
27. Mengembangkan hilirisasi yang mendukung potensi sektor unggulan Kota Palembang dan Sumatera Selatan;



28. Mengembangkan kawasan tepian Sungai Musi (Musi Riverside Tourism Development) sebagai kawasan strategis pariwisata nasional berbasis Teknologi dan Informasi;
29. Mengembangkan SDM pariwisata yang profesional, ramah dan mampu berbahasa asing;
30. Mengembangkan sistem transportasi sungai yang modern dan terpadu;
31. Mengembangkan sarana dan prasarana kesungai dan olahraga yang berkualitas;
32. Mengembangkan pelaksanaan event-event internasional yang terkait dengan sungai dan olahraga;
33. Membangun dan mengembangkan pusat pelatihan kesungai dan olahraga bertaraf internasional.

Tabel 2.1.
Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Palembang
Tahun 2018 – 2023

Misi 1 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Terpadu, Merata Berkeadilan, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan yang berbasis Teknologi dan Informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Penyediaan infrastruktur penopang pembangunan daerah	Meratanya Kebutuhan Infrastruktur sebagai Penopang Pembangunan Daerah	Mengembangkan pembangunan sarana dan prasana transportasi intermoda dan antarmoda yang terpadu untuk angkutan massal yang berbasis Teknologi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> Menjadikan Automatic Traffic Control System (ATCS) Kota Palembang sebagai pusat komando dan koordinasi lalu lintas yang terintegrasi dengan layanan di Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya
		Mengembangkan keterpaduan jaringan jalan dan jembatan yang mendukung mobilitas barang dan jasa melalui penambahan kapasitas dan peningkatan jalan dan	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong penambahan kapasitas jalan dan jembatan



		jembatan	
		Mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana berbasis Teknologi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendorong seluruh elemen masyarakat untuk memasyarakatkan pelatihan tanggap bencana
		Penataan seluruh pedestrian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengembangkan kawasan "green and clean zone" di seluruh pedestrian dan taman kota
Pengelolaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Tata Kelola Lingkungan Perkotaan secara lestari dan berkelanjutan	Mengembangkan kawasan baru dan pembangunan ruang publik serta ruang terbuka hijau di setiap kecamatan dan kelurahan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendorong kebijakan 1 RW 1 Taman di seluruh wilayah Palembang
		Pelestarian ikan belida dan ikan gabus	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengembangkan ekosistem pelestarian ikan gabus dan belida di kawasan Sungai Musi dan perairan yang sesuai dengan habitatnya
		Mempertahankan lahan pertanian yg ada di kota Palembang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperketat regulasi alih fungsi lahan pertanian
Penyediaan Permukiman dan Kawasan Permukiman yang Layak dan Berwawasan Lingkungan Hidup	Tersedianya permukiman dan kawasan permukiman yang layak dan berwawasan lingkungan hidup	Mengembangkan sistem dan manajemen pengelolaan sampah, sanitasi kawasan dan perkotaan dan Pengelolaan persampahan jangka panjang dilaksanakan juga melalui pengelolaan sampah dengan teknologi tinggi dan mendukung TPA tingkat regional yang dapat mengkomodir kab/kota.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan sampah dengan teknologi tinggi dan mendukung TPA tingkat regional yg dpt mengkomodir kab/kota sekitar
		Mengembangkan perbaikan sistem drainase dan manajemen banjir dengan memperbanyak membuat kolam retensi dan normalisasi sungai.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengolahan IPAL (air limbah) dan Pengembangan jaringan air limbah kota yang terintegrasi
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperbanyak pembangunan kolam retensi dan normalisasi



			sungai
--	--	--	--------

Misi 2 : Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Daya Saing dan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Mengembangkan kualitas pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah unggulan di setiap kecamatan dan kelurahan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Memfokuskan pemenuhan SPM bidangbidang pelayanan dasar pendidikan dalam 2 tahun pertama periode RPJMD Mendorong pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi (TIK) untuk mendukung percepatan dan perluasan jangkauan layanan pendidikan
		Mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan bagi masyarakat dengan membangun dan menjadikan seluruh puskesmas rawat inap yang terakreditasi paripurna dan membangun puskesmas pembantu diseluruh kecamatan di Kota Palembang dan pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Memfokuskan pemenuhan SPM bidangbidang pelayanan dasar kesehatan dalam 2 tahun pertama periode RPJMD Mendorong pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi (TIK) untuk mendukung percepatan dan perluasan jangkauan layanan kesehatan
		Mewujudkan kesetaraan gender dan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang kurang mampu	<ul style="list-style-type: none"> Pendekatan pembangunan berbasis responsif gender
		Pengembangan pembangunan wilayah berbasis Kota Layak Anak, Kota Ramah Lansia, Kota Sehat, dan Kota Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> Memfokuskan pada pemenuhan indikator-indikator SDGs dalam pembangunan kota
	Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja dan Masyarakat	Meningkatkan akses pekerja kepada sumber daya produktif melalui peningkatan keterampilan pekerja dengan cara melakukan pelatihan.	<ul style="list-style-type: none"> Membangun kebijakan pelatihan tenaga kerja
Mewujudkan pranata sosial	Berkembangnya nilai-nilai pri kehidupan	Mengembangkan kesadaran masyarakat dalam gerakan	<ul style="list-style-type: none"> Aktifasi program safari shubuh yang wajib diikuti



yang kokoh dan solid di tengah masyarakat	umat beragama dan budaya yang mengayomi semua elemen masyarakat	gotong royong dan shalat subuh berjama'ah dengan memberdayakan pemuka agama dan tokoh masyarakat setempat.	oleh pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Pemerintah Kota Palembang
		Mengembangkan kualitas dan kuantitas peribadatan, pendidikan keagamaan, sarana dan prasarana budaya serta mengantisipasi bahaya penyalahgunaan narkoba	<ul style="list-style-type: none"> Menjadikan masjid, surau dan tempat peribadatan sebagai alternatif pusat kegiatan masyarakat dengan memberikan dukungan sarana dan prasarana sosial
		Mengembangkan nilai-nilai etika masyarakat dan aparatur guna membangun daya kerja yang mendukung produktifitas kerja tinggi dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun rencana aksi pembangunan masyarakat madani palembang melalui roadmap strategi gerakan shalat subuh berjamaah dan roadmap strategi gerakan gotong royong
		Mengembangkan sistem dan regulasi pembangunan budaya integritas pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan sistem dan regulasi pembangunan berbasis budaya integritas kepada pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat
Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang berdaya saing	Terlaksananya Good Governance Practices dan tata kelola pemerintah yang berdaya saing	Mengembangkan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui sistem reward dan punishment, sistem kepantasan (merit system) serta peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Menjalankan program zona integritas dengan pemanfaatan TIK bagi ASN
		Mengembangkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pembenahan manajemen pemungutan, dengan menggunakan sistem informasi yang kredibel dan akuntabel, sehingga ketersediaan data obyek pajak dan retribusi terintegrasi secara menyeluruh.
		Mengembangkan keterlibatan dan keberdayaan masyarakat dan swasta dalam	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong partisipasi aktif seluruh badan usaha swasta di dalam Forum CSR Kota Palembang melalui kebijakan



		penyelenggaraan pembangunan	insentif bagi pelaku usaha yang disusun melalui grand design (Membangun Palembang EMAS DARUSSALAM Bersama MITRA)
		Pengembangan aplikasi berbasis web dan mobile di kelurahan (e- Kelurahan).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengembangkan platform TIK untuk pelayanan publik yang terintegrasi (1 integrated ICT public services platform)
		Pelayanan administrasi terpadu di kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengembangkan kebijakan pelayanan administrasi terpadu di Kelurahan
		Buat rencana smart city mulai dr kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Integrasi pengendalian dan koordinasi kinerja pembangunan daerah melalui command center dan platform smart city

Misi 3 : Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan regional, nasional dan internasional yang kompetitif dan komparatif dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Membangun daya saing kota yang unggul sebagai pusat simpul pembangunan dan investasi tingkat kawasan ASEAN	Meratanya Sebaran Hasil Pembangunan	Mengembangkan kawasan Gandus, Sukarami dan Karyajaya yang bersinergi dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung Api-Api	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendorong pemerataan pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun badan usaha swasta di kawasan Gandus, Sukarami, dan Karyajaya, serta Tanjung Api-Api
		Pengembangan jalur lingkaran luar untuk konektivitas konektivitas kawasan dgn pelabuhan samudera tanjung api2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mewajibkan instansi pemerintah daerah terkait untuk mengaktifkan poros kerjasama antar kota di tingkat regional, nasional dan internasional
	Meningkatnya Investasi Daerah	Menjamin iklim investasi yang kondusif dari aspek hukum dan keamanan, investasi unggulan yang kompetitif dan komparatif serta mengembangkan kerjasama investasi regional, nasional dan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengembangkan satuan tugas promosi daerah untuk investasi dan pariwisata



internasional

Misi 4 : Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing tinggi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berpusat pada masyarakat (community centered) berbasis inovasi dan daya kreasi dan berdaya saing tinggi	Berkembangnya ekonomi daerah berbasis inovasi dan daya kreasi yang digerakkan oleh masyarakat (community centered)	Mengembangkan dan memperluas bantuan modal kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha keluarga (home industry)	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan alokasi anggaran untuk mendukung program bantuan dan pendampingan modal usaha bagi usaha rintisan dan pelaku UMKM
		Mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi melalui lembaga keuangan di tingkat kelurahan, rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT) dengan memberikan fasilitas pinjaman tanpa agunan dan tanpa bunga	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan lembaga keuangan tingkat Kelurahan, RW dan RT.
		Mengembangkan kualitas dan kuantitas pelatihan dan pendampingan untuk pengembangan usaha ekonomi kerakyatan	<ul style="list-style-type: none"> Meluncurkan program pelatihan dan pendampingan untuk usaha ekonomi rakyat.
		Mengembangkan hilirisasi yang mendukung potensi sektor unggulan Kota Palembang dan Sumatera Selatan Pembangunan sentra UKM	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sentra UMKM dan Koperasi
		Mengembangkan pemberdayaan pengelolaan dan penataan pasar tradisional menjadi pasar tradisional modern	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun sistem penataan pasar tradisional menjadi pasar tradisional moder
		Mendorong 4000 UMKM dengan kredit tanpa agunan 3 juta rupiah per UKM	<ul style="list-style-type: none"> Meluncurkan program Palembang 4000 UMKM dengan kredit tanpa agunan 3 juta rupiah per UKM
		Mengembangkan ekosistem startup digital	<ul style="list-style-type: none"> Meluncurkan program Palembang Digital untuk



			pelaku usaha startup digital
--	--	--	------------------------------

Misi 5 : Menjadikan Palembang Kota Pariwisata sungai dan budaya serta event olahraga kelas dunia yang harmoni antara kehidupan manusia dan alam

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Palembang sebagai riverfront city dan pusat pengembangan olahraga terbaik di kawasan ASEAN	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, kepemudaan dan olahraga	Mengembangkan kawasan tepian Sungai Musi (Musi Riverside Tourism Development) sebagai kawasan strategis pariwisata nasional berbasis Teknologi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> Menjalankan program gabungan terintegrasi untuk membangun kawasan tepian Sungai Musi (Musi Riverside Tourism Development) Mewajibkan kepada masing-masing instansi pemerintah daerah untuk memiliki 1 program pembangunan d kawasan Sungai Musi (Musi 101+ / Musi 1 OPD 1 Program)
		Mengembangkan SDM pariwisata yang profesional, ramah dan mampu berbahasa asing	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan dan pelatihan SDM Pariwisata
		Mengembangkan sistem transportasi sungai yang modern dan terpadu	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun Blueprint Pengembangan Kawasan Riverside City dan Pengembangan Transportasi Sungai Kota Palembang
		Mengembangkan sarana dan prasarana kesungai dan keolahragaan yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> Menjalankan program kerjasama lintas sector dalam pembangunan sarana dan prasarana kesungai dan olahraga
		Mengembangkan pelaksanaan event-event internasional yang terkait dengan sungai dan olahraga	<ul style="list-style-type: none"> Menjalin kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk event2 internasional terkait sungai dan olahraga
		Membangun dan mengembangkan pusat pelatihan kesungai dan olahraga bertaraf internasional	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan khusu pusat pelatihan kesungai dan olahraga bertaraf internasional
		Mempromosikan kuliner khas Palembang sebagai kuliner kelas dunia	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan sarana publikasi berbasis IT untuk mempromosikan



		Pelestarian warisan budaya dan Kota Pusaka	kuliner khas Palembang ▪ Mengembangkan kurikulum tambahan di sekolah-sekolah tingkat menengah tentang wawasan pariwisata daerah
--	--	--	--

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palembang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Palembang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Adapun IKU Pemerintah Kota Palembang sebagaimana berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palembang

Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	
1	Penyediaan infrastruktur penopang pembangunan daerah	1	Meratanya kebutuhan infrastruktur sebagai penopang pembangunan daerah.	1	Persentase kondisi jalan baik dan sedang
2	Pengelolaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup	2	Terlaksananya tata kelola lingkungan perkotaan secara lestari dan berkelanjutan	2	Persentase pengurangan genangan air
3	Peningkatan daya saing dan kualitas Sumber Daya Manusia	3	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	3	Indeks Pembangunan Manusia
		4	Meningkatnya daya saing angkatan kerja dan masyarakat	4	Persentase tingkat pengangguran terbuka
4	Mewujudkan pranata sosial yang kokoh dan solid di tengah masyarakat	5	Berkembangnya nilai-nilai kehidupan umat beragama dan berbudaya yang mengayomi semua elemen masyarakat	5	Laju pertumbuhan penduduk
				6	Persentase jumlah jamaah salat subuh di masjid dan musala
5	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang berdaya saing	6	Terlaksananya <i>good governance practices</i> dan reformasi birokrasi	7	Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
				8	Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja



				Instansi Pemerintah Kota Palembang
6	Membangun daya saing kota yang unggul sebagai pusat simpul pembangunan dan investasi tingkat kawasan ASEAN	7	Meratanya sebaran hasil pembangunan	9 Indeks GINI (skala 0-1)
		8	Meningkatnya investasi daerah	10 Jumlah investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
7	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berpusat pada masyarakat (community centered) berbasis inovasi dan daya saing tinggi	9	Berkembangnya ekonomi daerah berbasis inovasi dan daya kreasi yang digerakkan oleh masyarakat (<i>community centered</i>)	11 Laju pertumbuhan ekonomi
				12 Persentase penduduk miskin
				13 Persentase koperasi aktif
				14 Persentase penilaian kesehatan koperasi
8	Mewujudkan Palembang sebagai riverfront city dan pusat pengembangan olahraga terbaik kawasan ASEAN	10	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, kepemudaan dan olahraga	15 Jumlah kunjungan wisatawan
				16 Jumlah event olahraga tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional

2.5 Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja



ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Palembang Tahun 2020. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Palembang tahun 2020 ada pada Lampiran.

2.6 Perjanjian Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Hasil dari proses ini berupa perjanjian kinerja tahunan yang harus segera disusun satu bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran kerja disahkan. Pada level Satuan Kerja Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja sedangkan pada level Walikota Perjanjian Kinerja adalah janji atas hasil-hasil yang akan dirasakan oleh masyarakat melalui pemanfaatan anggaran.

Tujuan ditetapkannya perjanjian kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Perjanjian kinerja juga sebagai dasar penilaian



keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi diukur melalui indikator kinerja. Capaian indikator kinerja dapat tercermin dari *outcome* program dan juga secara tidak langsung dari *output* kegiatan.

Untuk itu, penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palembang Tahun 2020 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Tahun 2018-2023, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah (RKPD) 2018, Peraturan Walikota Palembang Nomor 40 Tahun 2018 tentang RKPD Tahun Anggaran 2020.

Target kinerja tersebut merepresentasikan nilai kualitatif yang harus dicapai selama Tahun 2020. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi, misi, dan akan menjadi komitmen bagi Pemerintah Kota Palembang untuk mencapainya dalam Tahun 2020 yang merupakan tahun akhir RPJMD Kota Palembang 2018-2023.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palembang Tahun 2020 sebagai berikut:



Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No	Sasaran RPJMD	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meratanya Kebutuhan Infrastruktur sebagai Penopang Pembangunan Daerah	1	Persentase Kondisi Jalan Baik dan Sedang	%	65
2	Terlaksananya tata kelola lingkungan perkotaan secara lestari dan berkelanjutan	2	Persentase Pengurangan Genangan Air	%	55
3	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	78,51
4	Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja dan Masyarakat	4	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,80
		5	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,32
5	Berkembangnya Nilai-nilai Perikehidupan Umat Beragama dan Budaya yang Mengayomi semua Elemen Masyarakat	6	Persentase Jumlah Jamaah Salat Subuh di Masjid dan Mushola	%	55
6	Terlaksananya <i>Good Governance Practices</i> dan Reformasi Birokrasi	7	Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	Opini	WTP
		8	Hasil Evaluasi AKIP Kota Palembang	Kategori	BB
7	Meratanya Sebaran Hasil Pembangunan	9	Indeks GINI (skala 0-1)	Indeks	0,354
8	Meningkatnya Investasi Daerah	10	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN / PMA)	Rp	3,12 Trilyun
9	Berkembangnya Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi dan Daya Kreasi yang digerakkan oleh Masyarakat	11	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,55 - 6,05
		12	Persentase Penduduk Miskin	%	10,4



No	Sasaran RPJMD	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
	(community centered)	13	Persentase Koperasi Aktif	%	82,86
		14	Persentase Penduduk Miskin	%	84,66
10	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	15	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	2.400.000
		16	Jumlah Event Olahraga Tingkat Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional	Event	11

2.7 Rencana Anggaran

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Palembang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang yang berada pada OPD kinerja yang diperjanjikan oleh Walikota Palembang.

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis sebagaimana disebutkan pada perjanjian kinerja maka disusun rencana dan target anggaran pendapatan maupun belanja yang tertuang dalam APBD Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, komposisi belanja APBD Kota Palembang, sebagai berikut :



Tabel 2.4
Rencana Belanja Pemerintah Kota Palembang Tahun 2020

No	Uraian	Rencana Belanja	
		APBD Induk	APBDP
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belanja Tidak Langsung	1.947.580.093.000,00	1.728.650.295.785,67
2	Belanja Langsung	2.731.941.025.000,00	2.451.918.516.548,09
Jumlah		4.679.521.118.000,00	4.180.568.812.333,76

Sumber : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2020



Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Kota Palembang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Palembang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, RKT Tahun 2020, RKPD Tahun 2020, dan PK Tahun 2020.

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Palembang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan. Dari Perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.



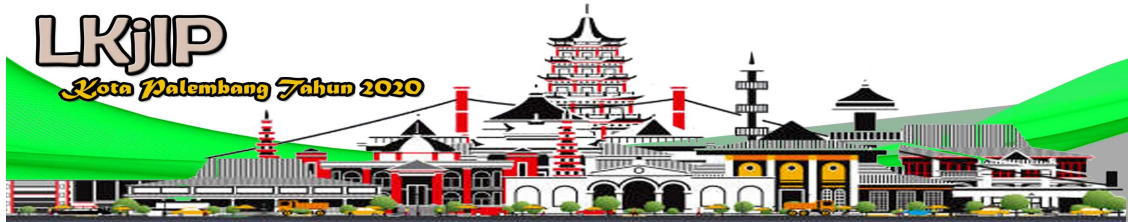
Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100	Tidak Tercapai	Merah
= 100	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

No	Kategori	Rata-Rata % Capaian
1	Baik Sekali	Lebih dari 100%
2	Baik (B)	Lebih dari 75% sd. 100%
3	Cukup (C)	55% sd, 75%
4	Kurang (K)	Kurang dari 55%



3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kota Palembang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Tingkat Kota Palembang dan Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota Palembang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Tahun 2018-2023. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Palembang melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Pemerintah Kota Palembang tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :



Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palembang
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Misi 1 Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis teknologi dan informasi					
Sasaran 1 Meratanya Kebutuhan Infrastruktur sebagai Penopang Pembangunan Daerah					
1	Persentase Kondisi Jalan Baik dan Sedang	%	65 %	79,80%	122,77%
Sasaran 2 Terlaksananya tata kelola lingkungan perkotaan secara lestari dan berkelanjutan					
2	Persentase Pengurangan Genangan Air	%	55 %	56,06%	101,93%
Misi 2 Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional					
Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia					
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	78,51	78,33	99,77%
Sasaran 5 Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja dan Masyarakat					
4	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,80 %	9,86%	68,96%
5	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,32%	1,38%	95,65%
Sasaran 6 Berkembangnya Nilai-Nilai Perkehidupan Umat Beragama dan Budaya yang Mengayomi semua Elemen Masyarakat					
6	Persentase Jumlah Jamaah Shalat Subuh di Masjid dan Mushollah	%	55 %	41,33%	75,14%
Sasaran 7 Terlaksananya <i>Good Governance Practices</i> dan Reformasi Birokrasi					
7	Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	Opini	WTP	WTP	100
8	Hasil Evaluasi AKIP Kota Palembang	Kategori	BB		
Misi 3 Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan regional, nasional dan internasional yang kompetitif dan komparatif dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi					
Sasaran 8 Meratanya Sebaran Hasil Pembangunan					
9	Indeks GINI (skala 0-1)	Indeks	0,354 Indeks	0,358 Indeks	98,88%
Sasaran 9 Meningkatnya Investasi Daerah					
10	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN / PMA)	Rupiah	Rp.3.120.000.000 . 000 Rupiah (1.580. 000.000. 000 Rupiah)	Rp.1.481. 986.000. 000 Rupiah	93,79%
Misi 4 Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing tinggi					
Sasaran 10 Berkembangnya Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi dan Daya Kreasi yang digerakkan oleh					



Masyarakat (<i>community centered</i>)					
11	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,55-6,05%	5,94%	107,03%
12	Persentase Penduduk Miskin	%	10,40 %	10,89%	95,50%
13	Persentase Koperasi Aktif	%	65 %	79,80%	122,77%
14	Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi	%	84,66 %	61,33 %	72,44 %
Misi 5 Menjadikan Palembang Kota Pariwisata sungai dan budaya serta event olahraga kelas dunia yang harmoni antara kehidupan manusia dan alam					
Sasaran 11 Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga					
15	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	2.400.000 Jiwa	895.912 Orang	37,33 %
16	Jumlah Event Olahraga Tingkat Lokal, Regional, Nasional dan Internasional	Event	11 Event	13 Event	118,2 %

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada :

A. **Misi 1** : Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis teknologi dan informasi, dapat dilihat dari indikator :

1. Persentase Kondisi Jalan Baik dan Sedang, mencapai 122,77%
2. Persentase Pengurangan Genangan Air, mencapai 101,93%

B. **Misi 2** : Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional, dapat dilihat indikator :

1. Indeks Pembangunan Manusia, mencapai 99,77%
2. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka, mencapai 68,96%
3. Laju Pertumbuhan Penduduk, mencapai 95,65%
4. Persentase Jumlah Jamaah Shalat Subuh di Masjid dan Mushollah, mencapai 75,14%
5. Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, mencapai 100
6. Hasil Evaluasi AKIP Kota Palembang, mencapai.....



C. **Misi 3** : Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan regional, nasional dan internasional yang kompetitif dan komparatif dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi, dapat dilihat indikator :

1. Indeks GINI (skala 0-1), mencapai 98,88%
2. Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN / PMA), mencapai 93,79 %

D. **Misi 4** : Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing tinggi, dapat dilihat indikator :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi, mencapai 107,03%
2. Persentase Penduduk Miskin, mencapai 95,50%
3. Persentase Koperasi Aktif, mencapai 122,77%
4. Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi, mencapai 72,44%

E. **Misi 5** : Menjadikan Palembang Kota Pariwisata sungai dan budaya serta event olahraga kelas dunia yang harmoni antara kehidupan manusia dan alam, dapat dilihat indikator :

1. Jumlah Kunjungan Wisata, mencapai 37,33%
2. Jumlah Event Olahraga Tingkat Lokal, Regional, Nasional dan Internasional, mencapai 118,2%

Hasil dari capaian tersebut didukung pula dengan program prioritas daerah di Kota Palembang yang telah ditetapkan dan merupakan kesinambungan substansi program-program yang sudah berjalan pada periode sebelumnya serta mempertimbangkan janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota Palembang. Program-program pembangunan lima tahunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Palembang 2018-2023, yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penjelasan tentang Capaian Janji walikota dan Wakil Walikota sebagai substansi yang terkait erat dengan pencapaian Visi dan Misi. Berkenaan dengan janji-janji Walikota dan Wakil Walikota, tercatat ada 33 item janji politik. Tidak seluruh item janji tersebut merupakan indikator outcome sasaran strategis RPJMD Kota Palembang tetapi merupakan output penting, sehingga diperlukan penjelasan tersendiri.

Pencapaian kinerja terhadap Janji Walikota dan Wakil Walikota diuraikan dalam sub bab pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang relevan.

3.2 Pengukuran dan Evaluasi dan Kinerja Sasaran Strategis

Pembahasan capaian kinerja kebijakan dan strategi Pemerintah Kota Palembang untuk mewujudkan pencapaian Misi secara terukur sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2013-2018, lebih lanjut diuraikan berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palembang Tahun 2020.

Dalam laporan ini, Pemerintah Kota Palembang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2018-2023 maupun RKPD Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai



dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palembang dimana telah ditetapkan 10 (sepuluh) sasaran dengan 16 (enam belas) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

1	Sasaran	1	Meratanya Kebutuhan Infrastruktur sebagai Penopang Pembangunan Daerah	sebanyak	1	Indikator
2	Sasaran	2	Terlaksananya tata kelola lingkungan perkotaan secara lestari dan berkelanjutan	sebanyak	1	Indikator
3	Sasaran	4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	sebanyak	1	Indikator
4	Sasaran	5	Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja dan Masyarakat	sebanyak	2	Indikator
5	Sasaran	6	Berkembangnya Nilai-Nilai Perikehidupan Umat Beragama dan Budaya yang Mengayomi semua Elemen Masyarakat	sebanyak	1	Indikator
6	Sasaran	7	Terlaksananya <i>Good Governance Practices</i> dan Reformasi Birokrasi	sebanyak	2	Indikator
7	Sasaran	8	Meratanya Sebaran Hasil Pembangunan	sebanyak	1	Indikator
8	Sasaran	9	Meningkatnya Investasi Daerah	sebanyak	1	Indikator
9	Sasaran	10	Berkembangnya Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi dan Daya Kreasi yang digerakkan oleh Masyarakat (<i>community centered</i>)	sebanyak	4	Indikator
10	Sasaran	11	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	sebanyak	2	Indikator

Secara umum Pemerintah Kota Palembang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Palembang Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai berikut :



Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meratanya Kebutuhan Infrastruktur sebagai Penopang Pembangunan Daerah	1	Persentase Kondisi Jalan Baik dan Sedang	65 %	79,80%	122,77%
2	Terlaksananya tata kelola lingkungan perkotaan secara lestari dan berkelanjutan	2	Persentase Pengurangan Genangan Air	55 %	56,06%	101,93%
3	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	3	Indeks Pembangunan Manusia	78,51 Indeks	78,33 Indeks	99,77%
4	Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja dan Masyarakat	4	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	6,80 %	9,86%	68,96%
		5	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,32%	1,38%	95,65%
5	Berkembangnya Nilai-Nilai Perikehidupan Umat Beragama dan Budaya yang Mengayomi semua Elemen Masyarakat	6	Persentase Jumlah Jamaah Shalat Subuh di Masjid dan Mushollah	55 %	41,33%	75,14%
6	Terlaksananya Good Governance Practices dan Reformasi Birokrasi	7	Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	WTP	WTP	100
		8	Hasil Evaluasi AKIP Kota Palembang	BB		
7	Meratanya Sebaran Hasil Pembangunan	9	Indeks GINI (skala 0-1)	0,354 Indeks	0,358 Indeks	98,88%



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
8	Meningkatnya Investasi Daerah	10	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN / PMA)	Rp.3.120.000.000.000 Rupiah (1.580.000.000.000 Rupiah)	Rp.1.481.986.000.000 Rupiah	93,79
9	Berkembangnya Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi dan Daya Kreasi yang digerakkan oleh Masyarakat (<i>community centered</i>)	11	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,55-6,05%	5,94%	107,03%
		12	Persentase Penduduk Miskin	10,40 %	10,89%	95,50%
		13	Persentase Koperasi Aktif	82,86 %	82,99 %	100,16 %
		14	Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi	84,66 %	61,33 %	72,44 %
10	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	15	Jumlah Kunjungan Wisata	2.400.000 Jiwa	895.912 Orang	37,33 %
		16	Jumlah Event Olahraga Tingkat Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional	11 Event	13 Event	118,2 %

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran di atas dapat digambarkan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran strategis Pemerintah Kota Palembang tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.3
Pencapaian Indikator Sasaran

No	Misi	Jumlah Tujuan	Jumlah Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Kategori Indikator Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Misi 1	3	2	2	BS=2, B=0, C=0, K=0
2	Misi 2	3	4	6	BS=0, B=4, C=1, K=0 belum AKIP
3	Misi 3	1	2	2	BS=2, B=0, C=0, K=0
4	Misi 4	1	1	4	BS=2, B=1, C=1, K=0
5	Misi 5	1	1	2	BS=1, B=0, C=0, K=1
		9	10	16	

- Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 16 Indikator Kinerja Utama, diketahui bahwa **7 indikator kinerja** bermakna **Baik Sekali**, **5 Indikator kinerja** bermakna **Baik**, **2 Indikator kinerja** bermakna Cukup dan 1 Indikator kinerja berkategori Kurang **dan 1 Indikator kinerja belum keluar hasil penilaian (Nilai SAKIP Kota Palembang yang dikeluarkan oleh KemenPANRB RI).**

Adapun kategori pencapaian kinerja sasaran strategis pada tiap sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Palembang Tahun 2020

No	Capaian Strategis	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Kinerja Sasaran	Kategori Indikator			
				Baik Sekali	Baik	Cukup	Kurang
Misi 1 Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis teknologi dan informasi							
1	Meratanya Kebutuhan Infrastruktur sebagai Penopang Pembangunan Daerah	1	122,77	Baik Sekali			
2	Terlaksananya tata kelola lingkungan perkotaan secara lestari dan	1	101,93	Baik Sekali			



	berkelanjutan						
Misi 2 Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional							
3	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1	99,77		Baik		
4	Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja dan Masyarakat	2	82,8		Baik		
5	Berkembangnya Nilai-Nilai Perikehidupan Umat Beragama dan Budaya yang Mengayomi semua Elemen Masyarakat	1	75,14		Baik		
6	Terlaksananya <i>Good Governance Practices</i> dan Reformasi Birokrasi	2
Misi 3 Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan regional, nasional dan internasional yang kompetitif dan komparatif dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi							
7	Meratanya Sebaran Hasil Pembangunan	1	98,88		Baik		
8	Meningkatnya Investasi Daerah	1	93,79		Baik		
Misi 4 Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing tinggi							
9	Berkembangnya Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi dan Daya Kreasi yang digerakkan oleh Masyarakat (<i>community centered</i>)	4	93,78		Baik		
Misi 5 Menjadikan Palembang Kota Pariwisata sungai dan budaya serta event olahraga kelas dunia yang harmoni antara kehidupan manusia dan alam							
10	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	77,77		Baik			



Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat dilihat lebih rinci pada evaluasi analisis capaian kinerja.

3.3 Analisa Capaian Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis 1 **Meratanya Kebutuhan Infrastruktur Sebagai Penopang** **Pembangunan Daerah.**

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Tahun 2020 ini merupakan tahun awal rencana pembangunan Pemerintah Kota Palembang secara bertahap dan berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuannya melalui 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 16 (enambelas) Indikator Kinerja Sasaran, yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Palembang maupun Penetapan Kinerja Tahun 2020 Pemerintah Kota Palembang. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 10 (sepuluh) sasaran strategis Pemerintah Kota Palembang pada Tahun 2020 tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis 1 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke satu sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMPD) Kota Palembang tahun 2018-2023, yaitu “ **Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis Teknologi dan**



Informasi” dan tujuan : “ **Penyediaan Infrastruktur Penopang Pembangunan Daerah**”. Sasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Perhubungan. Pengukuran sasaran ini menggunakan dua indikator sasaran dan rata-rata capaian kinerja. Rata-rata capaian 2020 sebesar 122,77% dengan kategori **Baik Sekali**. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran Meratanya Kebutuhan Infrastruktur sebagai
Penopang Pembangunan Daerah Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Persentase Kondisi Jalan Baik dan Sedang	%	65	76	126,67	65	79,80	122,77	80

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Perhubungan Kota Palembang Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Meratanya Kebutuhan Infrastruktur sebagai Penopang Pembangunan Daerah, 1 (satu) indikator kinerja mencapai target. Dikategorikan **Baik Sekali** dengan capaian kinerja sebesar 122,77% Tahun 2020 dimana target sebesar 65% dan terealisasi sebesar 79,80%. Capaian kinerja ini menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2019 3,9%. Apabila dibandingkan dengan target kondisi akhir RPJMD maka capaian kinerja sudah 99,75% artinya kurang 0,2% lagi capaian terpenuhi.



Tabel 3.6
Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintah di Kota Palembang (Km), 2019 – 2020

Tingkat Kewenangan Pemerintah	Tahun	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Kabupaten/ Kota	681,75	681,75
Total	681,75	681,75

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palembang Tahun 2020 sepanjang 681,75 Km, Panjang jalan ini sama dengan kewenangan Pemerintah Kota Palembang Tahun 2019.

Tabel 3.7
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kota Palembang (Km), 2019 – 2020

Jenis Permukaan Jalan	Tahun	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Aspal	259,79	259,79
Tidak diaspal	421,96	421,96
Total	681,75	681,75

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2021

Dari tabel terlihat bahwa Tahun 2019 dan 2020 panjang jalan menurut jenis permukaan jalan yang diaspal sepanjang 259,79 Km dan yang tidak diaspal 421,96 Km.

❖ **Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap capaian kinerja :**

1. Pada tahun 2020 panjang jalan memenuhi kondisi jalan baik dan sedang adalah 544,05 Km sedangkan panjang jalan Kota Palembang sebesar adalah 681,75 Km. Realisasi tersebut dapat tercapai dengan baik dikarenakan adanya dana Bantuan Gubernur, Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) dari Pusat, Dana APBD dan pemeliharaan jalan yang dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas PUPR Kota Palembang. Bantuan Gubernur yang didapatkan tahun 2020 sebesar Rp.



62.500.000.000 sedangkan Dana DAK yang didapatkan sebesar Rp. 15.327.955.000;

2. Berdasarkan indikator persentase jalan lingkungan yang baik, bahwa berdasarkan data inventarisasi jalan lingkungan yang dilakukan konsultan di lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang, data jumlah jalan yang ada di 107 Kelurahan di wilayah Kota Palembang berjumlah 2.061 Km. pada Tahun 2019 telah melakukan kegiatan baik peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan sebanyak 1.728 KM dengan lebar bervariasi. Untuk Tahun 2020 kegiatan tersebut mengalami peningkatan 7 (tujuh) Km dengan lebar yang bervariasi dikarenakan di Tahun 2020 khususnya Kota Palembang mengalami pengurangan anggaran yang cukup signifikan dan baru terlaksana pada anggaran APBDP Tahun anggaran 2020 akan tetapi target yang ditentukan untuk Tahun 2020 telah tercapai sebesar 84,18% atau dengan capaian 100,21% dari target 84% Tahun 2020. Dimana pencapaian ini berdasarkan persentase perbandingan jalan baik dengan jumlah jalan lingkungan yang ada dimana jalan baik 173.550 m² dan jalan lingkungan yang ada 206.144 m².

3. Program dan kegiatan yang berpengaruh terhadap capaian kinerja :

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	Capaian (%)
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	7.709.598.450,00	5.214.734.450,00	2.494.864.000,00	67,64
2	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	346.264.135.667,80	299.432.893.942,60	46.831.241.671,20	86,48
3	Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	87.142.314.606,00	71.368.889.421,00	15.773.425.185	81,90



❖ **Solusi/ upaya yang dilaksanakan dalam capaian kinerja :**

1. Dengan adanya alokasi penggunaan dan APBD, Bantuan Gubernur dan DAK serta diimplementasikan pada program dan kegiatan sehingga prioritas pembangunan/ pemeliharaan jalan dapat dilaksanakan dengan baik;
2. Pada Tahun 2020 kondisi jalan di Kota Palembang yang baik sepanjang 505,67 Km, rusak 80,31 Km, sedang 58,63 Km dan rusak berat sepanjang 37,14 Km. Jalan yang rusak dan rusak berat inilah yang menjadi prioritas untuk diperbaiki oleh Pemerintah Kota Palembang.

Tabel 3.8
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Palembang (Km), 2019 – 2020

Jenis Permukaan Jalan	Tahun	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Baik	361,45	505,67
Sedang	211,13	58,63
Rusak	89,65	80,31
Rusak Berat	19,52	37,14
Total	681,75	681,75

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2021

Sasaran Strategis 2

Terlaksananya Tata Kelola Lingkungan Perkotaan Secara Lestari Dan Berkelanjutan

Sasaran strategis 2 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi kesatu sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMPD) Kota Palembang tahun 2018-2023, yaitu “ **Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis Teknologi dan**



Informasi” dan tujuan “Pengelolaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup dengan sasaran Terlaksananya Tata Kelola Lingkungan Perkotaan secara lestari dan berkelanjutan” Sasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 101,93% dengan kategori **Baik Sekali**, tersaji pada tabel berikut dibawah ini:

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran Terlaksananya Tata Kelola Lingkungan Perkotaan secara Lestari dan Berkelanjutan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Persentase Pengurangan Genangan Air	%	50	50	100	55	56,06	101,93	70

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 (satu) Indikator Sasaran Terlaksananya Tata Kelola Lingkungan Perkotaan secara Lestari dan Berkelanjutan, 1 (satu) indikator sasaran mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 101,93%, mengalami peningkatan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 100%, dikategorikan **Baik Sekali**. Pada Tahun 2020 jumlah titik yang sudah teratasi berjumlah 37 titik dibagi dengan jumlah titik genangan berjumlah 66 titik dikalikan 100 persen. Target tahun 2020 sebesar 55%



teralisasi 56,06% dengan capaian sebesar 101,93%. Bila dibandingkan dengan target kondisi akhir RPJMD capaian kinerja tinggal 13,94%.

❖ **Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap capaian kinerja :**

1. Beroperasinya infrastruktur Pompanisasi Sungai Bendung di Kelurahan 10 Ilir bantuan Kementerian PUPR Republik Indonesia. Pompanisasi tersebut mampu menyedot air dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Bendung dengan kekuatan 36.000 liter per detik sehingga diklaim mampu mereduksi hingga 2.400 Ha luasan lahan banjir di Kota Palembang;
2. Selain Pompanisasi pengurangan titik banjir juga ditunjang dari pemasangan box culvert di jalan bertipe cekungan, perbaikan jembatan dan pembersihan saluran air terutama anak-anak sungai;
3. Pengoptimalan Kolam retensi dan penambahan kolam retensi.

Adapun Kolam retensi yang ada di Kota Palembang berdasarkan Kecamatan sebagai berikut :

Tabel 3.10
Kolam Retensi Per Kecamatan di Kota Palembang

No	Kecamatan/ Kolam Retensi	Luas (M ²)	Dalam (M)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kecamatan Ilir Barat I :			
	- Siti Khadijah	11.085	0,8 – 1,5	
	- Simpang Polda	5.655	0,8 – 1,5	
	- Sport Hall	4.070	0,8 – 1,5	
	- Kemang Manis	12.000	2,5 – 3	Dibangun Tahun 2013
	- Brimob Jln. Demang Lebar Daun	30.000	4	Dibangun Tahun 2018
	- SMP 22 Pakjo	8.000		Dibangun Tahun 2016
	- Macan Kumbang			
	- Sumur Tinggi	800		Dibangun Tahun 2019
	- Kancil Putih	3.125		
	- SDN 3 Palembang	2.000		
	- MAN 3 Palembang	1.250		
2	Kecamatan Ilir Barat II :			
	- Tanjung Burung			Dibangun Tahun 2019



3	Kecamatan Gandus :			
	- Taman Purbakala	5.393	0,8 – 1,5	
	- Poligon	7.000	3 – 4	Peningkatan Tahun 2014
4	Kecamatan Kalidoni :			
	- Kedamaian	15.000	2 – 3	Dibangun Tahun 2012
	- SMP 37	7.500	2,5 – 3	Dibangun Tahun 2014
	- Komp. Villa Kedamaian Permai II	1.400	0,8 – 1,5	Dibangun Tahun 2015
	- Citra Damai 2	1.900	2,5	Dibangun Tahun 2016
	- PLN	800	2,5	Dibangun Tahun 2016
	- Tanjung Sari 2	1.500	0,8 – 1,5	Dibangun Tahun 2016
	- Arafuru	10.000	0,8 – 1,5	Dibangun Tahun 2016
5	Kecamatan Bukit Kecil :			
	- Kambang Iwak Besak	22.126	2	
	- Kambang Iwak Kecil	7.886	0,8 – 1,5	
6	Kecamatan Ilir Timur I :			
	- RSMH			Dibangun Tahun 2018
7	Kecamatan Ilir Timur II :			
	- Simpang Patal Pusri (Kolam Kiwal)	21.000	0,8 – 1,5	
	- IBA	12.037	0,8 – 1,5	
	- Lapangan Golf	2.000	2 – 3	
	- Pertamina Golf	15.000	2 – 3	
	- Telkom (Lemabang)			
8	Kecamatan Sukarame :			
	- Ario Kemuning	16.267	0,8 – 1,5	
	- Griya Buana Indah	6.000	1,5 – 2	Dibangun Tahun 2015
9	Kecamatan Kemuning :			
	- Talang Aman I	16.898	0,8 – 1,5	
	- Talang Aman II	5.202	0,8 – 1,5	
	- Seduduk Putih	22.590	0,8 – 1,5	
10	Kecamatan Sako :			
	- Sangkuriang	12.000	2,5 – 3	Dibangun Tahun 2013
	- Bumi Nusa Cendana	14.000	2,5 – 3,5	Dibangun Tahun 2013 (Peningkatan)
11	Kecamatan Jakabaring :			
	- Ogan Permai Indah (OPI)	22.217	3 – 5	
	- Gor Jakabaring	200.000	3 – 5	
	- Belakang Poltabes	10.000	2 – 3	
12	Kecamatan Seberang Ulu I :			
	- RSUD BARI	1.400	0,8 – 1,5	
	- Silaberanti			
13	Kecamatan Alang-Alang Lebar :			
	- Punti Kayu	10.000	1 – 1,5	
	- Talang Kelapa	8.070	1,5 – 3	
	- Raflesia	3.000		Dibangun Tahun 2019



14	Kecamatan Ilir Timur III :			
	- Sungai Bedung Jln. Ali Gatmir	15.000	4	Konstruksi 2017 - 2018

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2021

4. Optimalnya pekerjaan rutin dalam pengoptimalan pengerukan gorong-gorong dan sungai ;
5. Untuk Tahun 2020 Ruang Terbuka Hijau sebesar 3.901 Ha yang terdiri dari luas RTH yang meliputi taman kota, RTH lainnya, jalur hijau, hutan kota, pemakaman (TPU) dan kolam retensi ;

Tabel 3.11
Daftar Jenis dan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Palembang

No	Jenis Ruang Terbuka Hijau	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
1	Taman Kota	58,82
2	Pulau Jalan dan Median Jalan	41,83
3	Hutan Kota	58,07
4	Taman Perkantoran	5,29
5	RTH Sempadan Sungai	13,08
6	Ruang di Bawah Jalan Layang	0,74
7	Jalur Pejalan Kaki	0,68
8	Pemukaman	141,76
9	RTH Lainnya	3425,56
10	Jalur Hijau (Bahu Jalan Kanan-Kiri)	156,00
Total Luas		3.901,83
Persentase dari luas Kota Palembang : 40.061 Ha		9,74

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2021

6. Upaya pengurangan sampah terdiri dari pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan, upaya penanganan sampah sendiri terdiri dari pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir (UU RI No.18 Tahun 2008



Tentang Pengelolaan Sampah, 2008). Kota Palembang adalah kota yang masih mengalami masalah persampahan kompleks di bidang pengelolaan persampahan ini. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang sangat berperan dalam penanggulangan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah di Kota Palembang yang dilaksanakan DLHK berupa penanganan dan pengurangan sampah ;

7. Program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja :

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	Capaian (%)
1	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	42.555.803.132,00	33.272.416.922,00	9.349.970.160,00	78,19
2	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	4.170.161.387,00	2.708.367.485,20	1.461.793.901,80	64,95
3	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Irigasi Lainn	43.288.181.792,00	31.431.177.792,00	11.857.004.000,00	72,61
4	Program Pengendalian Banjir	8.577.394.492,84	6.645.212.953,00	1.932.181.540,00	77,47
5	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	24.324.556.887,18	22.562.621.861,18	1.761.935.026	92,76
6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	65.431.375.061,20	52.047.403.234,60	13.383.971.826,60	79,45

❖ **Solusi yang diambil terhadap pengurangan banjir/ genangan air :**

1. Restorasi sungai sekanak – Lambidaro, Daerah Aliran Sungai (DAS) sepanjang 10,9 KM akan dinormalisasi agar mampu menampung air hujan dan alirannya direstorasi agar fungsinya kembali sebagai sarana transportasi air;
2. Daerah yang berhasil dikurangi titik banjir (genangan air) di Kota Palembang Jalan Alamsyah Ratu Prawinegara, Angkatan, Ryacudu, Demang Lebar Daun, Asrama Brimob, Musi Raya, Kol, H. Burlian, Musyawarah – Gandus, Mayor



Ruslan, Simpang Veteran, Bangau, Rifai Cek Yan, Jenderal Sudirman, Dr. M. Isa, Puncak Sekuning, Sultan Mansyur dan Bay Salim;

3. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan program pengelolaan ruang terbuka hijau berupa pemeliharaan RTH dan pengembangan taman rekreasi;
4. Kegiatan Penanganan sampah sebagai berikut :
 - a. Membersihkan/ menyapu jalan (kegiatan ini membersihkan sampah yang terdapat di median jalan, bahu jalan dan fasilitas umum yang dilakukan oleh petugas penyapuan DLHK berjumlah 580 petugas dimulai dari pagi sampai malam hari);
 - b. Mengangkut / membuang sampah dari TPS ke TPA (kegiatan pengangkutan sampah yang dilakukan menggunakan *dump truck*, motor sampah, *convector*, *armroll* dan *Becho loader* dari TPS yang tersebar di Kota Palembang dan dibawa ke TPA pagi hingga malam);
 - c. Mengosongkan *septic tank* dari lingkungan perumahan dan perkantoran, lalu membuangnya ke IPLT (Pelayanan penyedotan, pengangkutan dan pembuangan tinja ke IPLT TPA);
 - d. Pengelolaan, pemanfaatan sampah di TPA (Sampah di TPA dilakukan pengelolaan dengan cara Pemanfaatan Gas Metan, Pengomposan, 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) serta pengembalian sampah ke media lingkungan (TPA) dengan penataan *system control landfill* menggunakan alat berat *Excavator* dan *Bulldozer*);
 - e. Memelihara dan merawat, menyimpan dan menyiapkan kendaraan angkutan sampah serta sarana kebersihan lainnya (kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kondisi angkutan tetap beroperasi dengan baik dan



mempersiapkan sarana kebersihan sampah dalam menunjang kegiatan penanganan).

5. Kegiatan Pengurangan sampah sebagai berikut :
 - a. Memberikan sosialisasi, bimbingan teknis pengelolaan sampah dari sumber dengan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) kepada masyarakat, kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis telah dilakukan oleh DLHK baik ke instansi pemerintah, swasta dan masyarakat, seperti :
 - 1) Pengurangan timbulan sampah melalui pemakaian peralatan guna ulang seperti penggunaan Kantong Organik, tumbler, sapu tangan, box makanan dan lain-lain;
 - 2) Pemanfaatan sampah organik dengan cara pengomposan skala rumah tangga yang bisa dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman;
 - 3) Pemilahan sampah yang bernilai ekonomis dari sumber untuk menunjang kegiatan bank sampah dan TPS3R;
 - 4) Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui bintek kerajinan dengan bahan baku sampah seperti pembuatan wadah tissue, topi, map, kantong belanja dan lain-lain;
 - b. Membentuk Bank sampah dan TPS3R melalui peran serta masyarakat :

Kegiatan ini memotivasi masyarakat agar dapat mendirikan bank sampah dan membimbing terbentuknya organisasi bank sampah di lingkungan tempat tinggalnya melalui bintek dan penyuluhan :

 - 1) Membangun bank sampah di beberapa kelurahan seperti di Kelurahan Talang Kelapa, Sukodadi, Suka Mulya dan lain-lain;
 - 2) Melakukan bimbingan kepada 107 kelurahan dalam pembangunan TPS3R yang menjadi program Pemerintah Kota Palembang, pada tahun anggaran



2019 ada 19 kelurahan yang telah siap untuk melaksanakan pembangunan TPS3R.

c. Menerbitkan himbauan, edaran dan sosialisasi pengurangan sampah plastik pada pengusaha retail serta pada kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan sampah plastik :

- 1) Menerbitkan himbauan berupa Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dengan konsep plastik tidak gratis pada pengusaha retail;
- 2) Menerbitkan himbauan berupa Surat Edaran Walikota Palembang Nomor : 31/ SE/ DLHK/ 2019 Tanggal 08 Agustus 2019 kepada pengurus masjid dan panitia qurban untuk menggunakan wadah ramah lingkungan atau wadah guna ulang sebagai pengganti kantong plastik.

d. Tempat Pembuangan Sementara (TPS)

- 1) Menambah Jumlah TPS berkoordinasi dengan Camat dan Lurah;
- 2) Melakukan Pemeliharaan dan Rehab/ memperluas TPS;
- 3) Perlunya melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan TPS oleh Pemerintah Kota Palembang.

e. Sarana Prasarana TPA

- 1) Perbaikan infrastruktur TPA Karya Jaya seperti jalan lingkungan, drainase, dan pengadaan alat berat *excavator* (8 unit), *bulldozer* (4 unit) serta sarana penunjang lainnya;
- 2) Perlu penambahan alat berat seperti *excavator* (5 Unit) dan Bulldozer (4 Unit) untuk proses *Dumping*/ pembuangan dan penanganan/ penataan TPA Sukawinatan;



- 3) Perlu pembangunan akses jalan untuk menuju titik dumping/pembuangan yang baru di TPA Sukawinatan sampai beroperasinya kembali TPA Karya Jaya.
- d. Kesadaran Masyarakat
 - 1) Perlu keterlibatan, dukungan dan kerjasama semua pihak baik OPD Terkait, Camat, Lurah, RT, Tokoh Masyarakat dan swasta agar melakukan pencegahan dan memberikan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan melalui sosialisasi/ penyuluhan;
 - 2) Perlu dilakukannya penegakan Perda secara terpadu dan pengawasan yang terus menerus;
 - 3) Perlu dibuat Perwali untuk mengatur waktu pembuangan sampah oleh masyarakat agar tidak terus menerus setiap waktu membuang sampah selaras dengan waktu pengangkutan sampah oleh armada DLHK.

Sasaran Strategis 3 **Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia**

Sasaran strategis 3 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang tahun 2018-2023, yaitu “ **Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintah yang bersih, berwibawa dan professional**” dan tujuan : “ **Peningkatan Daya Saing dan Kualitas Sumber Daya Manusia**”.



Pencapaian pembangunan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh proses pembangunan manusia. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari seberapa besar kualitas manusia di suatu wilayah. Indikator yang bisa mengukur kualitas manusia disuatu daerah yaitu dengan cara Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM ini menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM ini bermanfaat untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah, Ukuran kinerja pemerintah dan penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Indeks Pembangunan Manusia ini diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada Tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dsar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar layak hidup.

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran ini dilaksanakan sinergi perangkat daerah diantaranya Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Perdagangan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI, Satuan Polisi Pamong Praja. Rata - rata capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas sumberdaya manusia sebesar 99,77%. Berikut ini tampilan capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palembang seperti pada tabel dibawah ini :



Tabel 3.12
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Indeks Pembangunan Manusia	%	78,08	78,44	100,46	78,51	78,33	99,77	79,81

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020 menurun dengan realisasi 78,33% dari target 78,51% sehingga capaian kinerja 99,77%. Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2019 sebesar 100,46% ada penurunan sekitar 0,11%. Capaian kinerja berada pada kategori **Baik**. Bila dibandingkan dengan target kondisi akhir RPJMD capaian kinerja tinggal 1,48%.

Tabel 3.13
Indeks Pembangunan Manusia 2019-2020

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IPM	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Sumatera Selatan	70,02	70,01
Ogan Komering Ulu	69,45	69,32
Ogan Komering Ilir	66,96	66,82
Muara Enim	68,88	68,74
Lahat	67,62	67,44
Musi Rawas	66,92	66,79
Musi Banyuasin	67,83	67,69
Banyuasin	66,90	66,74
OKU Selatan	65,43	65,30
OKU Timur	69,34	69,28
Ogan Ilir	67,22	67,06



Empat Lawang	65,10	65,25
Penukal Abab Lematang Ilir	64,33	64,70
Musi Rawas Utara	64,32	64,49
Kota Palembang	78,44	78,33
Kota Parabumulih	74,40	74,55
Kota Pagaralam	68,44	68,31
Kota Lubuk Linggau	74,81	74,78
Indonesia (Nasional)	71,92	71,94

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palembang Tahun 2020 sebesar 78,33 dengan kategori IPM **Tinggi**, nilai capaian ini melebihi capaian IPM Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan melebihi capaian IPM Provinsi Sumatera Selatan sebesar 70,01 serta capaian IPM Indonesia (nasional) sebesar 71,94. Angka ini menurun sekitar 0,11 dibanding capaian Tahun 2019 78,44. Status ini menggambarkan level pencapaian pembangunan manusia periode tertentu. Penurunan pertumbuhan IPM Tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh turunnya rata-rata pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Indikator ini turun dari Rp. 15.087.000 pada Tahun 2019 menjadi Rp. 14.679.000 pada Tahun 2020.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia berdasarkan empat indikator yaitu :

Tabel 3.14
Indeks Pembangunan Manusia di Kota Palembang, 2019-2020

Variabel		Tahun	
		2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,54	70,79
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,40	14,41
3	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	10,52	10,53
4	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah/ Orang/Tahun)	15.087	14.679

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2021



a. Umur Harapan Hidup Saat Lahir

Tabel 3.15
Umur Harapan Hidup Sehat Saat Lahir (UHH)
Tahun 2019-2020

Provinsi/ Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Sumatera Selatan	69,65	69,88
Palembang	70,54	70,79
Indonesia (nasional)	71,34	71,47

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2021

Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH ini berguna untuk mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Berdasarkan tabel di atas angka harapan hidup di Kota Palembang pada Tahun 2020 sebesar 70,79 tahun artinya secara rata-rata bayi yang baru lahir pada Tahun 2020 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan 70,79 tahun.

- ❖ Adapun Faktor-faktor/ hambatan dimensi umur panjang dan hidup sehat dapat kita lihat dari data yang terdapat pada Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang yaitu pada tabel Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Kota Palembang dengan sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat sebagai berikut :

Tabel 3.16
Cakupan Indikator SPM Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2020

Jenis Pelayanan Dasar dan Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal				
	Indikator		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
Pelayanan Kesehatan Dasar	1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	89,77	89,80
	2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	91,55	91,55
	3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru	100	95,94	95,9



		Lahir			
	4	Pelayanan Kesehatan Balita	100	48,94	48,94
	5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100	99,38	99,38
	6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	100	39,9	39,9
	7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100	56,18	56,18
	8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	57,24	57,24
	9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	100	96,40	96,40
	10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (OGDJ) Berat	100	97,36	97,36
	11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB)	100	47,36	47,36
	12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	100	80,92	80,92

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Cakupan kesehatan ibu hamil adalah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Target kinerja tahun 2020 adalah 100%, dengan jumlah sasaran ibu hamil 26.989 dengan hasil realisasi 24.229 ibu hamil atau sebesar 89,77%. Realisasi dari indikator kesehatan ibu hamil ini tidak mencapai target pada tahun 2020 dikarenakan kurangnya pemanfaatan fasilitas kesehatan, banyaknya BPM (Bidan Praktik Mandiri) / klinik yang tutup sementara selama pandemi COVID-19, dan banyaknya ibu hamil yang melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan di luar wilayah BPM/ klinik/ rumah sakit mengakibatkan data tidak didapat oleh petugas kesehatan. Untuk itu,



perlunya koordinasi / kerjasama dengan jejaring di wilayah kerja (fasyankes lain) dalam pelayanan dan pelaporan dan juga pentingnya penjelasan kepada pemegang program sehingga penerapan SPM dapat berjalan baik. Rencana tindak lanjut lainnya dengan membuat *whatsapp grup* ibu hamil dan ibu nifas, perlunya sosialisasi pelayanan ANC/ Antenatal Care (pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil secara optimal, hingga mampu menghadapi masa persalinan, nifas, persiapan pemebrian ASI secara eksklusif serta kembalinya kesehatan alat reproduksi dengan wajar) sesuai protokol COVID-19 kepada kader dan lintas sektor, kemudian meminta bantuan kader, tokoh masyarakat dan lintas sektor untuk pemeriksaan kehamilan di puskesmas sudah sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19, berkoordinasi dengan BPM, kader terkait pelayanan ibu hamil dan data bumil baru, selanjutnya menjalin kerjasama dengan BPM, klinik dan RS baik di wilayah kerja maupun wilayah kerja maupun wilayah kerja terkait data pelayanan ibu hamil.

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Target kinerja tahun 2020 sebesar 100%, dengan jumlah sasaran ibu bersalin sebesar 25.762 sasaran. Hasil kinerja menunjukkan bahwa ada 23.584 ibu yang diberikan pelayanan persalinan sesuai standar, artinya ada 91,55% capaian kinerja pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar. Capaian tersebut belum sesuai dengan target dari SPM yaitu 100%. Hal ini dikarenakan banyaknya persalinan di wilayah kerja maupun di luar wilayah (pasien langsung datang ke rumah sakit tanpa surat rujukan) sehingga data tidak bisa diperoleh. Adanya BPM / klinik yang tutup sementara selama pandemi COVID-19 untuk pelayanan persalinan sehingga ada yang bersalin di BPM di luar wilayah



akibatnya data tidak dapat diperoleh. Sebagai tindak lanjut diperlukan kerjasama atau melakukan koordinasi dengan BPM/ Rumah Sakit/ Klinik baik di wilayah kerja maupun di luar wilayah terkait data persalinan, melakukan koordinasi dengan bidan koordinator/ penanggungjawab di puskesmas lainnya terkait data pelayanan ibu hamil dan bersalin, dan bekerja sama dengan kader kesehatan untuk data ibu bersalin di wilayah kerja.

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Target kinerja tahun 2020 sebesar 100%, jumlah sasaran 24.536 bayi lahir. Hasil kinerja menunjukkan bahwa ada 23.539 bayi baru lahir yang mendapatkan sasaran atau sebesar 95,9% realisasi dari target 100% pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang diberikan sesuai standar. Target tahun 2020 terjadi penurunan dari tahun 2019 hal ini karena adanya kasus kematian neonatal, terjadinya komplikasi neonatal atau neonatal berisiko yang tidak mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar, ibu bayi tidak membawa bayi ke Faskes karena merasa belum ada keluhan, beberapa BPS tidak melayani persalinan/ pelayanan kesehatan sehingga banyak penduduk neonatal ke fasilitas lain di luar wilayah sehingga data tidak didapatkan, ibu bayi meninggal sehingga bayi tidak IMD, dan terjadi kematian neonatus setelah 2 (dua) jam. Sebagai langkah tindak lanjutnya diperlukan koordinasi dengan kader, dan memonitor kondisi bayi yang dirawat di rumah sakit, koordinasi dengan rumah sakit atau BPS dari jejaring lain.

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat” dengan indikator persentase pelayanan kesehatan balita, dengan realisasi kinerja yang masih jauh dari target yaitu 48,94%. Indikator persentase pelayanan kesehatan balita



dengan sasaran 96.981 balita dengan realisasi 47.461 balita (48,94%) artinya target pada indikator ini belum tercapai, dikarenakan tutupnya pelayanan posyandu selama pandemi COVID-19, jumlah sasaran balita terlalu besar, alamat balita yang domisilinya berpindah – pindah (mengkontrak) sehingga sulit untuk melacaknya, orang tua balita juga takut membawa anaknya ke fasilitas kesehatan, dan banyaknya anak balita yang sudah lewat dari 1 tahun jarang dibawa ke puskesmas. Rencana tindak lanjut dari permasalahan ini adalah melakukan koordinasi dengan kader untuk datang ke rumah balita dan melakukan pelayanan balita, membuat grup WA antara petugas dan orang tua balita, dan berkoordinasi dengan petugas program gizi dan program imunisasi dalam pelayanan balita. Indikator Kinerja Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita adalah anak balita (12-59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Pemantauan pertumbuhan merupakan salah satu kegiatan yang terdiri dari penimbangan anak setiap bulan, pencatatan dan pengisian Kartu Menuju Sehat, penilaian naik atau tidak naik yang bertujuan melakukan deteksi dini gangguan pertumbuhan dan melakukan tindak lanjut hasil pemantauan pertumbuhan.

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator kinerja persentase kesehatan pada usia pendidikan dasar tahun 2020 sebesar 99,38%. Persentase dari indikator ini belum mencapai target dikarenakan puskesmas belum semua merencanakan skrining dan pemeriksaan berkala di setiap sekolah tahun ajaran 2020 yang mengacu pada Permenkes No. 43 Tahun 2016, ini juga karena terjadinya pandemi COVID-19 yang menyulitkan untuk melakukan pemeriksaan berkala di sekolah.

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif



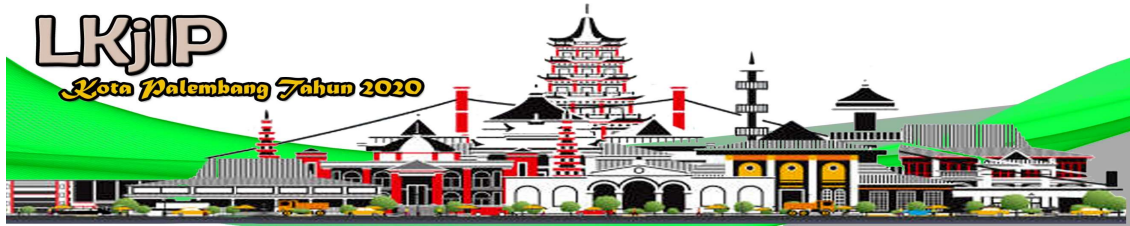
Indikator Kinerja persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif adalah capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal ini Seksi Penyakit Tidak Menular (PTM) dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan warga negara berusia usia 15–59 tahun dinilai dari persentase pengunjung usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun meliputi : (1) Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkar perut; (2) Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer; (3) Deteksi kemungkinan diabetes melitus menggunakan tes cepat gula darah; (4) Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku; (5) Pemeriksaan ketajaman penglihatan; (6) Pemeriksaan ketajaman pendengaran; (7) Deteksi dini kanker dilakukan melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30–59 tahun. Realisasi kinerja tahun 2020 hanya tercapai 39,9% dari target 100%, hal ini dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan skrining PTM (Penyakit Tidak Menular) di dalam dan luar gedung dimasa pandemi COVID-19, selanjutnya bahan habis pakai yang digunakan belum mencukupi, belum optimalnya data *real by name by address* di puskesmas, sering bergantinya pengelola program yang sudah dilatih dan di-monev, belum optimalnya promosi deteksi dini pada usia produktif sehingga deteksi dini masih rendah, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini PTM. Sebagai bentuk tindak lanjut dari Dinas Kesehatan untuk tetap melakukan pelayanan terpadu PTM integrasi di puskesmas melalui dana BOK dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19, mengajukan usulan kebutuhan bahan habis pakai ke bagian SDK berdasarkan kebutuhan sesuai data yang



ada, koordinasi dengan Bidang Yankes untuk sinkronisasi sasaran dengan data PIS-PK puskesmas, meningkatkan kerjasama secara integrasi antar program di puskesmas, meningkatkan kerja sama dengan lintas sektor, *on job training* petugas yang diganti melalui dana mandiri puskesmas, serta meningkatkan promosi kesehatan agar masyarakat sadar akan pentingnya deteksi dini PTM.

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

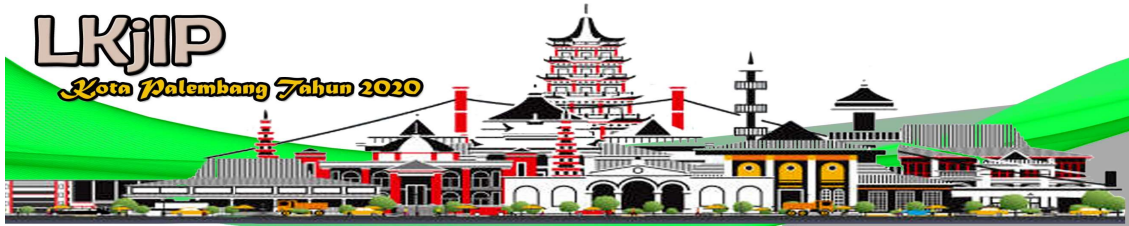
Kebijakan Kementerian Kesehatan dalam pelayanan kesehatan lanjut usia bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan lanjut usia yang berkualitas melalui penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang ramah bagi lanjut usia untuk mencapai lanjut usia yang berdayaguna bagi keluarga dan masyarakat. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan skrining kesehatan pada warga negara usia 60 tahun keatas dinilai dari persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 (satu) kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Indikator capaian dari pelayanan kesehatan usia lanjut tahun 2020 ini belum mencapai target 100% tetapi hanya sebesar 56,18%, hal ini terjadi dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19, banyak dari posyandu yang belum buka sehingga berpengaruh terhadap capaian program, kemudian sebagian besar lansia lebih memilih berobat ke Rumah Sakit atau Balai Pengobatan terutama yang memiliki ekonomi menengah ke atas, sementara sebagian lansia memilih membeli obat sendiri dibandingkan ke puskesmas disebabkan adanya pandemi COVID-19. Belum optimalnya kerja sama integrasi antar program di puskesmas, serta bahan habis pakai yang digunakan belum mencukupi pemahaman petugas terhadap pelayanan yang sesuai standar untuk kesehatan usia lanjut. Tindak lanjut dari kendala tersebut adalah



dengan tetap melakukan pelayanan kesehatan usia lanjut dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19, kemudian berkoordinasi dengan Rumah Sakit atau Balai Pengobatan untuk tindak lanjut pelayanan usia lanjut, meningkatkan kerjasama secara integrasi antar program di puskesmas dan mengajukan usulan kebutuhan bahan habis pakai ke bagian SDK (Sumber Daya Kesehatan) berdasarkan kebutuhan sesuai dengan data yang ada.

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Indikator persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi terlihat realisasinya hanya 57,24% atau sebesar 146.220 sasaran, dari target sasaran 255.449. Hal ini dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan skrining PTM di luar gedung di masa pandemi COVID-19, kemudian bahan habis pakai yang digunakan belum mencukupi dan belum optimalnya integrasi antar program puskesmas, kurang optimalnya kerja sama integrasi antar program di puskesmas, kurang optimalnya promosi deteksi dini penyakit hipertensi sehingga kunjungan penderita hipertensi masih rendah, dan kurang optimalnya kerja sama dengan fasilitas kesehatan yang ada di wilayah kerja puskesmas sehingga data penderita yang dilayani di klinik tidak tercatat di puskesmas. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu tetap melakukan pelayanan terpadu PTM integrasi di puskesmas melalui dana BOK dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19, mengajukan usulan kebutuhan bahan habis pakai ke bagian SDK berdasarkan kebutuhan sesuai dengan data yang ada, meningkatkan kerja sama secara integrasi antar program di puskesmas, selanjutnya koordinasi dengan Bidang Kesehatan Masyarakat untuk penugasan tenaga promosi kesehatan yang sudah di rekrut untuk mempromosikan deteksi



dini penyakit hipertensi, dan mengintruksikan kepada kepala puskesmas untuk melakukan kerja sama dengan fasilitas kesehatan di wilayah kerja puskesmas.

Standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi :

1. Pengukuran tekanan darah;
2. Edukasi, dengan mekanisme pelayanan :
 - a. Penetapan sasaran penderita hipertensi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang di tetapkan oleh Menteri Kesehatan;
 - b. Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi :
 - 1) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat;
 - 3) Melakukan rujukan jika diperlukan

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

Indikator persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus realisasinya sebesar 96,40% dari target SPM sebesar 100%. Tahun 2020 target SPM Pelayanan Kesehatan Penderita DM tidak tercapai dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan skrining PTM di luar gedung dimasa pandemi COVID-19, kemudian, bahan habis pakai yang digunakan untuk kegiatan skrining belum



mencukupi, belum optimalnya data *real by name by address* di puskesmas, kurang optimalnya kerja sama integrasi antar program di puskesmas, kurang optimalnya promosi deteksi dini penyakit hipertensi sehingga kunjungan penderita DM masih rendah, dan kurang optimalnya kerja sama dengan fasilitas kesehatan yang ada di wilayah kerja puskesmas sehingga data penderita yang dilayani di klinik tidak tercatat di puskesmas. Untuk menindaklanjuti kendala tersebut, perlunya melakukan pelayanan terpadu PTM integrasi di puskesmas melalui dana BOK dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19, mengajukan usulan kebutuhan bahan habis pakai ke bagian SDK berdasarkan kebutuhan sesuai dengan data yang ada, kemudian koordinasi dengan Bidang Yankes untuk sinkronisasi sasaran dengan data PIS-PK puskesmas, meningkatkan kerja sama secara integrasi antar program di puskesmas, *on job training* petugas yang diganti melalui dana mandiri puskesmas, dan mengintruksikan kepada kepala puskesmas untuk melakukan kerja sama dengan fasilitas kesehatan di wilayah kerja puskesmas. Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan kesehatan mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi; a) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan, b) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi, c) Melakukan rujukan jika diperlukan. Gula darah sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl ditambahkan pelayanan terapi farmakologi.



10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Indikator persentase pelayanan kesehatan penderita ODGJ berat terlihat realisasinya belum mencapai target 100%. Realisasi capaiannya 97,36%. Hal ini dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19 yang menyebabkan keterlambatan dalam sosialisasi, skrining dan pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat, kebutuhan obat untuk orang dengan gangguan jiwa berat tidak terpenuhi dengan maksimal, untuk itu pentingnya perencanaan yang tepat dalam memenuhi kebutuhan obat, sumber daya/tenaga kesehatan yang belum terlatih, belum optimalnya Program Rujuk Balik (PRB), untuk itu pentingnya berkoordinasi dengan BPJS untuk menjalankan program PRB, dan kurangnya dukungan keluarga dan peran serta masyarakat dalam kesembuhan pasien ODGJ unterlunya pembentukan dan pembinaan kader keswa yang akan membantu tenaga kesehatan di lapangan. Pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

11. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB)

Setiap orang terduga Tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga tuberkulosis (TB) di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi : 1) Pemeriksaan klinis; 2) Pemeriksaan penunjang; 3) Edukasi. Mekanisme pelayanannya yaitu : 1) Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang yang kontak erat dengan penderita TB dan di tetapkan oleh Kepala Daerah; 2) Pemeriksaan klinis, pelayanan



pemeriksaan klinis terduga TB dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda; 3) Pemeriksaan penunjang, adalah pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis; 4) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan; 5) Melakukan rujukan jika diperlukan. Indikator persentase pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberkulosis (TB) terlihat realisasinya sangat rendah yaitu sebesar 43,76%, hal ini terjadi karena beberapa faktor terkait pandemi COVID-19 sejak Maret 2020. Kekhawatiran terduga TBC (sasaran) untuk ke fasilitas kesehatan mengingat gejala TBC mirip dengan COVID-19 sehingga takut dinyatakan COVID-19 atau takut tertular COVID-19, adanya kebijakan untuk membatasi kegiatan skrining baik di puskesmas maupun di luar puskesmas untuk penjangkaran di masyarakat ataupun di tempat khusus, akibatnya kegiatan skiring terduga TBC sulit untuk dilakukan.

12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

Pemeriksaan HIV ditawarkan secara aktif oleh petugas kesehatan bagi orang yang berisiko dimulai dengan; (1) pemberian informasi terkait HIV-AIDS, (2) pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes sesuai standar nasional yang telah ditetapkan, (3) orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif harus dirujuk ke fasilitas yang mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan ARV dan konseling tentang HIV dan AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan pasangannya, (4) orang dengan infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna narkoba, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan dengan hasil pemeriksaan HIV negatif harus dilakukan pemeriksaan ulang minimal setelah tiga bulan, enam bulan, dan dua belas bulan dari pemeriksaan yang pertama. Indikator persentase pelayanan



kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV terlihat realisasinya belum mencapai target 100%, yaitu 80,92%. Penurunan capaian ini dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19 pada bulan Maret 2020, hal ini menyebabkan jumlah kunjungan pasien ke rumah sakit dan puskesmas berkurang sehingga berdampak pada menurunnya jumlah skrining HIV pada ibu hamil, pasien TB dan IMS (Infeksi Menular Seksual). Kegiatan mobile VCT program HIV tidak berjalan dari bulan April sampai Juli karena pandemi COVID-19 sehingga menurunnya jumlah skrining HIV pada populasi kunci yaitu : LSL (Lelaki Suka Lelaki, WPS (Wanita Pekerja Seks), TG (Transgender) dan Penasun (Pengguna Napza Suntik).

2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Tabel 3.17
Harapan Lama Sekolah (Tahun), 2019-2020

Provinsi/ Kota	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Sumatera Selatan	12,39	12,45
Palembang	14,40	14,41
Indonesia (nasional)	12,95	12,98

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2021

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang. Angka harapan lama sekolah menunjukkan peluang anak usia 7 (tujuh) tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Harapan lama sekolah Kota Palembang pada Tahun 2020 sebesar 14,41 tahun artinya secara rata-rata anak usia 7 (tujuh)



tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada Tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,41 tahun atau setara dengan Diploma III.

3. Rata-Rata Lama Sekolah

Tabel 3.18
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun), 2019-2020

Provinsi/ Kota	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Sumatera Selatan	8,18	8,24
Palembang	10,52	10,53
Indonesia (nasional)	8,34	8,48

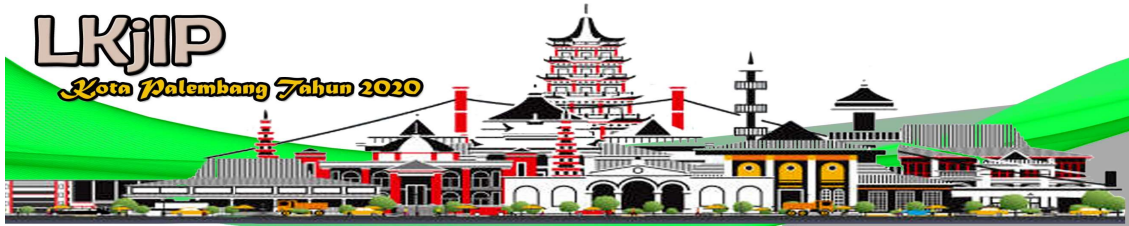
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2021

Rata-rata lama sekolah merupakan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Cakupan penduduk yang dihitung dalam perhitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Berdasarkan tabel di atas rata-rata lama sekolah Kota Palembang pada Tahun 2020 sebesar 10,53 tahun artinya secara rata-rata penduduk Kota Palembang yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,53 tahun atau hampir menamatkan kelas XI (sebelas).

❖ Adapun Faktor-faktor pendukung Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah dapat kita lihat dari data yang terdapat pada Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kota Palembang, yaitu sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

Angka Partisipasi kasar merupakan angka keterlibatan masyarakat Kota Palembang dan sekitarnya dalam pendidikan di jenjang SD/MI/Paket A yang ada di Kota Palembang. Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2020 = 100,36 %.



Dimana target yang ditetapkan = 113,50% dan realisasi pada tahun 2020 = 113,91% . Angka ini diperoleh dari pembagian jumlah siswa SD/MI/Paket A tahun 2020 yakni 194.700 orang dibagi jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun yaitu 170.926 orang dan dikalikan 100. Artinya persentase capaian kinerja sebesar 100,36% dinilai sangat memuaskan, hal ini tidak terlepas dari adanya kebijakan program pengembangan kapasitas penerapan standar pelayanan minimal (PKP SPM) Pendidikan Dasar yang dikeluarkan Pemkot Palembang serta Pemerintah Provinsi yang dikenal dengan Program Sekolah Gratis (PSG) Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Bantuan Siswa Berprestasi, dengan dana sharing PSG serta bantuan rutin dari Pemerintah Kota Palembang. Untuk jenjang pendidikan SD/MI/Paket A ini sampai saat ini belum ada bantuan dari Pemerintah pusat, karena pemerintah pusat masih mengutamakan pendidikan dasar. Dengan demikian semua S D/MI/Paket A yang ada di Kota Palembang hanya mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi yang jumlahnya juga masih sangat terbatas.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B

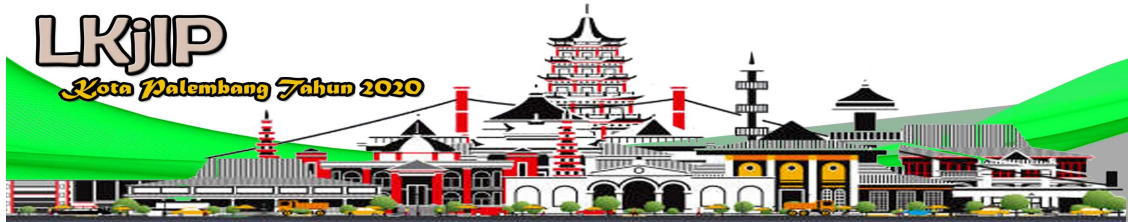
Sebagaimana di jenjang SD/MI Angka Partisipasi Kasar merupakan angka keterlibatan masyarakat Kota Palembang dan sekitarnya dalam pendidikan di jenjang SMP/MTs/Paket B yang ada di Kota Palembang. Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2020 sebesar 103,91%. Angka ini diperoleh dari pembagian jumlah siswa SMP/MTs/Paket B tahun 2020 yakni 85.046 orang dibagi jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun yaitu 71.355 orang dan dikalikan 100. Artinya apa yang menjadi target Dinas Pendidikan Kota Palembang pada tahun 2020 sudah pada pencapaian maksimal. Keberhasilan pencapaian maksimal target ini juga tidak terlepas dari adanya perhatian dan bantuan dari Pemerintah



Pusat yang dikenal dengan Program BOS untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B, serta perhatian dan bantuan pemerintah Provinsi seperti Progran Sekolah Gratis (PSG), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan perhatian serta bantuan Pemerintah Kota Palembang dengan dana sharing PSG dan Bantuan Dana Rutin untuk operasioal sekolah. Hal ini sangat mendukung terlaksananya pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun di Kota Palembang meskipun kisarannya masih diharapkan dapat bertambah sesuai kebutuhan riil sekolah.

3. Angka Partrisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Angka partisipasi murni merupakan angka keterlibatan masyarakat Kota Palembang dalam pendidikan di jenjang SD/MI yang ada di Kota Palembang. Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2020 sebesar = 100,02%. Angka ini diperoleh dari pembagian jumlah siswa SD/MI/Paket A usia 7-12 tahun yakni 170.550 orang dibagi jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun yaitu 170.926 orang dan dikalikan 100. Artinya apa yang menjadi target Dinas Pendidikan Kota Palembang pada tahun 2020 sudah pada tahap pencapaian maksimal. Keberhasilan pencapaian maksimal target ini sama seperti APK yakni tidak terlepas dari adanya perhatian dan bantuan dari Pemerintah Pusat yang dikenal dengan Program BOS untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs/SMP-T, perhatian dan bantuan pemerintah Provinsi seperti Program Sekolah Gratis (PSG), dan perhatian serta bantuan Pemerintah Kota Palembang dengan dana sharing PSG dan dengan Bantuan Dana Rutin. Hal ini sangat mendukung terlaksananya pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun di Kota palembang dapat terlaksana dengan baik. Salah satu indikator keberhasilan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ini adalah meningkatnya Angka Partisifasi Kasar SD/MI di setiap tahunnya.



4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Angka Partisipasi Murni merupakan angka keterlibatan masyarakat Kota Palembang dalam pendidikan di jenjang SMP/MTs/Paket B yang ada di Kota Palembang. Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2020 sebesar = 100,04%, dimana target yang ditetapkan sebesar = 99,76% sedangkan realisasinya mencapai = 99,80%. Angka ini diperoleh dari pembagian jumlah siswa SMP/MTs/Paket B usia 13-15 tahun yakni 71.215 orang dibagi jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun yaitu 71.355 orang dan dikalikan 100. Dengan hasil ini berarti apa yang menjadi target Dinas Pendidikan Kota Palembang pada tahun 2020 cukup memuaskan. Sama seperti pada APK SMP/MTs/Paket B bahwa keberhasilan pencapaian target ini juga tidak terlepas dari adanya perhatian dan bantuan dari Pemerintah Pusat yang dikenal dengan Program BOS untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B, perhatian dan bantuan pemerintah Provinsi seperti Program Sekolah Gratis (PSG), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan perhatian serta bantuan Pemerintah Kota Palembang dengan dana sharing PSG serta dengan Bantuan Dana Rutin untuk operasional sekolah. Hal ini sangat mendukung tercapainya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B Kota Palembang.

5. Angka Putus Sekolah SD/MI

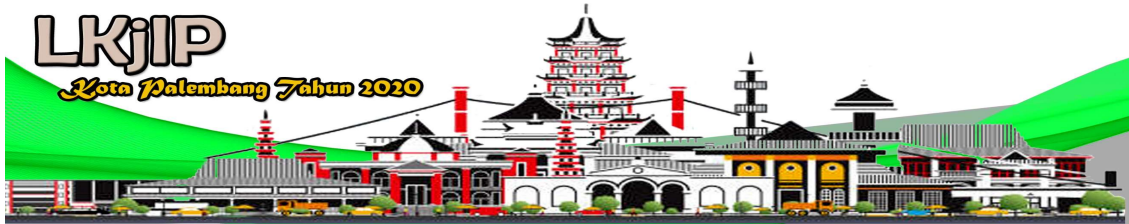
Program Angka Putus Sekolah adalah program yang bertujuan menurunkan angka putus sekolah di Kota Palembang dengan upaya mengantisipasi jangan sampai siswa-siswa yang bermasalah terutama masalah biaya tidak dapat bersekolah karena terbentur biaya. Target yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Palembang pada tahun 2020 sebesar 0,19% terealisasi sebesar 0,18%. Dengan demikian pada indikator Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A ini Dinas



Pendidikan Kota Palembang pada tahun 2020 dapat mencapai kinerja sebesar 104,58%. Angka ini diperoleh dari pembagian antara jumlah siswa SD/MI/Paket A yang putus sekolah yakni 353 orang dibagi jumlah siswa pada tahun ajaran sebelumnya 194.700 orang dan dikalikan 100. Hal ini tidak terlepas dari program bantuan BOS membebaskan segala pungutan kepada semua siswa bagi semua sekolah SD/MI/Paket A Negeri dan bagi sekolah Swasta meringankan biaya pada semua wali murid dan membebaskan biaya bagi siswa miskin. Dengan program ini diharapkan semua siswa usia sekolah dapat bersekolah dengan tidak adanya pungutan dari sekolah. Selain program BOS Dinas Pendidikan Kota Palembang memiliki program kelas khusus yakni merekrut siswa-siswa yang putus sekolah untuk diajari di tempat tertentu dengan fasilitas yang telah disediakan sehingga anak-anak tersebut dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya. Ada juga program Kejar Paket yang dilaksanakan oleh Bidang Pendidikan Non Formal.

6. Angka Putus Sekolah SMP/MTs

Seperti halnya Program Angka Putus Sekolah SD program ini bertujuan menurunkan angka putus sekolah SMP/MTs/Paket B di Kota Palembang dengan upaya mengantisipasi jangan sampai siswa-siswa yang bermasalah terutama masalah biaya tidak dapat bersekolah karena terbentur biaya. Realisasi capaian pada indikator ini adalah sebesar 0,10%. Angka ini diperoleh dari pembagian antara jumlah siswa SMP/MTs/Paket B yang putus sekolah yakni 85 orang dibagi jumlah siswa pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 85.046 orang dan dikalikan 100. Sehubungan dengan masalah ini maka sekolah dengan program bantuan BOS membebaskan segala pungutan kepada semua siswa bagi semua sekolah SMP/MTs/Paket B Negeri dan bagi sekolah Swasta



meringankan biaya pada semua wali murid dan membebaskan biaya bagi siswa miskin. Dengan program ini diharapkan semua siswa usia sekolah dapat bersekolah dengan tidak adanya pungutan dari sekolah. Selain program BOS Dinas Pendidikan Kota Palembang memiliki program Kejar Paket B yang dilaksanakan oleh Bidang Pendidikan Non Formal. Gencarnya program pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pendidikan Kota Palembang dalam melaksanakan program Wajib belajar 9 tahun melalui kejar paket B dan ujian Persamaan yang dilakukan di Kota Palembang, hal ini meningkatkan kesadaran masyarakat untuk sekolah minimal sampai jenjang SMP.

7. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Angka melanjutkan (AM) SMP/MTs tahun 2020 adalah perbandingan antara siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs yakni sejumlah 28.495 siswa dibagi dengan jumlah lulusan pada jenjang SD/MI/Paket A pada tahun ajaran sebelumnya yakni sebanyak 29.767 orang dan dikalikan 100. Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs ini pada tahun 2020 Dinas Pendidikan Kota Palembang dapat mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar 95,73% dimana target yang ditetapkan sebesar 95,60% dengan capaian sebesar 100,13%.

8. Angka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini adalah kondisi yang menggambarkan jumlah anak usia 4-6 tahun yang telah memperoleh pendidikan. Pada indikator Pendidikan Anak Usia Dini ini Dinas Pendidikan Kota Palembang pada tahun 2020 mencapai target 38,16% dimana target yang ditetapkan sebesar 52,68% dapat tercapai sebesar 72,45%. Angka ini diperoleh dari pembagian antara jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak yakni sebanyak 32.120 orang dibagi



dengan jumlah anak usia 4-6 tahun yakni sebanyak 84.161 orang. Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari semakin tingginya animo dan perhatian masyarakat

kota Palembang akan pentingkan pendidikan anak usia dini yakni TK-PAUDNI di Kota Palembang. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya bermunculan PAUD dan TK di hampir setiap kecamatan yang ada di Kota Palembang.

9. Angka Kelulusan SD/MI

Angka kelulusan adalah perbandingan antara siswa yang mengikuti ujian dengan siswa yang berhasil lulus. Pada tahun 2020 persentase kelulusan SD/MI di Kota Palembang mencapai =100% dimana target yang ditetapkan sebesar = 100% dan terealisasi sebesar = 100%. Angka ini diperoleh dari pembagian antara jumlah lulusan pada jenjang SD/MI/paket A yakni sejumlah 29.767 orang dibagi dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI/paket A pada tahun sebelumnya yakni sebanyak 29.767 orang dan dikalikan dengan 100. Keberhasilan pencapaian program ini tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan wajib belajar 9 tahun yang digulirkan pemerintah, kemudian adanya Program BOS, PSG, yang sangat membantu masyarakat untuk mengikuti kegiatan pendidikan di Kota Palembang.

10. Angka Kelulusan SMP/MTs

Angka kelulusan adalah perbandingan antara siswa yang mengikuti ujian dengan siswa yang berhasil lulus. Pada tahun 2020 persentase kelulusan SMP/MTs/Paket B di Kota Palembang mencapai = 100% dimana target yang ditetapkan sebesar = 100% dengan realisasi sebesar = 100%. Angka ini diperoleh dari pembagian antara jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs/Paket B yakni sejumlah 24.087 orang dibagi dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada



jenjang SMP/MTs/Paket B pada tahun sebelumnya yakni 24.087 orang dan dikalikan dengan 100. Keberhasilan pencapaian program ini tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan wajib belajar 9 tahun yang digulirkan pemerintah, kemudian adanya Program BOS, PSG, yang sangat membantu masyarakat untuk mengikuti kegiatan pendidikan di Kota Palembang.

4. Pengeluaran Perkapita

Tabel 3.19
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah/Orang/Tahun), 2019-2020

Provinsi/ Kota	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah/Orang/Tahun)	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Sumatera Selatan	10.937	10.652
Palembang	15.087	14.679
Indonesia (nasional)	11.299	11.013

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2021

Pengeluaran Perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Pengeluaran perkapita Kota Palembang Tahun 2020 sebesar Rp. 14.679.000 artinya secara rata-rata pengeluaran penduduk Kota Palembang selama setahun adalah Rp. 14.679.000.

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja dan Masyarakat

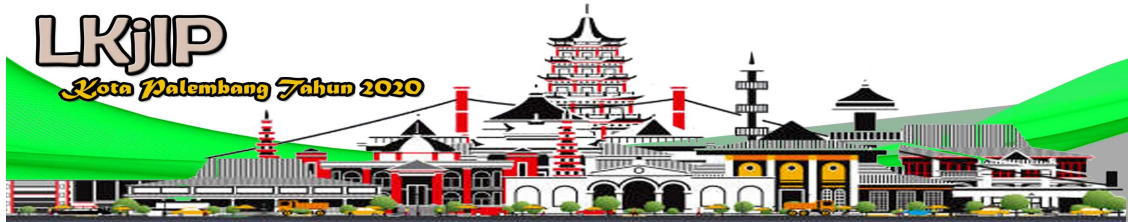
Sasaran strategis 4 ini merupakan salah satu upaya mencapai **misi kedua** sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2018-2023, yaitu **"Mewujudkan masyarakat**



yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional" dan juga untuk mencapai tujuan: **"Peningkatan daya Saing dan Kualitas Sumber Daya Manusia"**. Sasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang dan hasil pendataan diolah oleh Badan Pusat Statistik Kota Palembang. Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya daya saing angkatan kerja dan masyarakat sebesar 82,8%, capaian ini menurun 18,4 poin apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 101,2%. Di bawah ini penjelasan tabel capaian kinerja sasaran meningkatnya daya saing angkatan kerja dan masyarakat :

Tabel 3.20
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja dan Masyarakat Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,00	7,94	88	6,80	9,86	68,96	6,20
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,35	1,18	114,41	1,32	1,38	95,65	1,25
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					101,2			82,8	



1. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran didefinisikan sebagai penduduk yang sedang mencari kerja atau mempersiapkan usaha dan penduduk yang tidak sedang mencari kerja atau tidak mempersiapkan usaha karena sudah putus asa untuk mendapatkan pekerjaan atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Analisis pengangguran ini didekati dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu perbandingan jumlah orang yang menganggur terhadap total angkatan kerja dan Tingkat Setengah Penganggur (TSP).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka juga merefleksikan kemampuan ekonomi pasar kerja yang belum bisa menciptakan pekerjaan bagi mereka yang ingin bekerja tapi tidak mendapatkannya.

Tabel 3.21
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan
Agustus 2019 - 2020

Kabupaten/ Kota	Agustus 2019	Agustus 2020
Ogan Komering Ulu	4,58	6,01
Ogan Komering Ilir	2,98	3,29
Muara Enim	4,84	4,90
Lahat	3,68	4,18
Musi Rawas	2,93	3,29
Musi Banyuasin	4,15	4,79
Banyuasin	3,94	4,73
Ogan Komering Ulu Timur	2,99	3,28
Ogan Komering Ulu Selatan	3,46	3,81



Ogan Ilir	3,29	4,91
Empat Lawang	2,66	3,61
PALI	4,14	3,74
Musi Rawas Utara	3,81	6,88
Palembang	8,01	9,86
Prabumulih	6,12	6,64
Pagaralam	2,48	2,50
Lubuk Linggau	4,71	7,41
SUMATERA SELATAN	4,53	5,51

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 (Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2020 Prov SUMSEL)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Palembang lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota Lain di provinsi Sumatera Selatan. Tentu saja ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kota Palembang.

Berikut ini capaian indikator kinerja Pemerintah Kota Palembang Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020 :

Tabel 3.22
Capaian Indikator Kinerja Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,00	7,94	88	6,80	9,86	68,96	6,20

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2021

Dari tabel di atas terlihat tingkat pengangguran terbuka Kota Palembang hasil Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) Agustus 2020 adalah sebesar 9,86%, nilai tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 1,92% poin dibandingkan dengan hasil Sakernas Agustus 2019



dengan realisasi sebesar 7,94%. Capaian kinerja indikator tingkat pengangguran terbuka ini sebesar 68,96% dengan kategori Cukup. Bila dibandingkan dengan capaian target kondisi akhir RPJMD masih 3,66% yang perlu ditingkatkan kinerja.

Tabel 3.23
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka	Satuan	Tahun	
		2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Nasional	%	5,28	7,07
Sumatera Selatan	%	4,53	5,51
Palembang	%	7,94	9,86

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional, Agustus 2019-Agustus 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota Palembang melebihi dari tingkat pengangguran Provinsi Sumatera Selatan bahkan nasional. Hal ini menggambarkan bahwa pengangguran masih menjadi permasalahan yang sangat penting untuk terus diperhatikan.

Tabel 3.24
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kota Palembang, 2020

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan Kerja	505.441	333.876	839.317
1. Bekerja	454.847	301.699	756.546
2. Pengangguran Terbuka	50.594	32.177	82.771
II. Bukan Angkatan Kerja	129.701	314.063	443.764
1. Sekolah	49.461	60.367	109.828
2. Mengurus Rumah Tangga	33.077	234.583	267.660
3. Lainnya	47.163	19.113	66.276
Total	635.142	647.939	1.283.081

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase pengangguran terhadap angkatan kerja. Jumlah penganggur Kota Palembang Tahun 2020



sebanyak 82.771 orang terdiri 50.594 orang laki-laki dan 32.177 orang perempuan.

TPT secara keseluruhan sebesar 9,86 persen yang berarti dari 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 10 (sepuluh) orang pengangguran.

Dimana TPT Laki-laki 10,00 dan TPT Perempuan 9,64

Tabel 3.25
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan
Agustus 2019 – 2020

Kabupaten/ Kota	Agustus 2019	Agustus 2020
(1)	(2)	(3)
Ogan Komering Ulu	65,53	70,50
Ogan Komering Ilir	70,96	65,25
Muara Enim	70,21	68,45
Lahat	71,14	71,79
Musi Rawas	71,39	71,80
Musi Banyuasin	66,16	70,61
Banyuasin	63,36	64,10
Ogan Komering Ulu Timur	76,82	71,47
Ogan Komering Ulu Selatan	66,84	71,70
Ogan Ilir	72,61	70,02
Empat Lawang	71,72	75,89
PAL	73,49	77,70
Musi Rawas Utara	70,39	71,87
Palembang	60,97	65,41
Prabumulih	69,30	69,40
Pagaralam	69,26	66,35
Lubuk Linggau	70,65	70,25
SUMATERA SELATAN	67,67	68,65

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 (Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2020 Prov SUMSEL)



Tabel 3.26

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan Jenis Kegiatan di Kota Palembang, 2020

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah	Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
≤ SD	172.472	11.463	183.935	93,77	104.962	288.897	63,67
SMP	110.052	9.201	119.253	92,28	117.383	236.636	50,40
SMA	325.665	49.456	375.121	86,82	176.235	551.356	68,04
Perguruan Tinggi	148.357	12.651	161.008	92,14	45.184	206.192	78,09
Total	756.546	82.771	839.317	90,14	443.764	1.283.081	65,41

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa persentase tingkat partisipasi angkatan kerja 65,41 persen. Terlihat pada angkatan kerja bahwa pengangguran didominasi tamatan pendidikan SMA sebesar 49.446 orang. Dihubungkan dengan tingkat pendidikan terlihat bahwa TPT SD 6,2; TPT SMP 7,71; TPT SMA 13,18 dan TPT Perguruan tinggi 7,86. TPT rendah pada penduduk tidak/ belum tamat sekolah sedangkan TPT tertinggi pada penduduk yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas. Dengan demikian dapat dikatakan sebagian besar penganggur di Kota Palembang merupakan pengangguran terdidik. Perbandingan jumlah penganggur berpendidikan SLTA ke atas terhadap jumlah angkatan kerja pada kelompok tersebut dinamakan Tingkat Pengangguran Terdidik (TPTd). Dari penghitungan diperoleh TPTd Kota Palembang sebesar 9,86 persen, yang berarti dari 100 orang angkatan kerja yang berpendidikan SLTA ke atas secara rata-rata terdapat 9 sampai 10 orang yang menganggur.



❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target terhadap indikator tingkat pengangguran terbuka ini :**

1. Adanya pandemi covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia pada bulan Maret 2020 sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran karena dampak covid-19. Tidak hanya pengangguran penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi covid-19. Penduduk usia kerja ini dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu a) penganggur; b) bukan angkatan kerja yang pernah berhenti bekerja pada Februari-Agustus 2020; c) penduduk yang bekerja dengan status sementara tidak bekerja; d) penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi covid-19 yang dirasakan oleh mereka yangsaat ini masih bekerja sedangkan kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi covid-19 bagi mereka yang berhenti bekerja;
2. Adanya pandemi covid-19 sehingga Pemerintah Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Social Distancing terhadap kegiatan masyarakat sehingga kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja secara langsung dihentikan sementara sampai dengan batas waktu yang belum bisa ditentukan;
3. Adanya pandemi covid-19 sehingga Pemerintah Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Social Distancing terhadap kegiatan masyarakat sehingga kegiatan Job Fair/ pasar kerja yang biasanya diselenggarakan secara langsung tidak dapat dilaksanakan sama sekali;
4. Masih rendahnya tingkat kesadaran angkatan kerja (pengangguran) untuk membuat kartu pencari kerja (AK-1) dan melaporkan keadaannya baik



sebelum maupun setelah mendapatkan pekerjaan sehingga data angkatan kerja di kota Palembang tidak didapatkan angka yang sebenarnya;

5. Masih kurangnya anggaran peningkatan sumber daya manusia pada Balai Latihan Kerja Kota Palembang sehingga tenaga fungsional instruktur masih sangat terbatas;
6. Masih rendahnya kesadaran pengusaha dalam pelaksanaan peraturan-peraturan dibidang ketenagakerjaan;
7. Tidak seimbangnya lapangan pekerjaan yang tersedia;
8. Banyak pencari kerja dari luar daerah yang mencari pekerjaan di Kota Palembang.

❖ **Solusi/ upaya yang telah dilaksanakan :**

1. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dalam melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja di Kota Palembang;
2. Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang menerapkan sistem informasi dan pelayanan ketenagakerjaan guna penyebaran informasi ketenagakerjaan (lowongan pekerja, dll) dan pelayanan pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) **secara Online** dimana AK-1 bisa diakses dan dicetak kapanpun dan dimanapun;
3. Sebagai solusi tidak diadakannya kegiatan job fair maka Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang menerapkan sistem informasi dan pelayanan ketenagakerjaan secara online dimana dalam sistem ini dirancang untuk mempermudah perusahaan sebagai penerima kerja untuk melakukan perekrutan pegawai kapan saja dan pencari kerja dapat menerima informasi lowongan pekerjaan (online/ daring);



4. Mengajukan proposal berupa dana pendidikan dan pelatihan aparatur fungsional melalui dana APBN yang diperuntukan untuk tenaga fungsional agar dilatih melalui dana Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Kegunaan indikator laju pertumbuhan penduduk ini untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu. Secara umum faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah faktor alami yaitu kelahiran (fertilitas) dan kematian (mortalitas) serta faktor non alami yaitu migrasi (imigrasi dan emigrasi).

Tabel 3.27
Capaian Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Palembang Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,35	1,18	114,41	1,32	1,38	95,65	1,25

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja laju pertumbuhan penduduk Tahun 2020 sebesar 95,65% dari target 1,32% dengan realisasi kinerja 1,38%. Capaian kinerja ini lebih kecil apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2019 sebesar 114,41%. Capaian Kinerja dikategorikan **Baik**. Apabila dibandingkan dengan target kondisi akhir RPJMD maka capaian kinerja sudah 1.25% artinya masih 0,13% lagi capaian terpenuhi.



Laju Pertumbuhan Penduduk, nilai realisasi capaian diperoleh dari jumlah penduduk Kota Palembang pada tahun 2020 sebanyak 1.668.848 jiwa mengalami kenaikan sebesar 5.955 jiwa apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2019 yang berjumlah 1.662.893 jiwa. Yang terdiri dari 837.031 jiwa penduduk laki-laki dan 831.817 jiwa penduduk perempuan. Jika melihat sebaran laju pertumbuhan penduduk pada 18 (delapan belas) kecamatan di wilayah Kota Palembang, Pertambahan jumlah penduduk terbesar terdapat di kecamatan Sematang Borang yaitu sebesar 5,37 %. Kepadatan penduduk tertinggi berada di kecamatan Ilir Timur Satu dan yang terendah di Kecamatan Gandus. Peningkatan Laju pertumbuhan penduduk dikarenakan cukup pesatnya pertumbuhan perumahan di wilayah ini.

Tabel 3.28
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Palembang, 2020

Kecamatan	Penduduk (Jenis Kelamin)		Total Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2018-2020	Kepadatan Penduduk per km ²
	Laki-Laki	Perempuan			
Ilir Barat Dua	34.067	33.547	67.614	0,56	10.870
Gandus	37.596	36.357	73.953	2,60	1.075
Seberang Ulu Satu	46.177	44.989	91.166	1,10	11.010
Kertapati	46.654	45.007	91.661	1,34	2.154
Jakabaring	45.736	44.679	90.415	1,10	9.871
Seberang Ulu Dua	50.544	49.688	100.232	0,83	9.376
Plaju	46.727	46.444	93.171	1,65	6.142
Ilir Barat Satu	70.382	70.563	140.945	1,24	7.129
Bukit Kecil	19.147	19.438	38.585	-1,26	3.890
Ilir Timur Satu	32.232	33.936	66.168	-0,48	10.180
Kemuning	40.087	40.598	80.685	-0,24	8.965
Ilir Timur Dua	42.561	42.899	85.460	-0,04	7.898
Kalidoni	61.450	61.024	122.474	2,07	4.387
Ilir Timur Tiga	36.612	36.398	73.010	-0,04	4.946
Sako	54.846	55.233	110.079	2,91	6.102
Sematang Borang	27.461	26.901	54.362	5,37	1.470
Sukarami	92.132	91.535	183.667	2,82	3.569
Alang-Alang Lebar	52.260	52.581	105.201	1,99	3.042
Palembang	837.031	831.817	1.668.848	1,38	4.166

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2021



Berhasilnya capaian kinerja ini merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang melalui OPD yang bergerak dalam mensukseskan berbagi program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Tabel 3.29
Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Palembang Tahun 2020

No	Bulan	Jenis dan Volume Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang					
		Kelahiran	Perkawinan	Perceraian	Kematian	Jumlah Penduduk	
						Pindah	Datang
1	Januari	3.271	75	15	335	2.015	1.618
2	Februari	2.958	65	8	483	1.702	1.499
3	Maret	2.703	70	14	601	1.277	1.321
4	April	1.623	16	1	250	762	465
5	Mei	1.281	28	2	210	476	528
6	Juni	2.715	26	10	359	1.463	928
7	Juli	2.339	35	6	511	1.515	958
8	Agustus	2.192	42	9	467	1.272	1.034
9	September	2.970	38	8	455	760	1.125
10	Oktober	2.483	89	4	488	353	624
11	November	2.865	89	9	444	763	876
12	Desember	2.721	67	10	487	750	919
TOTAL		30.121	640	96	5.090	13.108	11.895

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas bahwa dapat ditarik kesimpulan faktor yang berpengaruh terhadap laju pertumbuhan penduduk di Kota Palembang sebagai berikut :

a. Angka Kelahiran

Untuk menghitung angka kelahiran dapat menggunakan pembagian jumlah angka kelahiran bayi yang hidup dengan jumlah penduduk dikalikan 1000. Angka kelahiran dapat dihitung dari jumlah kelahiran setiap 1000 penduduk dalam satu tahun. Jadi total angka kelahiran di Kota Palembang Tahun 2020 sebesar 18,05. Hasil ini menunjukkan dari setiap 1.000 penduduk kota terjadi kelahiran sebanyak 18 bayi.



b. Angka Kematian

Angka kematian menunjukkan jumlah kematian tiap 1000 penduduk dalam satu tahun. Angka kematian dihitung dengan jumlah kematian dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kemudian dikalikan 1000. Jadi total angka kematian di Kota Palembang Tahun 2020 sebesar 3,05. Hasil Ini menunjukkan dari setiap 1.000 penduduk kota terjadi kematian sebanyak 3 orang selama Tahun 2020.

c. Pertumbuhan Penduduk Total

Pertumbuhan penduduk total atau pertumbuhan penduduk migrasi menunjukkan besarnya pertumbuhan penduduk suatu wilayah selama satu tahun dengan memperhatikan faktor kelahiran, kematian dan migrasi.

$$Pt = (L-M) + (I-E)$$

Pt = Pertumbuhan penduduk total

L = Angka kelahiran dalam satu tahun

M = Jumlah Kematian dalam satu tahun

I = Jumlah penduduk masuk atau imigrasi

E = Jumlah penduduk keluar atau emigrasi

Jumlah penduduk masuk (I) 7,13 Jiwa dan Jumlah penduduk keluar (E) 7,85 jiwa. Jadi pertumbuhan penduduk total (Pt) = $(18,05+3,05)+(7,13+7,85)$ sebesar 36,53 jiwa dari 1000 jiwa penduduk.

❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja :**

Adapun faktor yang berpengaruh dalam capaian kinerja, upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang dalam capaian strategis :

1. Penurunan laju pertumbuhan penduduk didukung oleh banyaknya Fasilitas Kesehatan/ Klinik KB berjumlah 228 Faskes, yang semuanya mendapat



dukungan alat dan obat kontrasepsi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang, yang siap melayani peserta KB;

2. Program Bangga Kencana juga didukung oleh Kader Keluarga Berencana atau PPKBD sebanyak 107 di Tingkat kelurahan dan /Sub PPKBD berada di tingkat RW/RT di Kota Palembang berjumlah 4.188 sebagai penggerak dan pelaksana Program Keluarga Berencana di lini lapangan. Berke memberikan motivasi serta mengajak PUS untuk ikut program KB serta pemberdayaan Keluarga.
3. Tingginya Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Peserta KB aktif sd. Desember 2020 sebesar 76,93 % atau 231.594 PUS dari jumlah PUS yang ada sebesar 301.040.

Tabel 3.30
Data PUS, Peserta KB Aktif, CPR, Unmet Need Kota Palembang

Tahun	PUS	Peserta KB Aktif	Ingin Anak Tunda	Tidak Ingin Anak Lagi	Unmet Need	CPR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2019	301,008	231,594	19,492	19,496	12.95	76.94
2020	304,544	235,057	19,532	19,720	12.89	77.18

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021

Tabel 3.31
Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di Kota Palembang, 2020

Kecamatan	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif							Jumlah
		IUD	MOW	MOP	Kondom	Implan	Suntikan	Pil	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Ilir Barat Dua	9.548	414	287	125	421	1.802	2.712	1.828	7.589
Gandus	17.055	642	166	29	730	1.286	7.127	3.036	13.016
Seberang Ulu Satu	18.986	1.839	954	99	1.523	2.256	3.975	3.608	14.254
Kertapati	17.344	422	192	43	335	3.705	7.400	2.139	14.236
Jakabaring	19.236	1.867	1.002	97	1.770	2.372	4.426	3.765	15.299
Seberang Ulu Dua	17.861	538	802	39	750	2.160	5.660	4.227	14.176
Plaju	18.799	2.166	862	81	1.319	3.188	4.756	2.232	14.604
Ilir Barat Satu	22.884	2.472	1.885	44	1.287	3.675	5.146	3.242	17.751
Bukit Kecil	12.411	805	351	191	682	1.330	3.922	2.102	9.383
Ilir Timur Satu	12.842	1.037	787	21	637	1.401	3.393	2.728	10.004
Kemuning	16.377	4.460	2.299	18	424	2.848	1.548	814	12.411
Ilir Timur Dua	13.020	849	788	25	920	803	3.969	2.743	10.097
Kalidoni	19.061	1.761	1.506	38	1.423	1.914	3.538	3.650	13.830



Ilir Timur Tiga	10.368	792	691	23	548	634	3.197	1.946	7.831
Sako	17.232	1.169	1.073	55	729	2.340	4.434	3.635	13.435
Sematang Borang	6.742	859	629	44	752	801	1.178	815	5.078
Sukarami	34.884	1.788	1.373	59	1.164	3.603	11.208	8.151	27.346
Alang-Alang Lebar	19.894	1.585	894	52	2.014	2.758	3.907	3.507	14.717
Total	304.544	25.465	16.541	1.083	17.428	38.876	81.496	54.168	235.057

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2021

❖ **Solusi/ upaya capaian kinerja yang telah dilaksanakan :**

1. Program Keluarga Berencana juga didukung oleh peningkatan masyarakat melalui Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) yang berjumlah 17 Kampung KB di Kecamatan dan 1 Kampung KB binaan Propinsi Sumatera selatan yang sebagian sudah mendapat bantuan dari CSR dan pihak pihak terkait. Melalui wadah kampung Keluraga Berencana (KB), diharapkan pelaksanaan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKB-PK) serta program pembangunan lainnya dapat berjalan secara terpadu dan bersamaan. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Agenda Prioritas Pembangunan terutama agenda prioritas ke-3 yaitu, “Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Tabel 3.32
Daftar Lokasi dan Nama Kampung KB (Keluarga Berkualitas)
Di Kota Palembang Tahun 2020

No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Nama Kampung KB
1	Gandus	Karang Jaya	04	Waringin
2	Gandus	Gandus	03	Sosial Talang Kepuh
3	Jakabaring	Tuan Kentang	05	Junjung Biru
4	SeberangUlu II	11 Ulu	03	Amal Setia
5	Ilir Timur I	20 Ilir 4	05	Kasnariansyah
6	Ilir Timur II	1 Ilir	03	Mawar
7	Ilir Barat I	Bukit Lama	16	Tanjung Rawo
8	Ilir Barat II	29 Ilir	08	Layang-Layang



9	Sukarami	Talang Betutu	02	Suka Mulia
10	Kalidoni	Sei Selincih	06	Cempaka
11	Kemuning	Pahlawan	07	Mangga
12	Alang-Alang Lebar	Talang Kelapa	05	Bunga Mayang
13	Sako	Sako	10	Borang Indah
14	Plaju	Bagus Kuning	05	Bina Nugraha
15	Sematang Borang	Sri Mulya	04	Semabor Indah
16	Kertapati	Karya Jaya	03	Sriwijaya
17	Bukit Kecil	26 Ilir	06	Kencana

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021

Salah satu faktor pendukung tercapainya LPP Kota Palembang adalah Kampung KB merupakan salah satu “senjata pamungkas” baru pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan, terutama di wilayah-wilayah yang jarang “terlihat” oleh pandangan pemerintah.

Pemerintah Kota Palembang mendukung masyarakat membentuk Kampung Kekuarga Berencan (KB) disetiap Kelurahan untuk mensukseskan program pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Dari tabel di atas sudah tergambar kemajuan Kampung KB ini dari setiap tahun ditingkatkan sampai 107 Kelurahan.

Kampung KB, kedepannya akan menjadi ikon program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Kehadiran Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Prinsipnya Program KKBPK mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Penerapan fungsi keluarga ini membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.



Sasaran Strategis 5

Berkembangnya Nilai-Nilai Perikehidupan Umat Beragama dan Budaya yang Mengayomi semua Elemen Masyarakat

Sasaran strategis 5 ini merupakan salah satu upaya mencapai **misi kedua** sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2018-2023, yaitu **"mewujudkan masyarakat yang relegius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan professional."** Dengan sasaran strategis **Berkembangnya Nilai-nilai Perikehidupan Umat Beragama dan Budaya yang Mengayomi semua Elemen Masyarakat** dan juga untuk mencapai tujuan: **"Mewujudkan pranata sosial yang kokoh dan solid ditengah masyarakat"**. Sasaran ini dilaksanakan oleh Seluruh Perangkat Daerah Kota Palembang dimana untuk mengukur sasaran ini ada satu indikator kinerja sasaran dengan capaian rata-rata kinerja sasaran sebesar **75,14%**, capaian ini menurun dibanding tahun 2019 sebesar 32,86 poin dari realisasi capaian tahun 2019 108%. Pengukuran sasaran strategis 5 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.33
Capaian Kinerja sasaran Berkembangnya Nilai-Nilai Perikehidupan Umat Beragama dan Budaya yang Mengayomi semua Elemen Masyarakat Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Persentase Jumlah Jamaah Shalat Subuh di Masjid dan Mushollah	%	50	54	108	55	41,33	75,14	70

Sumber : Aplikasi Si Abuh Kota Palembang



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 Indikator kinerja Persentase Jumlah Jamaah Shalat Subuh di Masjid dan Mushollah capaian kinerja Tahun 2020 75,14% dari target 55% realisasi 41,33. Apanila dibandingkan dengan Tahun 2019 capaian kinerja menurun dimana capaian kinerja 108%. Capaian kinerja ini dikategorikan **Cukup**. Apabila dibandingkan dengan target kondisi akhir RPJMD maka capaian kinerja sudah 70% maka target tahun 2020 sudah memenuhi capaian kinerja.

Tabel 3.34
Tabel Pengguna Aplikasi Si Abuh

Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020	
	Total Pengguna	Total Pengguna Aktif	Total Pengguna	Total Pengguna Aktif
Persentase Jumlah Jamaah Shalat Subuh di Masjid dan Mushollah	17.372 Orang	9.408 Orang	17.229 Orang	7.120 Orang
		PNS : 3.872 Orang		PNS : 2.381 Orang
		Non PNSD : 3.581 Orang		Non PNSD : 2.832 Orang
		Masyarakat : 1.955 Orang		Masyarakat : 1.907 Orang

Sumber : Aplikasi Si Abuh Kota Palembang

❖ Analisa capaian kinerja :

- Peraturan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun 2018 tentang gerakan Shalat Subuh Berjamaah, semua pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang jumlahnya mencapai 1600 orang diwajibkan menaati Perwali tersebut demi tercapainya Visi Palembang Emas Darussalam.
- Kegiatan Shalat Subuh Berjamaah ini juga menggunakan Aplikasi Shalat Subuh (si Abuh) sebagai program absensi subuh. Aplikasi ini bukan hanya diperuntukkan untuk pejabat, PNS Kota Palembang saja tetapi bisa dipergunakan untuk masyarakat. Tahun 2020 total yang mendownload Aplikasi Si ABuh 17.229 orang, dan jumlah penduduk yang Shalat Subuh Berjamaah di Masjid dan Mushollah menggunakan Aplikasi Si Abuh sebanyak 7.120 orang.



Persentase Jumlah Jamaah Shalat Subuh Berjamaah di Masjid dan Mushollah 41,33 %. Capaian kinerja ini menurun dari target yang ditetapkan tentu saja penurunan ini akibat pengaruh dari pandemi Covid 19 dimana masyarakat maupun aparatur tidak banyak yang melaksanakan shalat berjamaah di Masjid maupun Mushollah sehingga aplikasi Si Abuh banyak tidak digunakan.

-

Sasaran Strategis 6 **Terlaksananya Good Governance Pratices dan Reformasi Birokrasi**

Sasaran strategis 6 ini merupakan salah satu upaya mencapai **misi kedua** sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2018-2023, yaitu yaitu **"mewujudkan masyarakat yang relegius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan professional."** dengan sasaran strategis **Terlaksananya Good Governance Pratices dan Reformasi Birokrasi** dan juga untuk mencapai tujuan: **"Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang berdaya saing"**. Sasaran ini dilaksanakan oleh Inspektorat, Badan Pengelolaan keuangan dan aset Daerah Kota Palembang dimana untuk mengukur sasaran ini ada dua indikator kinerja sasaran dengan capaian rata-rata sebesar **.....%**. Pengukuran sasaran strategis 6 tersaji pada tabel dibawah ini :



Tabel 3.35
Capaian Kinerja Terlaksananya Good Governance Practices dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2020
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	%	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP
2	Hasil Evaluasi AKIP Kota Palembang	%	B	B	100	BB	A
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Pemerintah Kota Palembang menjadikan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebagai indikator kinerja karena WTP ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran. Dimana WTP ini opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

Tabel 3.36
Capaian Indikator Kinerja Opini BPK Atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	%	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia



Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja Opini BPK atas laporan hasil pemeriksaan BPK republik Indonesia Pemerintah Kota Palembang berhasil pada pencapaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Apabila dibandingkan dengan target kondisi akhir RPJMD maka capaian kinerja sudah terpenuhi.

❖ Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, mencapai target dikarenakan :

- Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah Kota Palembang dalam transaksi penggunaan anggaran tidak ada yang mencurigakan;
- Pelaporan keuangan telah berbasis Akrua (Accrual Basis) yaitu akuntansi yang memberikan gambaran lebih akurat dan kompleks atas kondisi keuangan organisasi, karena telah mencatat semua transaksi pengeluaran dan penerimaan kas serta jumlah hutang dan piutang;
- Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan, telah memenuhi syarat-syarat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas system pengendalian intern.

2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Palembang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pemerintah Kota Palembang menjadikan evaluasi AKIP ini sebagai indikator kinerja



keberhasilan Pemerintah Kota Palembang dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen yang digunakan instansi Pemerintah Kota Palembang dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan startegik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Berikut ini hasil penilaian capaian indikator kinerja evaluasi AKIP Kota Palembang yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi :

Tabel 3.37
Capaian Indikator Kinerja Hasil Evaluasi AKIP Kota Palembang
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Hasil Evaluasi AKIP Kota Palembang	%	B	B	100	BB	A

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

❖ Hasil Evaluasi AKIP Kota Palembang, nilai realisasi capaian diperoleh dari :

- Capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 mencapai nilai **65,04** dengan predikat **B**, mengalami kenaikan nilai jika dibandingkan capaian kinerja sasaran pada tahun 2018 mencapai nilai **64,10** dengan predikat **B** dan dikategorikan baik. Pencapaian target dikarenakan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja



serta melakukan inovasi-inovasi, baik inovasi percepatan pelayanan publik maupun inovasi peningkatan kinerja pegawai.

Sasaran Strategis 7 **Merata Sebaran Hasil Pembangunan**

Sasaran strategis 7 ini merupakan salah satu upaya mencapai **misi ketiga** sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2018-2023, yaitu **"Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan regional, nasional dan internasional yang kompetitif dan komperatif dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi"** dan juga untuk mencapai tujuan: **"Membangun daya saing kota yang unggul sebagai pusat simpul pembangunan dan investasi tingkat kawasan ASEAN"**. Sasaran ini dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Dinas Perdagangan; Dinas Perindustrian; Dinas Perikanan; Dinas pertanian dan Ketahanan pangan; Dinas Ketenagakerjaan; Badan Pengelolaan Pajak Daerah; Dinas Sosial; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dimana untuk mengukur sasaran ini ada satu indikator kinerja sasaran dengan capaian rata-rata indikator kinerja sasaran sebesar 98,88%. Indeks Gini ini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini berkisar anatar 0 sampai 1, Apabila koefisien gini bernilai 0 berarti pemertaan sempurna sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi



pengeluaran penduduk. Gini ratio mengalami penurunan berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan. Pengukuran sasaran strategis 7 (tujuh) tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.38
Capaian Kinerja Sasaran Merata Sebaran Hasil Pembangunan
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Indeks Gini (Skala 0-1)	%	0,364	0,345	105,51	0,354	0,358	98,88	0,324

Sumber : BPS Berita Resmi Statistik Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran meratanya sebaran Hasil Pembangunan, 1 indikator sasaran tidak mencapai target. Capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 98,88%, dikategorikan **Baik**. Apabila dibandingkan dengan target kondisi akhir RPJMD 0,324 maka capaian kinerja sudah 90,5%.

Nilai koefisien GINI bernilai 0-0,4 tingkat ketimpangan rendah, 0,4-0,5 tingkat ketimpangan sedang dan 0,5-1 tingkat ketimpangan tinggi artinya semakin rendah tingkat ketimpangannya, menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.

Pada Maret 2020, nilai Gini Ratio Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 0,339. Dimana Gini Ratio Perkotaan nilai sebesar 0,358. Gini Ratio di daerah perkotaan Provinsi Sumatera Selatan pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,358, naik dibanding Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,355 dan Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,348.



Tabel 3.39

Gini Ratio Menurut Provinsi Maret 2019, September 2019 dan Maret 2020

Kode	Provinsi	Maret 2019			September 2019			Maret 2020		
		Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11	Aceh	0,344	0,276	0,319	0,351	0,272	0,321	0,360	0,281	0,323
12	Sumatera Utara	0,338	0,264	0,317	0,337	0,262	0,315	0,338	0,255	0,316
13	Sumatera Barat	0,314	0,267	0,306	0,319	0,265	0,307	0,323	0,257	0,305
16	Sumatera Selatan	0,348	0,302	0,331	0,355	0,311	0,339	0,358	0,308	0,339
dst.										
Nasional		0,392	0,317	0,382	0,391	0,315	0,380	0,393	0,317	0,381

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans)

Sasaran Strategis 8 **Meningkatnya Investasi Daerah**

Sasaran strategis 8 ini merupakan salah satu upaya mencapai **misi ketiga** sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2018-2023, yaitu **"Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan regional, nasional dan internasional yang kompetitif dan komperatif dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi"** dan juga untuk mencapai tujuan: **"Membangun daya saing kota yang unggul sebagai pusat simpul pembangunan dan investasi tingkat kawasan ASEAN"**. Sasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Badan Pengelola Pajak Daerah; Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang. Untuk mengukur sasaran ini menggunakan satu indikator kinerja *Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)*. Jumlah nilai inbestasi investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui



oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Banyaknya investasi PMDN berskala nasional dengan banyaknya investasi PMA berskala nasional dihitung dari total nilai proyek yang telah terealisasi pada suatu periode tahun pengamatan. Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya investasi daerah tahun 2020 sebesar 93,79% menurun drastis sekali dari tahun 2019 yang realisasinya 188,13% turun sebesar 94 poin. Lebih jelas tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.40
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Investasi Daerah
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	%	Rp.1.540.000.000.000	Rp.2.897.237.500.000	188,13	Rp.3.120.000.000.000 (1.580.000.000.000)	Rp.1.481.986.000.000	93,79	8,1 T

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penentuan nilai target dibuat berdasarkan perhitungan kumulatif yaitu akumulasi selisih target investasi Tahun 2020 dikurang dengan target investasi Tahun 2019 (Rp. 3.120.000.000.000 - Rp. 1.540.000.000.000 = Rp. 1.580.000.000.000,-). Capaian kinerja Tahun 2020 sebesar 93,79%. Capaian kinerja ini dikategorikan **Baik**, namun realisasi tidak mencapai target yang ditetapkan dimana realisasi sebesar Rp. 1.481.986.000.000,- dan target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.580.000.000.000,-. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2019 pencapaian ini menurun sekitar 94% dimana pencapaian kinerja Tahun 2019 sebesar 188,13%. Bila dibandingkan dengan target kondisi akhir RPJMD 8,1 T



maka capaian kinerja sudah 91,83%, ini akan menjadi prioritas dengan menyesuaikan perkembangan sekarang.

Berdasarkan capaian tersebut di atas, dapat dilihat terjadi penurunan jumlah investasi hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran penyebaran virus covid-19 sehingga menyebabkan kurangnya sosialisasi pelaporan LKPM pertriwulan, kesulitan PMDN memindahkan data dari oss versi 1.0 ke oss 1.1 menyebabkan kendala PMDN/PMA dalam melaporkan LKPM Tahun 2020 sehingga PMDN dan PMA menjadi sungkan untuk melapor ke LKPM dan banyaknya investor tidak melapor ke PMDN/PMA sehingga data yang disampaikan ke LKPM tidak mengalami penambahan investasi. Dengan total investor sebanyak 215 perusahaan.

Tabel 3.41
Rekapitulasi Realisasi Investasi PMDN Kota Palembang
Periode Pelaporan Triwulan I s/d IV (Januari s/d Desember) Tahun 2020

No	Triwulan	PMDN
(1)	(2)	(3)
1	Triwulan I	297.096.400.000
2	Triwulan II	330.144.000.000
3	Triwulan III	85.813.500.000
4	Triwulan IV	768.932.100.000
Total Realisasi Investasi PMDN		1.481.986.000.000
Jumlah Investor		215

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang Tahun 2021



❖ **Faktor -faktor Pendukung Realisasi Capaian Kinerja :**

1. Adanya Mal Pelayanan Publik Kota Palembang dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan;



2. Tersedianya Perangkat daerah/ instansi yang bergabung di Mal Pelayanan Publik Kota Palembang dengan berbagai jumlah dan jenis layanan.





Tabel 3.42
Daftar Jumlah Layanan dan Jenis Layanan di Mal Pelayanan Publik
Kota Palembang

No	Perangkat Daerah/ Instansi	Jumlah Layanan	Jenis Layanan
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang	261	
2	Badan Kesatuan Bangsa Kota Palembang	1	Izin Penelitian
3	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang	4	1. Kartu Keluarga 2. KTP Pindah Datang 3. Akte Kelahiran 4. Akte Kematian
4	DPMPPTS Provinsi SUMSEL	6	1. Sektor Kelautan dan Perikanan 2. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral 3. Sektor Pengelolaan dan Sumber Daya Air 4. Sektor Kesehatan 5. Sektor Perhubungan 6. Sektor Perkebunan 7. Sektor Koperasi UKM 8. Sektor Pendidikan 9. Sektor Industri 10. Sektor Tenaga Kerja 11. Sektor Sosial 12. Layanan Konsultasi OSS
5	Dinas PUPR Kota Palembang	1	Konsultasi Sertifikat Laik Fungsi (LSF)
6	Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang	3	1. NPWD 2. BPHTB 3. PBB
7	Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang	1	Layanan/ Informasi Pembuatan Kartu Kuning
8	Bank Rakyat Indonesia (BRI)	4	1. Pembukaan/ Penutupan Rekening 2. Setoran 3. Penarikan 4. Pembayaran
9	Bank Negara Indonesia (BNI)	4	1. Pembukaan/ Penutupan Rekening 2. Setoran 3. Penarikan 4. Pembayaran
10	BSB	1	Retribusi
11	PLN	4	1. Pasang Baru 2. Perubahan Daya 3. Penyambungan Sementara 4. Loker Pembayaran
12	Imigrasi Kota Palembang	2	1. Pembuatan Paspor 2. Perpanjangan Paspor
13	Kantor Pajak Pratama	7	1. Pendaftaran NPWP 2. Cetak ulang kartu NPWP 3. Aktivasi e-FIN 4. Pembuatan kode billing tanpa akun 5. Informasi KSWP 6. Konsultasi perpajakan 7. Asistensi layanan mandiri
14	Kantor Pos	3	1. Pengiriman surat, dokumen dan barang 2. Layanan jasa keuangan 3. Ritel dan Filateli
15	BPJS Ketenagakerjaan	2	1. Pendaftaran kepesertaan perusahaan atau badan



			usaha
16	BPJS Kesehatan	6	2. Memberikan informasi tentang program Jamsostek 1. Penambahan atau pengurangan anggota keluarga PBU/BP dengan kelas rawat iuran nominal 2. Perubahan puskesmas/ Dokter/Klinik 3. Perubahan kelas rawat 4. Perubahan identitas 5. Penggantian kartu hilang/ rusak 6. Pendaftaran baru peserta mandiri (PBU dan BP)
17	Kementrian Agama Kota Palembang	10	1. Pelayanan informasi ketata usahaaan 2. Pelayanan Informasi Bimas Islam 3. Pelayanan Informasi Haji dan Umroh 4. Pelayanan Informasi Pendidikan Agama Islam 5. Pelayanan Informasi Pendidikan Madrasah 6. Pelayanan Informasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren 7. Pelayanan Informasi Zakat Wakaf 8. Pelayanan Informasi Keagamaan Buddha 9. Pelayanan Informasi Keagamaan Kristen 10. Pelayanan Informasi Keagamaan lainnya
18	PDAM Tirta Musi	3	1. Informasi Pelayanan 2. Informasi Pengaliran 3. Informasi Pelanggan
19	PT. TASPEN	3	1. Layanan Klaim 2. Layanan Non Klaim 3. Layanan Informasi
20	PENGGADAIAN	5	1. Informasi tentang produk penggadaan 2. Layanan tabungan emas 3. Layanan cicilan logam mulia (Mulia) 4. Informasi Arrum Haji 5. Pembiayaan kendaraan bermotor (Amanah)
21	OMBUDSMAN	2	1. Layanan Konsultasi 2. Layanan Pengaduan Masyarakat
22	POLRESTABES	4	1. Pelayanan sidik jari 2. Pelayanan SKCK 3. Perpanjangan SIM 4. Pelaporan kehilangan
23	SAMSAT Palembang II	1	Pembayaran Pajak kendaraan R2/R4 (Tahunan)
24	Kejaksaan Negeri Kota Palembang	2	1. Layanan tilang 2. Konsultasi hukum
25	BBPOM	6	1. Layanan informasi konsumen terkait obat dan makanan 2. Layanan pengaduan konsumen terkait obat dan makanan 3. Layanan pengujian sampel pihak ketiga 4. Layanan registrasi pangan olahan 5. Layanan registrasi obat tradisional dan kosmetik 6. Layanan SKI dan SKE
26	PT. Jasa Raharja	-	Tergabung dengan SAMSAT
27	Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)	1	Layanan konsultasi desain arsitektur rumah tinggal
28	Kemertian ATR/ BPN	3	1. Pelayanan informasi pertanahan 2. Pengecekan sertifikat 3. Hak tanggungan elektronik
29	Palang Merah Indonesia (PMI)	1	Layanan donor darah
JUMLAH		374	

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang Tahun 2021



3. Aplikasi **Hallo Palembang** dengan maksud menjadi wadah untuk masyarakat Kota Palembang dalam mendapatkan informasi pelayanan yang diberikan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Hallo Palembang ini ditujukan untuk menyempurnakan pelayanan publik dari Pemerintah Kota Palembang kepada masyarakat dan menjadi salah satu inovasi dalam hal pelayanan publik serta diharapkan menjadi salah satu kunci penting dalam upaya Pemerintah Kota Palembang mewujudkan Palembang Smart City. Dalam aplikasi Hallo Palembang terkait salah satunya informasi Peluang Investasi dimana masyarakat dapat mengetahui peluang investasi yang ada di Kota Palembang. Dapat diakses pada laman hallo.palembang.go.id.

4. Kegiatan yang mendukung capaian kinerja :

- a. Peningkatan Fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah;
- b. Pengembangan potensi unggulan daerah;
- c. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
- d. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha;
- e. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- f. Penyelenggaraan pameran investasi.

❖ **Solusi/ Upaya yang telah dilaksanakan :**

1. Kemudahan yang sudah diberikan kepada investor/ pelaku usaha berupa kemudahan dalam pengurusan perizinan dengan melalui beberapa inovasi yang telah dibuat oleh DPMPSTSP yaitu :



- a. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
 - b. Pemberian keringan dana atau pengurangan retribusi IMB;
 - c. Layanan Antar Surat Izin yang sudah selesai melalui GOJEK;
 - d. Layanan Komunikasi Online (OSS, Pengaduan, Customer Service);
 - e. Layanan konsultasi Online Single Submission (OSS) secara online melalui aplikasi Whats App, aplikasi Telegram dan email serta aplikasi Zoom Meeting dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu;
 - f. Layanan Pendaftaran Perizinan Profesi dan Sarana Kesehatan secara online;
 - g. Pemberian penambahan masa berlaku Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang berakhir per 1 April 2020 menjadi 1 Agustus karena pandemi covid-19.
2. Pembuatan Kajian akademis terkait Peraturan Daerah tentang Fasilitas/ Kemudahan Investasi Dibidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang.

Sasaran Strategis 9

Berkembangnya Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi dan Daya Kreasi yang Digerakkan oleh Masyarakat (Community Center)

Sasaran strategis 9 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat, yaitu "mewujudkan ekonomi kerakyatan yang Inovatif dan kreatif serta berdaya saing tinggi". dan juga untuk mencapai tujuan: "mewujudkan pertumbuhan



ekonomi yang merata dan berpusat pada masyarakat (community center) berbasiskan Inovasi dan daya kreasi dan berdaya saing tinggi dengan sasaran berkembangnya ekonomi daerah berbasis Inovasi dan daya kreasi yang digerakkan oleh masyarakat (community centered). Sasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas PM-PTSP, Dinas PERindustrian, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, serta BAPPEDA-LITBANG. Untuk mengukur sasaran ini menggunakan satu indikator kinerja sasaran dimana capaian Indikator kinerja sasaran sebesar 93,78%, capaian kinerja ini menurun sebesar 5,92 poin dari capaian tahun 2019 sebesar 99,7%. Pengukuran indikator kinerja sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap perda tata ruang kota yang telah ditetapkan tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.43
Capaian Kinerja Sasaran Berkembangnya Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi dan Daya Kreasi yang Digerakkan oleh Masyarakat (Community Center) Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Kondisi Akhir RPJMD
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,50 - 6,00	5,94	108	5,55 - 6,05	5,94	107,03	5,70 - 6,20
2	Persentase Penduduk Miskin	%	10,70	10,90	98,16	10,40	10,89	95,50	9,7
3	Persentase Koperasi Aktif	%	82,68	82,84	100,19	82,86	82,99	100,16	83,4
4	Persentase Penilaian Koperasi Sehat	%	73,55	68	92,45	84,66	61,33	72,44	100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					99,7			93,78	

Sumber : Badan Pusat Statistik, Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang Tahun 2021



1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 3.44
Capaian Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang Tahun 2020

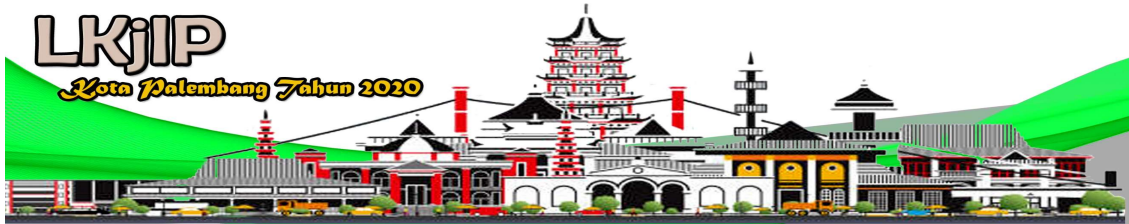
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,50-6,00	5,94	108	5,55 - 6,05	5,94	107,03	5,70 - 6,20

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi Kota Palembang tahun 2020 capaian kinerja yaitu 107,03% dengan kategori Baik Sekali. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar kisaran 5,55-6,05% dengan realisasi 5,94%. Capaian target ini lebih rendah dibanding tahun 2019 sebesar 108% dengan selisih 0,97%. Apabila dibandingkan dengan capaian target kinerja akhir RPJMD maka capaian indikator kinerja ini sudah memenuhi target yang ingin dicapai.

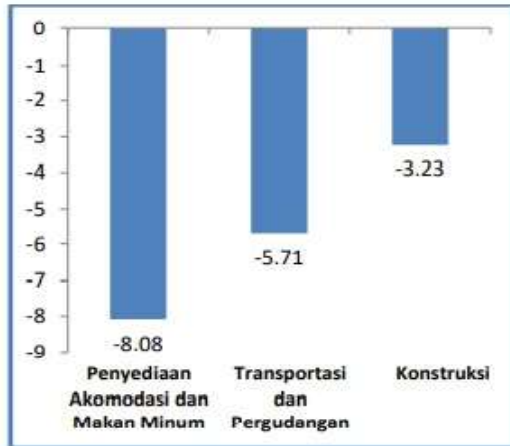
a. Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang Tahun 2020

Perekonomian Kota Palembang tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar - 0,25 persen. Kontraksi terjadi pada sebagian lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi signifikan adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar -8,08 persen, diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar - 5,71 persen, dan Konstruksi sebesar -3,23 persen. Di sisi lain, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, diantaranya Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,06 persen; Informasi dan



Komunikasi sebesar 9,92; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Limbah sebesar 7,93 persen; dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,98 persen.

Grafik 1
Kontraksi Pertumbuhan PDRB
Beberapa Lapangan Usaha
Tahun 2020



Grafik 2
Sumber Kontraksi Pertumbuhan
PDRB Tahun 2018-2020



Bila dilihat dari penciptaan sumber kontraksi pertumbuhan ekonomi Kota Palembang tahun 2020, Konstruksi merupakan sumber kontraksi tertinggi sebesar -0,54 persen, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda motor sebesar -0,25 persen, diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar -0,24 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar -0,22 persen, serta Industri Pengolahan sebesar -0,18 persen.

b. PDRB Kota Palembang Tahun 2020

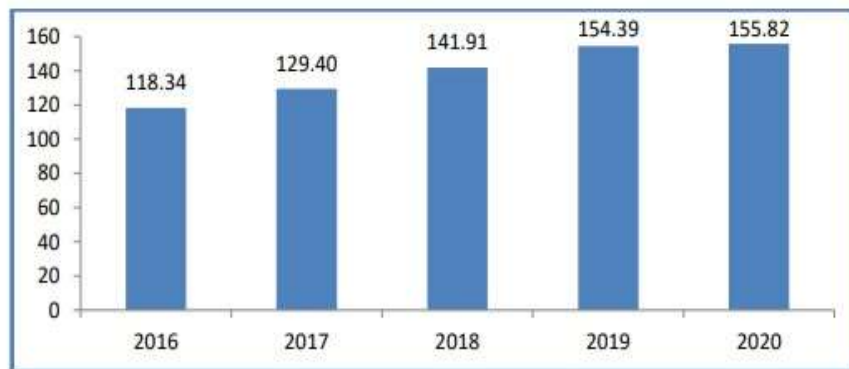
Perekonomian Kota Palembang berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2020 mencapai Rp 155,82 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 104,04 triliun. Nilai PDRB Kota Palembang atas dasar harga berlaku tahun 2020 mencapai 155,82 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,43 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 154,39



triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini menggambarkan adanya peningkatan produksi barang dan jasa hampir di seluruh lapangan usaha, yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Berdasarkan harga konstan tahun 2010, angka PDRB mengalami penurunan dari 104,31 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 104,04 triliun rupiah pada tahun 2020. Penurunan PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2010 sebesar 0,27 triliun rupiah ini murni disebabkan oleh menurunnya produksi di beberapa lapangan usaha, tanpa dipengaruhi oleh inflasi.

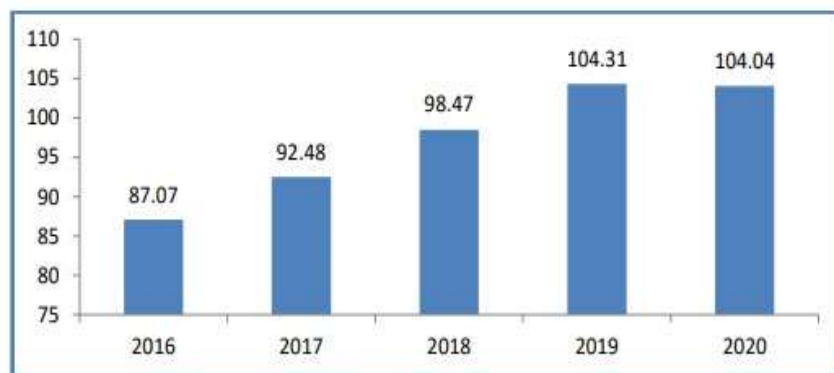
Grafik 3

PDRB Kota Palembang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 – 2020
(dalam triliun rupiah)



Grafik 4

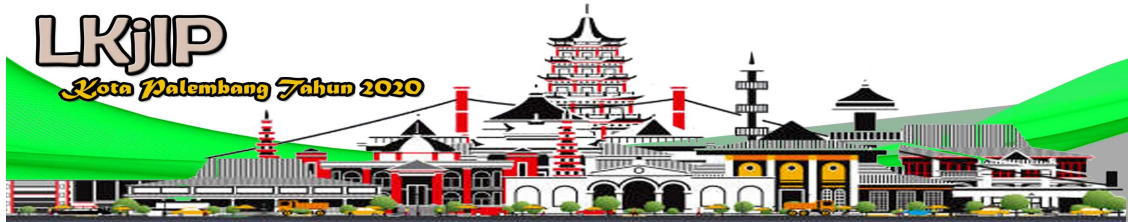
PDRB Kota Palembang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun
2016 – 2020 (dalam triliun rupiah)





c. Struktur Ekonomi Kota Palembang Tahun 2020

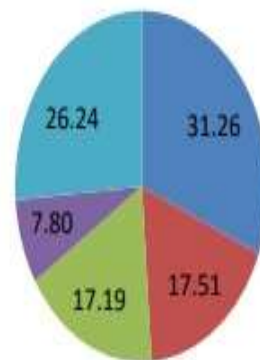
Sumber Kontraksi PDRB Kota Palembang Tahun 2020 berasal dari Sektor Konstruksi yang mengalami kontraksi sebesar -0,54 persen, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar -0,25 persen serta Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar -0,22 persen. Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lebih dari lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kota Palembang didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, yaitu Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta Informasi dan Komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Palembang. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Palembang pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan yaitu mencapai 31,26 persen, selanjutnya Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,51 persen, dan Konstruksi sebesar 17,19 persen, serta Informasi dan Komunikasi sebesar 7,80 persen.



Grafik 5
Struktur Ekonomi Kota Palembang
Tahun 2019

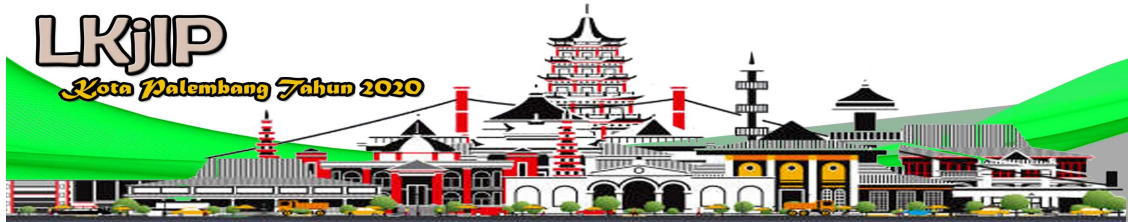


Grafik 6
Struktur Ekonomi Kota Palembang
Tahun 2020

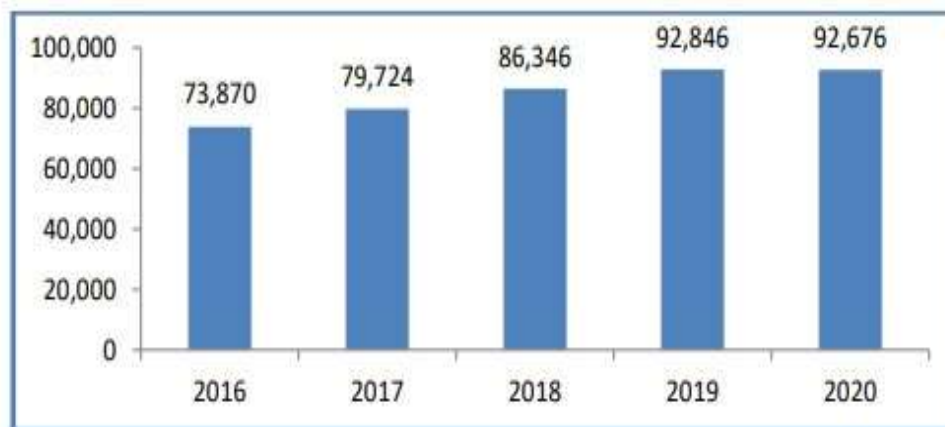


d. PDRB per Kapita Kota Palembang Tahun 2020

Struktur PDRB Kota Palembang menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan sebesar 31,26 persen, yang diikuti Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,51 persen dan Sektor Konstruksi sebesar 17,19 persen. PDRB per Kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah tertentu. PDRB per Kapita ini bisa diperoleh dari hasil bagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Data yang tersaji dalam bentuk ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. PDRB per Kapita Kota Palembang pada tahun 2020 sebesar Rp 92.675.589 turun sebesar Rp 170.322 dari tahun 2019 sebesar Rp 92.845.911. PDRB per Kapita tahun 2020 ini turun sebesar 0,18 persen dari tahun sebelumnya.



Grafik 7
PDRB per Kapita Kota Palembang Tahun
2016 – 2020 (dalam ribu rupiah)



2. Persentase Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin merupakan persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Pada bulan Maret 2020 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kota Palembang mencapai 182,61 ribu orang (10,89 persen). Meningkat sebesar 1,94 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2019 yang sebesar 180,67 ribu orang (10,90 persen).

Kemiskinan merupakan salah satu indikator strategis yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Kemiskinan dihitung setiap tahunnya oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan



memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount index yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Perhitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minuman makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita perhari. Paket Komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GMNK) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Adapun jumlah dan persentase penduduk miskin di kota Palembang dari tahun ke tahun dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.45
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Palembang, 2013–2020

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	392.560	205,99	13,36
2014	405.037	202,31	12,93
2015	431.242	203,12	12,85
2016	456.225	191,95	12,04



2017	480.735	184,41	11,40
2018	510.994	179,32	10,95
2019	521.489	180,67	10,90
2020	548.563	182,61	10,89

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Palembang berfluktuatif sejak tahun 2013-2020. Jumlah penduduk miskin cenderung menurun sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2020. Meskipun pada tahun 2020 secara persentase penduduk miskin mengalami penurunan, akan tetapi jika dilihat dari jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan yang cukup banyak. Pengentasan kemiskinan membutuhkan komitmen dari semua aparat terkait, khususnya Pemerintah Kota Palembang. Bantuan yang diberikan tidak hanya berupa uang, tetapi dapat berupa penanaman mental dan pemberian keterampilan. Sehingga, diharapkan nantinya masyarakat menjadi lebih mandiri dan kreatif dalam memanfaatkan kesempatan yang ada. Selain itu, efektifitas program yang dijalankan juga perlu ditinjau kembali.

Permasalahan kemiskinan menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Kota Palembang. Upaya penyelesaian permasalahan kemiskinan Pemerintah Kota Palembang saat ini dikonsentrasikan pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perindustrian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.

Berikut ini capaian indikator kinerja Persentase Penduduk Miskin Kota Palembang Tahun 2020.



Tabel 3.46
Capaian Indikator Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Persentase Penduduk Miskin	%	10,70	10,90	98,16	10,40	10,89	95,50	9,7

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi indikator kinerja Tahun 2020 sebesar 10,89%, realisasi ini melebihi target yang di tentukan, sehingga capaian kinerja sebesar 95,50%. Capaian kinerja ini menurun dari capaian kinerja Tahun 2019 sebesar 10,90%. Sehingga capaian kinerja ini dikategorikan Baik. Capaian kinerja ini tentu saja ada upaya yang sudah dilaksanakan Pemerintah Kota Palembang dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Apabila dibandingkan dengan target kondisi akhir RPJMD maka belum mencapai masih selisih 1,19 %, ini menjadi acuan ke depan.

❖ **Analisa capaian Kinerja:**

Pengurangan kemiskinan Kota Palembang sudah ada kemajuan namun ada beberapa permasalahan hasil analisa :

- Kurang tepat sasaran program dan kegiatan yang dijalankan oleh OPD dikarenakan basis data *by name by addres* yang seharusnya merujuk pada data DTKS yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial. Program dan kegiatan yang tercover pada aplikasi SIDAK dimana penjabaran muatan berasal dari OPD pengisian data pada aplikasi tersebut belum maksimal;
- Kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD Penunjang seperti Dinas Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM dan



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat mereka melaksanakan bantuan kepada kelompok sasaran. Karena persyaratan pengajuan bantuan harus dalam bentuk kelompok. Kemungkinan besar bahwa merujuk data DTKS kelompok yang dibantu belum banyak yang termasuk jiwa berdasarkan data DTKS, hal ini lah yang mendasari belum sepenuhnya sasaran penerimaan bantuan belum tepat sasaran;

- Kelompok perikanan yang telah diverifikasi untuk mendapatkan bantuan sebagian besar belum terdaftar di Basis Data Terpadu yang menyatakan terdaftar sebagai keluarga miskin dari data statistik Kota Palembang. Dalam hal syarat untuk mendapatkan dana bantuan hibah salah satunya bahwa kelompok sudah mulai berusaha kurang lebih 2 (dua) tahun dibidangnya dan berdasarkan proposal kelompok ke Walikota yang kemudian diverifikasi Dinas Perikanan sampai diterbitkan Surat Keputusan Walikota Palembang;
- Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan tersebut yaitu Industri Rumahan yang kami bina masih terhalang dalam hal permodalan untuk melaksanakan kegiatan usaha, Tahun 2020 hanya dalam bentuk pelatihan dan pembinaan bagi pelaku Industri Rumahan.

❖ **Faktor-faktor pendukung capaian kinerja yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palembang :**

1. Program prioritas yang dilaksanakan yaitu program perlindungan dan jaminan sosial dengan kegiatan prioritas yaitu :
 - Verifikasi dan validasi data kemiskinan Kota PalembangKegiatan ini bertujuan agar data masyarakat miskin di Kota Palembang hasilnya valid dan tepat sasaran sehingga bisa terbantu kebutuhan dasar



bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Salah satu bentuk verifikasi dan validasi data kemiskinan Kota Palembang yaitu DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah. Berikut tabel rekapitulasi data DTKS Kota Palembang Tahun 2020.

Tabel 3.47
Rekapitulasi Data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
Tahun 2019 - 2020 di Kota Palembang

No	Kecamatan	Jumlah DTKS			
		Tahun 2019 (Oktober 2019)		Tahun 2020 (Oktober 2020)	
		Ruta	Jiwa	Ruta	Jiwa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ilir Barat I	6,134	26,342	2,266	9,803
2	Ilir Barat II	6,516	29,889	3,768	16,063
3	Ilir Timur I	4,424	18,447	1,498	6,687
4	Ilir Timur II	5,005	21,434	1,938	8,372
5	Ilir Timur III	4,280	18,840	1,959	8,894
6	Bukit Kecil	3,156	13,086	1,042	4,570
7	Sukarami	7,752	31,829	2,765	11,820
8	Kemuning	5,313	22,282	1,861	7,799
9	Kalidoni	6,653	31,881	3,199	14,924
10	Sako	4,671	20,357	2,380	10,222
11	Sematang Borang	3,057	13,126	2,253	9,542
12	Alang-Alang Lebar	3,280	14,552	1,064	4,852
13	Gandus	8,527	34,379	3,142	13,501
14	Kertapati	12,059	51,778	8,172	35,924
15	Plaju	9,636	37,470	4,310	16,847
16	Seberang Ulu I	9,615	43,695	6,066	28,112
17	Seberang Ulu II	8,958	38,495	4,375	18,808
18	Jakabaring	6,337	29,827	3,883	17,301
Total		115,373	497,709	55,941	244,041

Sumber : Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2021



Berdasarkan tabel di atas jumlah DTKS Kota Palembang Tahun 2020 rumah tangga sebesar 55.941 rumah tangga dan berdasarkan jiwa sebesar 244.41 Jiwa. Nilai DTKS tahun 2020 ini menurun apabila dibandingkan dengan data DTKS Tahun 2019 dimana penurunan rumah tangga sekitar 49% dan jiwa sekitar 49%.

- Penjangkauan anak terlantar, pengemis, pengamen dan orang dengan gangguan jiwa di Kota Palembang. Kegiatan ini bertujuan agar mereka bisa dibantu dan dibina sehingga tidak lagi turun ke jalan dan berkeliaran meminta-minta di jalan. Dijangkau dan dibantu untuk kembali ke rumahnya dan keluarga atau dirujuk ke panti penampungan anak terlantar sehingga terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Tabel 3.48
Rekap Hasil Penjangkauan Tahun 2020

Penjangkauan	Hasil Penjangkauan		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Anak Jalanan (Anjal)	41	25	66
Gelandangan	70	30	100
Pengemis	61	33	94
Orang Terlantar	19	9	28
Pengamen	16	0	16
Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	87	49	136
Total Keseluruhan	294	146	440

Sumber : Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2021

- Salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah program bantuan sosial non tunai. Salah satu program bansos yang sedang digalakkan penyaluran bantuan pangan secara nontunai ke seluruh pelosok negeri.



BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang digunakan hanya untuk membeli pangan di Elektronik Warung Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (E-Warung KUBE PKH) yang bekerjasama dengan Bank Himbara (Mandiri, BNI, BRI, BTN).

Bantuan pangan ini diberikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima bantuan dan memberikan nutrisi yang lebih seimbang secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Keputusan penyaluran bantuan sosial secara nontunai dengan menggunakan sistem perbankan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas program dan agar penyalurannya lebih tepat sasaran, di samping untuk mendorong keuangan inklusif di kalangan masyarakat akar rumput.

Penyaluran bantuan pangan secara nontunai lewat BPNT mengacu pada empat prinsip umum, yaitu:

1. Mudah dijangkau dan digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
2. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada penerima dalam memanfaatkan bantuan, kapan dan berapa banyak bahan pangan yang dibutuhkan. Juga termasuk kebebasan memilih jenis dan kualitas bahan pangan berdasarkan preferensi yang telah ditetapkan dalam program ini;
3. Mendorong usaha eceran rakyat agar dapat melayani penerima bansos;
4. Memberikan akses jasa keuangan kepada KPM.

Lewat program ini, setidaknya ada lima manfaat yang didapat, yaitu:



1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatnya transaksi nontunai sesuai dengan target Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang digagas Bank Indonesia;
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI);
4. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial;
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

Kota Palembang Tahun 2020 penerima BPNT menurun apabila dibanding tahun sebelumnya kuota menurun dari 88.000 KPM (Kelompok Penerima Manfaat) hanya berkisar 33.000 KPM artinya 50.000 KPM tidak menerima BPNT lagi. Sejak Tahun 2020 program BPNT berganti menjadi sembako yang semula nominal uang Rp. 200.000,-. Menurun kuota tersebut masih dipertanyakan oleh Dinas Sosial Kota Palembang kepada pusat.

Tabel 3.49
Rekapitulasi Data BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) Tahun 2020
Per Kecamatan Di Kota Palembang

No	Kecamatan	BPNT 2020
1	Ilir Barat I	4.792
2	Ilir Barat II	6.459
3	Ilir Timur I	4.225
4	Ilir Timur II	4.913
5	Ilir Timur III	3.977
6	Bukit Kecil	3.102
7	Sukarami	7.635
8	Kemuning	5.285
9	Kalidoni	6.550
10	Sako	4.534



11	Sematang Borang	2.904
12	Alang-Alang Lebar	2.816
13	Gandus	8.304
14	Kertapati	12.029
15	Plaju	9.531
16	Seberang Ulu I	9.641
17	Seberang Ulu II	9.384
18	Jakabaring	6.394
Jumlah		112.475

Sumber : Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2021

Tabel 3.50
Jumlah Penerima Bantuan (kepala keluarga) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kecamatan di Kota Palembang, 2020

Kecamatan	Jumlah Penerima Bantuan (Kepala Keluarga)		Jumlah Anggaran (Rupiah)	
	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Iilir Barat Dua	6.459	6.459	15.501.600.000	15.501.600.000
Gandus	8.304	8.304	19.929.600.000	19.929.600.000
Seberang Ulu Satu	9.641	9.641	23.138.400.000	23.138.400.000
Kertapati	12.029	12.029	28.869.600.000	28.869.600.000
Jakabaring	6.394	6.394	15.345.600.000	15.345.600.000
Seberang Ulu Dua	9.384	9.384	22.521.600.000	22.521.600.000
Plaju	9.831	9.831	23.594.400.000	23.594.400.000
Iilir Barat Satu	4.792	4.792	11.500.800.000	11.500.800.000
Bukit Kecil	1.657	1.657	3.976.800.000	3.976.800.000
Iilir Timur Satu	4.225	4.225	10.140.000.000	10.140.000.000
Kemuning	5.285	5.285	12.684.000.000	12.684.000.000
Iilir Timur Dua	4.913	4.913	11.791.200.000	11.791.200.000
Kalidoni	6.550	6.550	15.720.000.000	15.720.000.000
Iilir Timur Tiga	3.977	3.977	9.544.800.000	9.544.800.000
Sako	4.534	4.534	10.881.600.000	10.881.600.000
Sematang Borang	2.904	2.904	6.969.600.000	6.969.600.000
Sukarami	7.635	7.635	18.324.000.000	18.324.000.000
Alang-Alang Lebar	2.816	2.816	6.758.400.000	6.758.400.000
Total	111.330	111.330	267.192.000.000	267.192.000.000

Sumber : Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2021

Dari tabel di atas, realisasi penyaluran bantuan sosial pangan kepada jumlah kepala keluarga Tahun 2020 sebesar 111.330 kepala keluarga dari



rencana 111.330 kepala keluarga sedangkan jumlah anggaran terealisasi sebesar Rp. 267.192.000.00 dari rencana Rp. 267.192.000.

- Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sepuluh Tahun PKH di Kota Palembang mempunyai maksud dan tujuan untuk menekan angka kemiskinan di Kota Palembang. Penerima PKH di Kota Palembang terdiri dari Lansia dan Disabilitas. Jumlah Lansia penerima PKH sebesar 9463 dan Disabilitas penerima PKH sebesar 588. Penerima PKH Lansia terbesar berada di Kecamatan Plaju sebesar 1053 Jiwa dan Disabilitas terbesar di Kecamatan Kertapati sebesar 65 Jiwa.

Tabel 3.51
Rekapitulasi Lansia dan Disabilitas Pogram Keluarga Harapan
Kota Palembang

No	Kecamatan	Jumlah Lansia	Jenis Kelamin Lansia		Jumlah Disabilitas	Jenis Kelamin Disabilitas	
			Laki-Laki	Perempuan		Laki-Laki	Perempuan
1	Ilir Barat I	508	237	271	20	13	7
2	Ilir Barat II	495	209	286	21	9	12
3	Ilir Timur I	245	103	142	17	9	8
4	Ilir Timur II	345	133	212	15	9	6
5	Ilir Timur III	314	125	189	28	12	16
6	Bukit Kecil	237	102	135	37	21	16
7	Sukarami	625	292	333	41	24	17
8	Kemuning	435	194	241	40	25	15
9	Kalidoni	694	311	383	41	18	23
10	Sako	307	158	149	9	7	2
11	Sematang Borang	173	80	93	8	4	4
12	Alang-Alang Lebar	208	85	123	25	10	15
13	Gandus	534	250	284	28	19	9
14	Kertapati	950	454	496	65	35	30
15	Plaju	1053	462	591	56	37	19
16	Seberang Ulu I	1009	439	570	60	28	32
17	Seberang Ulu II	824	373	451	52	29	23
18	Jakabaring	507	215	292	25	14	11
TOTAL		9463	4222	5241	588	323	265

Sumber : Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2021



2. Adanya aplikasi sistem SIDAK (Sistem Informasi Data Kemiskinan) yang bertujuan sebagai wadah penjabaran program dan kegiatan OPD Pemerintah Kota Palembang dalam memberikan bantuan tepat sasaran *by name dan by address* sehingga program dan kegiatan tersebut tepat sasaran.

❖ **Solusi/Upaya yang sudah dilaksanakan untuk capaian kinerja :**

1. Jumlah UMKM sebanyak 45.827 unit dengan Usaha Kecil Mikro sebanyak 40.130 unit dan Usaha menengah sebanyak 5.697 unit. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang pencapaian indikator ini antara lain Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM dengan kegiatan Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan melaksanakan sosialisasi dukungan informasi permodalan bagi UKM. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah tahun ini belum dapat dilaksanakan terkait adanya relokasi anggaran. Tetapi tahun ini terjadi peningkatan pada persentase Usaha Kecil dan Mikro dikarenakan adanya bantuan Presiden untuk Usaha Mikro, dengan demikian dapat terdata ada penambahan Usaha Mikro di Kota Palembang saat ini. Untuk UKM di Kota Palembang diberikan pinjaman melalui Bank Palembang dengan subsidi bunga dibayar oleh Pemerintah Kota Palembang, masing-masing UKM mendapat pinjaman 3 (tiga) juta per UKM. Tahun 2020 total UKM yang mendapat pinjaman ada 802 UKM.
2. Dana Insentif Daerah (DID) meliputi :
 - a. Pelatihan dasar service AC dan bantuan mesin/ peralatan sebanyak 40 IKM;
 - b. Bimbingan teknis Lacquer dan bantuan mesin/peralatan pertukangan sebanyak 20 IKM;



- c. Pelatihan dasar untuk barista kopi pemjula dan bantuan mesin/peralatan sebanyak 30 IKM;
- d. Pelatihan kue khas Palembang tempoe doeloe dan bantuan mesin/peralatan sebanyak 30 IKM;
- e. Bimbingan teknis pengemasan produk pangan dan bantuan mesin/peralatan sebanyak 3 IKM;
- f. Bantuan mesin/peralatan untuk IKM sandang (alat tenun, alat pemintal, alat cetakan batik) sebanyak 28 IKM;
- g. Bantuan mesin untuk IKM Logam, Mesin, dan Kimia (Tool kit dan rak, compressor) sebanyak 20 IKM;
- h. Bantuan mesin untuk IKM pangan (vacuum sealer) sebanyak 30 IKM.

Tabel 3.52
Rekapitulasi Industri Kecil dan Menengah Kota Palembang Tahun 2020

No	Industri	Industri Formal sampai dengan Tahun 2019 (unit usaha)	Industri Non Formal Tahun 2019 (unit usaha)	Industri Formal Tahun 2020 (unit usaha)	Jumlah Industri s/d Tahun 2020 (unit usaha)
1	Sandang	796	-	8	804
2	Pangan	625	-	67	692
3	LMK	840	110	24	974
Jumlah		2.261	110	99	2.470

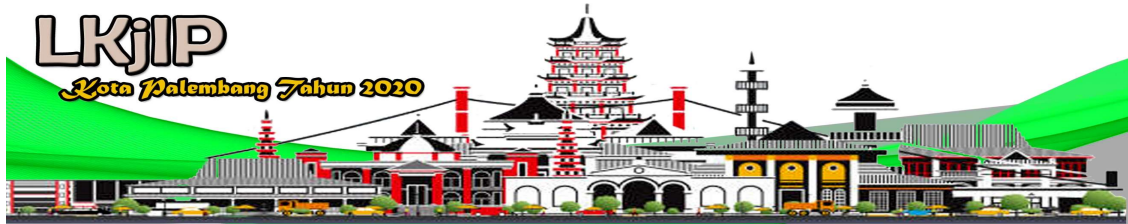
Sumber : Dinas Perindustrian Kota Palembang Tahun 2021

- i. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan (bantuan paket budidaya ikan nila) Jumlah kelompok penerima sebanyak 32 Kelompok;
- j. Pengembangan system usaha perikanan budidaya (bantuan paket budidaya ikan lele) Jumlah kelompok penerima sebanyak 15 Kelompok;
- k. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (bantuan paket sarana dan prasarana tangkap) Jumlah kelompok penerima sebanyak 11 Kelompok;



- I. Optimalisasi pemasaran hasil perikanan (bantuan paket alat masak pengolahan hasil perikanan, vacuum sealer dan chest freezer, paket kompor gas, tabung gas dan regulator 19) Jumlah kelompok penerima sebanyak 19 kelompok, dimana bantuan paket alat masak pengolahan hasil perikanan (5 kelompok), bantuan paket vacuum sealer dan chest freezer (9 kelompok) dan bantuan paket kompor gas, tabung gas dan regulator (5 kelompok).
5. Program dan kegiatan ketahanan pangan :
 - a. Kegiatan diversifikasi tanaman pangan (Bantuan Cabe, Rak vertikultur dan benih tanaman). Dimana aksi yang dilaksanakan kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) yaitu KWT Ketimun Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3; KWT Bayam Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur 3; KWT Cabe Rawit Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3; KWT Anggrek Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3; KWT Rosela Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-alang Lebar; KWT Sumber Rezeki 1 Kelurahan Bukit Sangkat Kecamatan Kalidon I; KWT Sumber Rezeki 2 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni; KWT Harapan Jaya Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju; KWT Putri Melati Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju.
 - b. Kegiatan Desa Mandiri Pangan dimana kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur 3 KWT Kenanga.
 - c. Kegiatan APBN P2L Tahun 2020 :

KWT Borang Indah Kecamatan Sako; KWT Dahlia Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus; KWT Melati Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sematang Borang; KWT Jaya Indah Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I; kwt Mekar Sari Kelurahan Pilokerto Kecamatan Gandus; KWT Sehati Kecamatan Sukarami.



6. Pemberdayaan Masyarakat

Melakukan pembinaan Industri rumahan di beberapa Kecamatan. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas PPPAPM Kota Palembang yaitu dengan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan peningkatan mutu pengelolaan ekonomi keluarga;
- b. Pelatihan teknis produksi kerajinan batik dalam rangka penumbuhan wirausaha baru;
- c. Kegiatan pelatihan packing dan pemasaran;
- d. Kegiatan pelatihan pengelolaan kuliner dan sandang;
- e. Kegiatan pelatihan inovasi kerajinan tangan.

Tabel 3.53
Data Industri Rumahan Binaan Dinas PPPAPM Kota Palembang

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Industri Rumahan
1	Ilir Barat II	30 (Tiga Puluh Ilir) Ilir	172
		27 (Dua Puluh Tujuh) Ilir	154
2	Seberang Ulu	11 (Sebelas) Ulu	11
		12 (Dua Belas) Ulu	4
		13 (Tiga Belas) Ulu	17
		14 (Empat Belas) Ulu	16
		16 (Enam belas) Ulu	12
		Tangga Takat	6
		Sentosa	11
		Plaju Ilir	44
		Plaju Ulu	83
		Bagus Kuning	77

Sumber : Dinas PPPAPM Kota Palembang Tahun 2021

7. Akan dilaksanakan pematapan program dan kegiatan strategis OPD yang terlibat ke masyarakat miskin dengan merujuk data DTKS yang dikeluarkan



Dinas Sosial sehingga by name dan by address tepat sasaran. Untuk OPD Penunjang melaksanakan pendataan by name by address jiwa berdasarkan data DTKS untuk dipetakan pembentukan kelompok atau bergabung dengan kelompok yang sudah ada sesuai dengan domisili;

8. Solusi Tahun 2020 Dinas Perindustrian membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri yang menyatakan bahwa setiap pelaku usaha industri diwajibkan memiliki IUI, sehingga pertumbuhan industri kecil dan menengah di kota Palembang bisa meningkat jumlahnya, serta dapat mengurangi jumlah kemiskinan.

3. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi merupakan suatu badan usaha (organisasi ekonomi) yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi atau suatu badan hukum yang dibentuk atas asas kekeluargaan dimana tujuannya adalah untuk mensejahterakan para anggotanya. Suatu koperasi dianggap aktif jika koperasi baik secara kelembagaan maupun usahanya masih berjalan dan aktif. Berikut capaian indikator sasaran persentase koperasi aktif Tahun 2020 Kota Palembang.

Tabel 3.54
Capaian Indikator Kinerja Persentase Koperasi Aktif Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Persentase Koperasi Aktif	%	82,68	82,84	100,19	82,86	82,99	100,16	83,4

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang Tahun 2021



Persentase Koperasi Aktif tercapai sebesar 82,99% dari target sebesar 82,86%, kinerja tercapai sebesar 100,16%. Total Koperasi sebanyak 982 koperasi dengan koperasi yang aktif 815 koperasi dan koperasi tidak aktif sebanyak 167 koperasi. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 realisasi sebesar 82,84% dengan koperasi aktif sebanyak 806 koperasi dari total koperasi sebanyak 973 koperasi dan tidak aktif sebanyak 167 koperasi. Capaian kinerja dikategorikan **Baik Sekali**. Apabila dibandingkan dengan target kondisi akhir RPJMD 83,4% maka capaian kinerja Tahun 2020 selisih 0,41%.

Pembinaan koperasi di kota Palembang dapat diukur dari persentase koperasi aktif sebesar 82,86% terealisasi sebesar 82,99%, sehingga indikator kinerja sasaran ini tercapai 100,16%.

Tabel 3.55
Keragaan Koperasi Kota Palembang
Per 31 Desember Tahun 2020

No	Uraian	Satuan	Perkembangan Tahun		
			2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Koperasi	Unit	968	973	982
	a. Koperasi Aktif	Unit	797	806	815
	b. Koperasi Tidak Aktif	Unit	171	167	167
2	Jumlah Anggota	Orang	58.474	44.430	54.211
3	Jumlah Manager/ Karyawan	Orang	799	537	418
4	Pelaksanaan RAT	Unit	108	102	95
5	Permodalan				
	a. Modal Sendiri (Equitas)	Rp. 000	243.173.220	234.846.448	413.622.689
	b. Modal Luar (Kewajiban)	Rp. 000	245.521.703	188.176.048	407.924.346
6	Jumlah Equitas dan Kewajiban	Rp. 000	488.694.924	423.022.496	821.547.035
7	Jumlah Volume Usaha (omset)	Rp.000	686.433.909	507.626.996	985.856.443
8	Jumlah SHU	Rp.000	28.617.489	27.413.601	27.234.914

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang Tahun 2021



❖ **Faktor -faktor Pendukung Realisasi Capaian Kinerja :**

1. Terlaksananya koordinasi dan pendampingan bagi koperasi di Kota Palembang;
2. Terlaksananya rapat koordinasi dengan koperasi di Kota Palembang;
3. Terlaksananya penyuluhan dan monitoring koperasi;
4. Program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja :

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program ini dilaksanakan dengan 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi dengan pelaksanaan rapat koordinasi koperasi sekota Palembang. Kegiatan Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian dengan pelaksanaan sosialisasi penerapan peraturan perundang-undangan dalam meningkatkan kepatuhan koperasi. Realisasi program dan kegiatan ini terealisasi sebesar 99,54%

❖ **Solusi/ Upaya yang telah dilaksanakan :**

1. Melaksanakan rapat koordinasi dengan koperasi yang ada di Kota Palembang;
2. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman anggota dan pengurus koperasi mengenai kewajiban selaku badan usaha koperasi;
3. Melakukan penyuluhan dan monitoring terhadap koperasi di Kota Palembang;
4. Melaksanakan Bimbingan dan Pendampingan untuk peningkatan kapasitas SDM Koperasi.

4. Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi

Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam untuk mengukur tingkat kesehatan KSP/ USP agar terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang



sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian koperasi dapat dilakukan pada koperasi yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Tahun 2020 koperasi yang dapat dinilai kesehatannya sebanyak 92 (sembilang puluh dua) koperasi dengan target tahun 2020 sebanyak 150 (seratus lima puluh ribu) koperasi. Capaian kinerja dikategorikan **Cukup**. Berikut di bawah ini disajikan tabel capaian indikator kinerja sasaran persentase penilai kesehatan koperasi.

Tabel 3.56
Capaian Indikator Kinerja Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Persentase Penilaian Koperasi Sehat	%	73,55	68	92,45	84,66	61,33	72,44	100

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang Tahun 2021

Persentase Penilaian Kesehatan koperasi sebesar 61,33% dari target sebesar 84,66%, sehingga capaian kinerja tercapai sebesar 72,44% dengan koperasi yang dinilai kesehatannya sebesar 92 koperasi dari target sebesar 150 koperasi. Bila dibandingkan capaian kinerja tahun 2019 dengan capaian 92,45%, capaian Tahun 2020 menurun sekitar 20% dengan capaian 72,44%. Apabila dibandingkan dengan target kondisi akhir RPJMD 100% maka capaian kinerja Tahun 2020 selisih 38,67%. Kondisi tidak tercapai ini dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda sehingga koperasi tidak dapat melaksanakan rapat anggota tahunan dan keterlambatan penyampaian laporan tahunan koperasi sehingga penilaian kesehatan koperasi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai target.



Tabel 3.57
Rekapitulasi Penilaian Kesehatan Koperasi dalam Kota Palembang Tahun Buku 2019
Triwulan IV (Semester II/ 2020)

No	Kriteria Penilaian Koperasi	Satuan	Perkembangan Tahun		
			2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sehat	Unit	20	17	20
2	Cukup Sehat	Unit	77	70	66
3	Dalam Pengawasan	Unit	6	1	4
4	Dalam Pengawasan Khusus	Unit	-	2	2
Total		Unit	103	90	92

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2021

❖ **Faktor -faktor Pendukung Realisasi Capaian Kinerja :**

1. Terlaksananya sosialisasi bagi anggota dan pengurus koperasi mengenai Peraturan Perundang-undangan yang mewajibkan koperasi untuk melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
2. Melakukan himbauan baik secara tertulis maupun secara media untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
3. Adanya pembinaan dan pendampingan terhadap koperasi mengenai penyusunan laporan neraca simpan pinjam;
4. Program dan kegiatan yang dilaksanakan :

Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dengan kegiatan Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi dengan anggaran Rp. 67.450.000,- dengan realisasi RP. 66.770.000,- dengan capaian 98,99% dan kegiatan Sosialisasi prinsip-prinsip perkoperasian dengan anggaran Rp. 82.000.000,- dengan realisasi RP. 82.000.000,- dengan capaian 100%.



❖ **Solusi/ Upaya yang telah dilaksanakan :**

1. Membuat Surat Edaran untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan penyampaian laporan tahunan;
2. Melaksanakan bimbingan dan pendampingan dalam penyusunan laporan neraca simpan pinjam;
3. Melaksanakan Bimtek mengenai tata cara penilaian kesehatan koperasi bagi ASN penilai kesehatan koperasi.

Sasaran Strategis 10

Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Sasaran strategis 10 ini merupakan salah satu upaya mencapai **misi kelima** sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2018-2023, yaitu **"Menjadikan Palembang Kota Pariwisata sungai dan budaya serta event olahraga klas dunia yang harmoni antara kehidupan manusia dan alam"** dan juga untuk mencapai tujuan **"Mewujudkan Palembang sebagai riverfront city dan pusat pengembangan olahraga terbaik di kawasan ASEAN"**. Sasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang dengan rata-rata capaian indikator kinerja sasaran sebesar 77,77% dengan kategori **Baik**. Capaian ini menurun dari tahun 2019 sebesar 187,7%.



Tabel 3.58

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Jumlah Kunjungan Wisata	%	2.300.000 Jiwa	1.986.323 Jiwa	86,4	2.400.000 Jiwa	895.912 Jiwa	37,33	12.500.000 Jiwa
2	Jumlah Event Olahraga Tingkat Lokal, Regional, Nasional dan Internasional	%	9 Event	26 Event	289	11 Event	13 Event	118,2	17 Event
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					187,7			77,77	

Sumber : Dinas Pariwisata , Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang, Tahun 2021

1. Jumlah Kunjungan Wisata

Pariwisata merupakan komoditas yang dibutuhkan oleh setiap individu karena aktivitas berwisata bagi seorang individu dapat meningkatkan daya kreatif, menghilangkan kejenuhan kerja, relaksasi, berbelanja, bisnis, mengetahui peninggalan bersejarah, kesehatan dan pariwisata spritulisme, seiring dengan meningkatnya waktu luang sebagai akibat lebih singkatnya hari kerja dan disukung oleh meningkatnya penghasilan maka aktivitas kepariwisataan akan semakin meningkat. Wisatawan adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Sektor Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat



memberikan sumbangan pembangunan ekonomi. Untuk itu Pemerintah Kota Palembang menjadikan kunjungan wisata ini sebagai salah satu indikator kinerja Pemerintah Kota Palembang untuk meningkatkan potensi yang ada dan menjadi sumber pendapatan daerah. Dalam pencapaian kinerja ini beberapa dinas yang berperan penting dalam pencapaian yaitu Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang. Berikut ini indikator capaian kinerja Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2020 :

Tabel 3.59
Capaian Indikator Kinerja Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Jumlah Kunjungan Wisata	%	2.300.000 Jiwa	1.986.323 Jiwa	86,4	2.400.000 Jiwa	895.912 Jiwa	37,33	12.500.000 Jiwa

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Palembang, Tahun 2021

Hasil pengukuran pada tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

Jumlah Kunjungan wisatawan yang disajikan pada tabel di atas adalah hasil dari perhitungan sendiri Dinas Pariwisata Kota Palembang yaitu sebesar 37,33%. Dari hasil capaian di atas terlihat bahwa minat kunjungan wisatawan ke Kota Palembang apabila dibandingkan dengan Tahun 2019 sangat menurun sekitar 49% dan tidak memenuhi target yang direncanakan. Hal ini disebabkan karena bencana non alam yaitu pandemi Covid-19 sejak pertengahan bulan Maret 2020 lalu yang menyebabkan 30 event wisata di Palembang batal digelar, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Pembatalan dilakukan sepanjang 2020 hingga awal 2021 dan tidak menutup kemungkinan terus berlanjut. Di antara even wisata yang dibatalkan dengan jumlah pengunjung paling banyak adalah

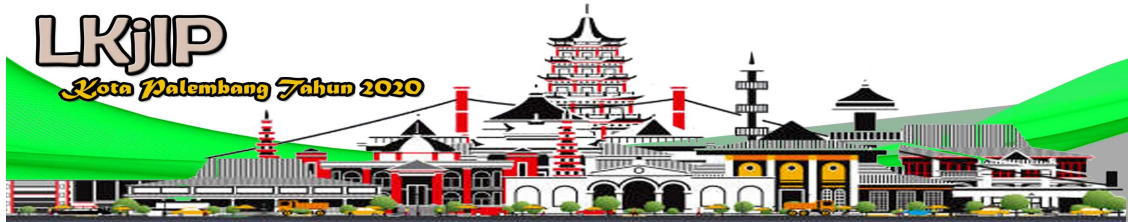


Ziarah Kubro dan perayaan Cap Go Meh. Ada 30 event wisata terpaksa dibatalkan karena pandemi, hampir semuanya banyak dikunjungi wisatawan dalam maupun luar negeri. Pembatalan tersebut otomatis berpengaruh terhadap angka kunjungan wisatawan. Pada 2020 ditargetkan 2,4 juta wisatawan, namun hanya 895.912 ribu wisatawan yang datang, artinya hanya 37,33%. Apabila dibandingkan dengan target kondisi akhir RPJMD 12.500.000 Jiwa maka capaian kinerja Tahun 2020 masih berada pada posisi 7,2%.

Bila dibandingkan dengan target nasional dimana dilakukan revisi target Tahun 2020 sebesar 18 Juta wisman dikoreksi di kisaran 2,8-4 juta orang. Sementara dari domestik terkoreksi 120–140 juta dari prediksi sebelumnya 300 juta orang. Kunjungan wisatawan domestik secara nasional tahun 2020 anjlok lebih dari 50% sedangkan wisman anjlok lebih dari 75%, begitu juga dengan kunjungan wisatawan ke Palembang tahun 2020 pun melorot sebesar 60% dibandingkan tahun 2019 lalu dimana hal ini disebabkan pandemi covid 19 yang terjadi sejak bulan Maret hingga sekarang menyebabkan terhentinya aktifitas perjalanan wisatawan baik domestik maupun mancanegara, selain itu menurunnya pertumbuhan ekonomi serta pendapatan masyarakat berpengaruh kuat terhadap dorongan berwisata dan tentu kekhawatiran melakukan perjalanan dimasa pandemi juga sangat mempengaruhi secara psikologis wisatawan melakukan aktifitas wisata.

❖ **Faktor pendukung capaian sasaran indikator kinerja :**

1. Upaya promosi dan publikasi secara digital/ online yg saat ini paling efektif dan konsisten dilakukan;
2. Melakukan promosi media cetak elektronik baik destinasi maupun event pariwisata ke skala nasional/ domestik;



3. Mengadakan beragam event skala lokal, regional, nasional untuk menggarap pasar wisatawan yg besar.
4. Program yang dilaksanakan mendukung capaian kinerja :

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	Capaian (%)
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2.434.971.500,00	2.114.079.276,00	320.892.224	87
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	4.839.739.116	434.408.132,00	4.405.330.984	9
3	Program Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	422.398.138,00	315.651.566,00	106.746.572	75

❖ **Solusi/ upaya yang telah dilaksanakan :**

1. Peningkatan Promosi dan Publikasi

Peningkatan dalam upaya promosi dari media cetak, elektronik dan sosial media :

- a. Promosi dari media cetak berupa penerbitan majalah *Charming Palembang* dan pembuatan booklet serta leaflet berisi informasi destinasi wisata Palembang;
- b. Promosi elektronik berupa promosi melalui TV dan Radio;
- c. Promosi melalui sosial media seperti promosi destinasi wisata, kuliner, event dan lainnya di media instagram, facebook, twitter dan website.

2. Destinasi Wisata Sungai yang terintegrasi. Penataan kawasan kumuh di Kota Palembang yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dimana ada sekitar 2.581 Ha kawasan kumuh di Kota Palembang, Tahun 2020 akan menata lahan seluas 17 hektare di bagian Ilir. Penataan dimulai dari titik kumuh di sekitar Sungai Sekanak, 24 Ilir dan Bukit Kecil. Kawasan kumuh ini menjadi lebih bersih, nyaman serta sehat bagi masyarakat dan tinggal di bantaran sungai. Kawasan ini dijadikan *destinasi wisata*



terintegrasi. Kawasan kumuh yang sudah ditata Pemerintah Kota Palembang adalah Sungai Sekanak hingga ke pusat kuliner 16 Ilir.

3. Aplikasi **Hallo Palembang** dengan maksud menjadi wadah untuk masyarakat Kota Palembang dalam mendapatkan informasi pelayanan yang diberikan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Dalam aplikasi Hallo Palembang terkait salah satunya informasi Calendar Of Events dimana masyarakat baik dari Kota Palembang maupun dari provinsi Lain serta luar negeri dapat mengetahui informasi mengenai events/ kegiatan yang ada di Kota Palembang, sehingga wisatawan dapat merencanakan kedatangannya ke Kota Palembang. Dapat diakses pada laman hallo.palembang.go.id.
4. Penyelenggaraan festival seni dan budaya. Dalam rangka mengembangkan dan memanfaatkan (melestarikan) kesenian dan kebudayaan Kota Palembang. Dinas Kebudayaan telah menyelenggarakan event-event seni dan budaya baik event nasional maupun event daerah keseluruhan ada 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan.
 - a. Jumlah Bangunan dan Seni dikelola secara terpadu. Pada Tahun 2020 Dinas Kebudayaan telah melaksanakan kegiatan Rehab Makam dalam rangka pelestarian bangunan dan situs cagar budaya yaitu sebagai berikut : Makam Kesultanan Palembang (Kawah Tekurep), Makam Sultan Mahmud Mansyur (Jayo Ing Lago), Makam Sabokingking, Makam Ratu Bagus Kuning dan Makam Ratu Pembayun. Selain itu juga telah merehab gedung Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, secara fisi kegiatan Rehab Makam dan Museum terealisasi 100%.



- b. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Undang-undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa cagar budaya adalah benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, agama dan kebudayaan dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu harus dikelola secara tepat supaya dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada bangsa Indonesia. Cagar Budaya di Indonesia, khususnya Kota Palembang masih dalam keadaan rentan budaya untuk itu cagar budaya perlu dilestarikan keberadaannya. Kondisi sekarang (Tahun 2020) persentasenya baru 48% yang dilestarikan sesuai dengan target yang diharapkan.
- c. Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Warisan budaya dikelompokkan menjadi dua, yaitu Budaya Benda (Tangible) dan Budaya Tak Benda (Intangible). Budaya Tak Benda (Intangible) adalah Hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideology, mitologi, ungkapan konkrit dalam bentuk suara, gerak, maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem penilaian, system kepercayaan dan adat istiadat. Saat ini pencatatan warisan budaya tak benda dalam bentuk karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi untuk tahun 2020 sebanyak 10 objek sehingga jumlah karya budaya pada tahun 2020 menjadi 72 objek karya budaya.
5. Solusi/ upaya yang dilaksanakan dalam kondisi pandemic Covid-19
- a. Sejak bulan Maret 2020 seluruh destinasi wisata ditutup sementara untuk mengurangi penyebaran pandemi covid 19, kemudian dilakukan upaya disinfektan destinasi-destinasi wisata serta seluruh hotel, restoran dan area publik guna menekan penyebaran covid 19;



- b. Pada bulan Juni 2020 melakukan peninjauan seluruh industri pariwisata agar mentaati protokol kesehatan dan gerakan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak) di masing-masing industri guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung serta jaminan agar terhindar selama covid 19;
- c. Pada bulan Agustus 2020 melaksanakan Program “*Staycation Palembang bae*” guna membantu industri hotel yg mengalami kesulitan karena sepi tamu menginap dihotel dengan melakukan flash sale harga hotel promo harga murah;
- d. Menggaungkan upaya penekanan penyebaran covid 19 melalui media sosial hingga akhir tahun 2020 upaya dilakukan dengan mengikuti pameran *Palembang Tourism Fiesta 2020* di Kota Bandar Lampung dengan tujuan mendatangkan wisatawan dari Kota Lampung via jalan tol yg sdh terhubung dan durasi hanya 3 (tiga) jam perjalanan;
- e. Charming Event Of Palembang 2021
Selain promosi dan publikasi akan dilaksanakan juga event di Kota Palembang yang sudah dirngkum dalam Calender of Event Kota Palembang Tahun 2021, yang memiliki TOP 10 event mulai dari event olahraga dan budaya. Event yang dilaksanakan pun melalui hybrid online dan juga offline.



CHARMING EVENTS OF PALEMBANG 2021
#PayokePalembang

www.palembangtourism.com | Palembang Tourism Channel | @CharmingPA | @palembang2021 | @CharmingPalembang | Charming Palembang

1338th PALEMBANG ANNIVERSARY EVENT

WOMEN MOMENT 2021 3-6 JUNI
FESTIVAL PALEMBANG NIANI 11-18 JUNI
FESTIVAL SRIWIJAYA 16 - 23 JUNI
PALEMBANG INTERNATIONAL EXPO 2021 18 - 22 JUNI
PALEMBANG TRIATHLON 19-21 JUNI
LOMBA MARCHING BAND ANTAR SEKOLAH, SD - SMA JUNI
PALEMBANG HOLIDAY SEASON JUNI - JULI
AQUASCAPE FEST 2021 1-4 JULI
PALEMBANG CULTURE WEEK 1-12 JULI
FESTIVAL PALEMBANG DARUSSALAM 16-17 JULI
PEMILIHAN BUJANG GADIS PALEMBANG KE-XXXIV 31 JULI
PEH NGOPI JULI

www.palembangtourism.com | Palembang Tourism Channel | @CharmingPA | @palembang2021 | @CharmingPalembang | Charming Palembang

ORIENTAL EVENT

PAMERAN AQUASCAPE & IKAN HIAS 8-10 JANUARI
FESTIVAL TANAMAN HIAS & IKAN CUPANG 14-17 JANUARI
BABY IDOL 21-24 JANUARI
PEMILIHAN PUTRA PUTRI NUSANTARA SUMATERA SELATAN 2021 23 JANUARI
AMPERA YOUTH FEST 2021 23 - 24 JANUARI
GOWES ASITA EMAS 24 JANUARI
CHINESE NEW YEAR 2021 JAN-FEBRUARI
MUSI TRAVEL FAIR 2021 5 - 14 FEBRUARI
CHINESE NEW YEAR FESTIVAL 5-14 FEBRUARI
OPI ORIENTAL FESTIVAL 2021 7-14 FEBRUARI
GOSOK MUSEUM 28 FEBRUARI
LOVE OF FEBRUARI FEBRUARI

www.palembangtourism.com | Palembang Tourism Channel | @CharmingPA | @palembang2021 | @CharmingPalembang | Charming Palembang

INDONESIA INDEPENDENCE DAY EVENT

SRIWIJAYA MUSICAL FAIR 2021 5-8 AGUSTUS
BIDAR MINI 13 AGUSTUS
BIDAR TRADISIONAL 17 AGUSTUS
PEKAN PUSAKA PALEMBANG 30 AGUSTUS - SEPTEMBER
GERAK JALAN HUT RI, SD - SMA AGUSTUS
FESTIVAL NUSANTARA AGUSTUS
PESTA RAKAT AGUSTUS
AUTOMOTIVE EXPO 1-5 SEPTEMBER
OPI MOTONATIONS 2021 2-5 SEPTEMBER
FESTIVAL KULINER 3-4 SEPTEMBER
ARTINVERSARY DEP 9 SEPTEMBER
FESTIVAL BUDAYA MELATU 12-13 SEPTEMBER
FESTIVAL SIGUNTANG 13-14 SEPTEMBER
ALL ABOUT WOMEN 17-20 SEPTEMBER
LOMBA FOTOGRAFI DAN ANIMASI GAMES 20 SEPTEMBER
PIALA GUBERNUR U14 & U16 SEPTEMBER
ATRAZI PENGHANGKARAN BENCANA OLEH TIM TAGANA KOTA PALEMBANG SEPTEMBER

www.palembangtourism.com | Palembang Tourism Channel | @CharmingPA | @palembang2021 | @CharmingPalembang | Charming Palembang

ISLAMIC EVENT

WEDDING FESTIVAL 6-14 MAR
SEPEKAN SENI PALEMBANG 9-14 MAR
THE FIVE CELEBRATION ANNIVERSARY 18-21 MAR
PEMILIHAN PUTRA PUTRI MILLENIAL PESONA PALEMBANG 2021 21 MAR
ZONA 90AN 25-28 MAR
BIDAR MINI 28 MAR
BEKERETO JELAJAH KOTA 28 MARET
INDONESIA BANGKIT MARET

MARCH FEST MAR
FESTIVAL TANAMAN HIAS BUAH DAN SAYUR 2021 10-11 APRIL
RAMADHAN FESTIVAL 28 APRIL -12 MEI
RAMADHAN SEASON APRIL
CAHAYA RAMADHAN APRIL-MEI
ISLAMIC ART FEST 2021 1-9 MEI
LOMBA CIPTA MENU B2SA MEI - JULI

www.palembangtourism.com | Palembang Tourism Channel | @CharmingPA | @palembang2021 | @CharmingPalembang | Charming Palembang

PALEMBANG SPORT TOURISM EVENT

PALEMBANG MUSLIM FASHION FESTIVAL OKTOBER
PI BALL 8TH ANNIVERSARY OKTOBER
SRIWIJAYA HOBBY FEST 2021 4-7 NOVEMBER
PALEMBANG FASHION FOOD FESTIVAL 3 2021 5-14 NOVEMBER
BANK SUMSEL RABEL ANNIVERSARY 64th 6 NOVEMBER
MAN DAYS FESTIVAL 25-28 NOVEMBER
6 REFRESH SENI & PEMERIAN ANUGERAH SENI BATANGHARI SEMELAN NOVEMBER
MUSI COFFEE CULTURE 1-3 OKTOBER
OPI FOOD CARNAVAL 2021 1-10 OKTOBER
PEPARPENAS 17 OKTOBER
FESTIVAL GENDANG MELATU 18 - 21 OKTOBER

BIDAR MINI 31 OKTOBER
WEDDING EXHIBITION OKTOBER
FANTASI CHRISTMAS NOVEMBER-DESEMBER
CHRISTMAS CARNIVAL 9-12 DESEMBER
CHRISTMAS FESTIVAL 9-31 DESEMBER
HAUS AK GANI 23 DESEMBER
HUNTING FOTO PESONA PUTRI TAMAN WISATA KERAJAAN SRIWIJAYA 31 DESEMBER
HUNTING FOTO PESONA PUTRI TAMAN WISATA KERAJAAN SRIWIJAYA & FASHION SHOW MODEL PALEMBANG 31 DESEMBER
HUNTING AKAR BAKKO NUSANTARA DESEMBER
COMICDOWN

www.palembangtourism.com | Palembang Tourism Channel | @CharmingPA | @palembang2021 | @CharmingPalembang | Charming Palembang

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Palembang, Tahun 2021



❖ **Capaian yang telah didapat :**

Selain itu pencapaian dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, Kota Palembang berhasil masuk 3 (tiga) besar kategori Destinasi Belanja Terpopuler dari Anugerah Pesona Indonesia 2020 yaitu Kawasan sentra Songket Tanggo Buntung yaitu Tanggo Buntung.



2. Jumlah Event Olahraga Tingkat Lokal, Regional, Nasional dan Internasional

Penyelenggaraan event olahraga merupakan sebuah aktivitas yang lazim dilaksanakan di masyarakat. Beberapa moment penting selalu menghadirkan acara dengan berisikan berbagai pertandingan dan perlombaan olahraga. Dengan kata lain penyelenggaraan event olahraga sebenarnya bukan merupakan hal baru dalam kurun pertumbuhan perkembangan budaya di masyarakat kita.

Hakikat penyelenggaraan event olahraga setidaknya-tidaknya memiliki berbagai substansi yang meliputi pemahaman bahwa penyelenggaraan sebuah event adalah :



1. Bagian integral dari upaya pembinaan olahraga sekaligus sebagai titik kulminasi upaya pembinaan secara menyeluruh membangkitkan minat, pemanduan bakat, seleksi dan kompetisi;
2. Ajang pertarungan martabat dan kehormatan bangsa;
3. Ajang persaingan bisnis dan industri olahraga;
4. Sarana edukasi sosial dan entertainment

Kota Palembang sebagai salah Kota yang mempunyai sarana dan prasarana yang memadai tidak menutup peran untuk perhelatan event olahraga baik tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah Kota Palembang menjadikan dasar event olahraga sebagai salah indikator kinerja pencapaian kinerja Pemerintah Kota Palembang dengan indikator Jumlah Event Olahraga Tingkat Lokal, Regional, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan di Kota Palembang.

Tabel 3.60
Capaian Indikator Kinerja Jumlah Event Olahraga Tingkat Lokal, Regional, Nasional dan Internasional Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Jumlah Event Olahraga Tingkat Lokal, Regional, Nasional dan Internasional	%	9 Event	26 Event	289	11 Event	13 Event	118,2	17 Event

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang, Tahun 2021

Jumlah event olahraga tingkat lokal, regional, nasional dan internasional yang disajikan pada tabel di atas adalah hasil dari perhitungan sendiri dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang yaitu sebesar **118,2%**. Dari hasil capaian di atas terlihat bahwa untuk jumlah event olahraga tingkat lokal, regional



dan internasional pada tahun 2020 terealisasi sebanyak 13 event dari target 11 event. Capaian ini bila dibandingkan dengan Tahun 2019 persentasenya lebih kecil namun secara pencapaian melebihi target untuk tahun 2020.

Tabel 3.61
Jumlah Event Olahraga tingkat lokal, regional dan internasional yang dilaksanakan di Kota Palembang Tahun 2020

No	Nama Event Olahraga	Tingkat	Bulan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sriwijaya Run	Lokal	Januari 2020
2	Proliga 2020	Nasional	Februari 2020
3	Gojek Badminton Palembang Cup	Lokal	Februari 2020
4	BSB Fun Run	Lokal	Februari 2020
5	FIFA Farmel Hatta Soccer Festival	Lokal	Februari 2020
6	Fun Bike Dies Natalis Himpunan Mahasiswa Islam	Lokal	Februari 2020
7	Palembang Triathlon	Internasional	Februari 2020
8	MOKS Taekwondo Championship 3 South Sumatera	Nasional	Februari 2020
9	E- Sport Piala Gubernur	Regional	Juli 2020
10	NR Kemerdekaan	Lokal	Agustus 2020
11	Kejuaraan Nasional TANDOKU Virtual Shorinji	Lokal	Agustus 2020
12	Kejuaraan Open Tournament Pencak Silat Piala Direktur Poltekes Palembang	Lokal	Oktober 2020
13	Youth Fun Juggling Competition	Nasional	Desember 2020

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang, Tahun 2021



❖ **Faktor-faktor pendukung realisasi capaian :**

1. Palembang memiliki sarana atau fasilitas olahraga yang sangat baik dan lengkap;
2. Palembang juga memiliki pengalaman sabagai tuan rumah dalam perhelatan olahraga baik nasional (PON XVI) maupun internasional (Piala Asia AFC, SEA games, ASIAN games) sejak tahun 2011 sampai 2018 telah dilakukan 43 kali acara olahraga internasional di Jakabaring dan Palembang memang bertujuan untuk menjadi sebuah kota olahraga dunia;
3. Palembang juga merupakan Kota wisata olahraga pertama di Indonesia dikarenakan Palembag mempunyai Jakabaring Sport City (JSC) menyediakan berbagai macam fasilitas olahraga dengan luas sebesar 360 Hektar dan 20 venue berstadar internasional;
4. Dari sisi transportasi penunjang kegiatan olahraga, Palembang telah memiliki Light Rail Transit (LRT) untuk mengangkut kontingen atlet negara peserta dari Bandara SMB II menuju Jakabaring Sport City (JSC);
5. Penginapan atlet, di Jakabaring Sport City (JSC) juga tersedia wisma atlet, lima tower rusunawa dan satu tower rusunami yang dapat menampung sekitar 3.000 atlet dan ofisial.
6. Aplikasi **Hallo Palembang** dengan maksud menjadi wadah untuk masyarakat Kota Palembang dalam mendapatkan informasi pelayanan yang diberikan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Dalam aplikasi Hallo Palembang terkait salh satunya informasi Calendar Of Events dimana masyarakat baik dari Kota Palembang maupun dari provinsi Lain serta luar negeri dapat mengetahui informasi mengenai events/ kegiatan yang ada di Kota Palembang, sehingga wisatawan dapat



merencanakan kedatangannya ke Kota Palembang. Dapat diakses pada laman

hallo.palembang.go.id.

7. Program yang mendukung capaian kinerja :

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	Capaian (%)
1	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	803.526.000	803.526.000	00,00	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	50.000.000	49.890.500	109.500	99,78

❖ **Upaya/ solusi yang telah dilaksanakan :**

1. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
2. Meningkatkan kerjasama dengan mitra kerja pembinaan organisasi olahraga, yaitu olahraga prestasi oleh KONI dan 43 Cabang Olahraga di Kota Palembang, olahraga pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Bapopsi dan olahraga rekreasi oleh Formi;
3. Pembinaan prestasi berdasarkan skala prioritas cabang olahraga unggulan, baik yang bersifat individual maupun permainan berdasarkan program Kemenegpora dan Dispora Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dimasa Pandemi Covid-19 Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk Tahun 2020 tidak melaksanakan kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda dikarenakan dapat mengakibatkan klaster baru penyebaran virus sedangkan untuk kegiatan olahraga untuk Tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19 sehingga event event olahraga prestasi tidak dilaksanakan yang ada hanya event event pembudayaan olahraga ada event yang dilaksanakan secara virtual seperti Kejuaraan Nasional TANDOKU Virtual Shorinji itu tidak ada juaranya hanya bersifat membudayakan olahraga kepada masyarakat.



3.4 Realisasi Keuangan

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Palembang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang dengan total belanja langsung urusan wajib dan non urusan sebesar Rp. 4.180.568.812.333,76,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.688.801.538.308,24,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 88,24%.

Anggaran Belanja Langsung merupakan bagian dari APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2020, komposisi belanja APBD Kota Palembang, sebagai berikut :

Tabel 3.62
Komposisi Belanja Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Tahun Anggaran 2020		%
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Belanja Tidak Langsung	1.728.650.295.785,67	1.604.859.575.473,49	43,51
2	Belanja Langsung	2.451.918.516.548,09	2.083.941.962.834,75	56,49
Jumlah		4.180.568.812.333,76	3.688.801.538.308,24	88,24

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang, Tahun 2021

Jika dilihat dari komposisinya, belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar 43,51% dari realisasi belanja Kota Palembang di tahun 2020 dan sisanya sebesar 56,49% disumbangkan oleh belanja langsung.

Adapun realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja sasaran strategis pemerintah Kota Palembang tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.63
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
		s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
PENDAPATAN	4.133.345.162.721,50	0,00	3.695.676.689.293,30	3.695.676.689.293,30	(437.668.473.428,20)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.428.543.374.447,70	0,00	1.032.949.440.101,99	1.032.949.440.101,99	(395.593.934.345,71)
DANA PERIMBANGAN	1.957.463.146.329,00	0,00	1.958.285.921.712,00	1.958.285.921.712,00	822.775.383,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	747.338.641.944,80	0,00	704.441.327.479,31	704.441.327.479,31	(42.897.314.465,49)
BELANJA	4.180.568.812.333,76	0,00	3.688.801.538.308,24	3.688.801.538.308,24	(491.767.274.025,52)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.728.650.295.785,67	0,00	1.604.859.575.473,49	1.604.859.575.473,49	(123.790.720.312,18)
BELANJA LANGSUNG	2.451.918.516.548,09	0,00	2.083.941.962.834,75	2.083.941.962.834,75	(367.976.553.713,34)
SURPLUS / DEFISIT	(47.223.649.612,26)	0,00	6.875.150.985,06	6.875.150.985,06	54.098.800.597,32
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	55.323.649.612,26	0,00	55.323.649.612,26	55.323.649.612,26	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.100.000.000,00	0,00	6.438.000.000,00	6.438.000.000,00	(1.662.000.000,00)
PEMBIAYAAN NETTO	47.223.649.612,26	0,00	48.885.649.612,26	48.885.649.612,26	1.662.000.000,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAN	0,00	0,00	55.760.800.597,32	55.760.800.597,32	55.760.800.597,32

Tabel 3.64
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)
PENDAPATAN	4.133.345.162.721,50	3.695.411.978.568,38	89,40
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.428.543.374.447,70	1.032.684.729.377,07	72,29
Pendapatan Pajak Daerah	1.190.000.000.000,00	787.923.892.941,00	66,21
Pendapatan Retribusi Daerah	33.698.550.000,00	39.540.588.012,00	117,34
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain	64.863.337.447,70	64.553.337.547,79	99,52
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain	139.981.487.000,00	140.666.910.876,28	100,49
PENDAPATAN TRANSFER	2.332.878.271.167,00	2.321.160.147.711,31	99,50
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.885.491.201.000,00	1.885.795.605.903,00	100,02
Dana Bagi Hasil Pajak	115.637.076.000,00	88.399.171.065,00	76,45
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	76.370.966.000,00	117.736.939.385,00	154,16
Dana Alokasi Umum	1.235.336.955.000,00	1.226.620.875.000,00	99,29
Dana Alokasi Khusus	458.146.204.000,00	453.038.620.453,00	98,89
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	38.443.326.000,00	38.443.326.000,00	100,00
Dana Penyesuaian	38.443.326.000,00	38.443.326.000,00	100,00
Transfer Pemerintah Provinsi	408.943.744.167,00	396.921.215.808,31	97,06
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	336.971.798.838,00	324.430.899.999,31	96,28
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	71.971.945.329,00	72.490.315.809,00	100,72
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	371.923.517.106,80	341.567.101.480,00	91,84
Pendapatan Hibah	244.414.309.106,80	237.734.495.000,00	97,27
Pendapatan Lainnya	127.509.208.000,00	103.832.606.480,00	81,43
BELANJA	4.180.568.812.333,76	3.688.908.728.308,24	88,24
BELANJA OPERASI	2.971.216.032.872,31	2.727.208.244.692,07	91,79

Belanja Pegawai	1.641.923.449.461,67	1.541.786.764.816,00	93,90
Belanja Barang	1.288.271.189.686,64	1.141.441.453.453,02	88,60
Belanja Subsidi	11.000.000.000,00	10.936.195.000,00	99,42
Belanja Hibah	26.698.350.000,00	29.720.787.699,05	111,32
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	3.323.043.724,00	3.323.043.724,00	100,00
BELANJA MODAL	1.100.038.834.061,45	883.760.806.949,73	80,34
Belanja Tanah	897.750.000,00	197.750.000,00	22,03
Belanja Peralatan dan Mesin	237.684.671.019,00	211.615.025.318,00	89,03
Belanja Bangunan dan Gedung	167.398.183.757,24	148.026.931.051,55	88,43
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	655.238.677.293,80	491.938.591.296,00	75,08
Belanja Aset Tetap Lainnya	38.819.551.991,41	31.982.509.284,18	82,39
BELANJA TAK TERDUGA	109.313.945.400,00	77.939.676.666,44	71,30
Belanja Tak Terduga	109.313.945.400,00	77.939.676.666,44	71,30
SURPLUS / (DEFISIT)	(47.223.649.612,26)	6.503.250.260,14	(13,77)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN DAERAH	55.323.649.612,26	55.323.649.612,26	100,00
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	55.323.649.612,26	55.323.649.612,26	100,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN DAERAH	8.100.000.000,00	6.438.000.000,00	79,48
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.100.000.000,00	6.438.000.000,00	79,48
PEMBIAYAAN NETTO	47.223.649.612,26	48.885.649.612,26	103,52
SISALEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	55.388.899.872,40	0,00

Tabel 3.65
Realisasi APBD Pemerintah Kota Palembang Tahun 2020

NO	SKPD	TARGET BELANJA APBD TAHUN 2020			REALISASI BELANJA APBD TAHUN 2020		
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	TOTAL BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	TOTAL BELANJA
1	Dinas Pendidikan	711.057.922.000,00	430.636.294.462,87	1.141.694.216.462,87	676.903.266.998,00	417.069.605.616,87	1.093.972.872.614,87
2	Dinas Kesehatan	147.170.901.300,00	283.701.271.064,09	430.872.172.364,09	144.544.959.023,00	238.001.527.743,33	382.546.486.766,33
3	Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI	31.779.314.500,00	140.328.083.373,04	172.107.397.873,04	32.504.266.113,00	100.821.022.790,85	133.325.288.903,85
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	24.627.794.200,00	614.028.463.951,26	638.656.258.151,26	23.497.592.827,00	451.295.684.627,84	474.793.277.454,84
5	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman	11.510.988.800,00	247.215.510.071,68	258.726.498.871,68	10.632.459.852,00	209.364.859.058,18	219.997.318.910,18
6	Satuan Polisi Pamong Praja	24.555.441.600,00	25.949.212.200,00	50.504.653.800,00	24.164.150.625,00	22.405.639.442,00	46.569.790.067,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan PB	29.074.040.300,00	20.763.643.350,00	49.837.683.650,00	28.670.398.506,00	18.988.541.560,00	47.658.940.066,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.435.047.300,00	4.169.734.913,80	9.604.782.213,80	5.147.281.390,00	3.559.859.820,00	8.707.141.210,00
9	Dinas Sosial	7.723.506.900,00	4.951.201.991,00	12.674.708.891,00	7.290.478.730,00	4.773.912.570,00	12.064.391.300,00
10	Dinas Ketenagakerjaan	8.334.052.700,00	4.427.101.550,00	12.761.154.250,00	8.111.949.296,00	4.357.835.171,00	12.469.784.467,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	6.111.282.900,00	4.714.501.971,80	10.825.784.871,80	6.049.508.102,00	4.707.831.017,00	10.757.339.119,00
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	15.454.150.400,00	78.415.846.316,20	93.869.996.716,20	13.703.870.168,00	62.712.750.480,60	76.416.620.648,60
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.508.720.400,00	12.651.334.653,00	23.160.055.053,00	9.297.393.293,00	11.381.634.618,00	20.679.027.911,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.950.962.400,00	9.149.761.515,20	18.100.723.915,20	8.479.832.181,00	7.306.574.321,00	15.786.406.502,00
15	Dinas Perhubungan	21.777.850.300,00	24.226.147.813,80	46.003.998.113,80	21.201.428.004,00	23.973.868.859,00	45.175.296.863,00
16	Dinas Komunikasi & Informatika	6.730.586.400,00	25.892.775.666,51	32.623.362.066,51	6.578.290.405,00	24.412.297.370,00	30.990.587.775,00
17	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	7.470.258.700,00	6.781.084.667,00	14.251.343.367,00	6.588.933.496,00	6.595.746.727,00	13.184.680.223,00
18	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.899.088.800,00	22.620.016.342,43	38.519.105.142,43	15.575.064.912,00	19.424.991.931,08	35.000.056.843,08
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8.260.397.200,00	4.275.380.692,20	12.535.777.892,20	7.915.936.764,00	4.228.972.268,00	12.144.909.032,00
20	Dinas Kebudayaan	7.130.391.200,00	6.241.140.550,73	13.371.531.750,73	6.755.221.129,00	5.993.838.362,00	12.749.059.491,00
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	7.747.249.900,00	8.341.068.332,20	16.088.318.232,20	5.853.300.340,00	8.023.476.340,00	13.876.776.680,00

22	Dinas Perikanan	5.337.536.300,00	8.193.466.550,00	13.531.002.850,00	5.256.951.162,00	6.691.897.612,00	11.948.848.774,00
23	Dinas Pariwisata	8.025.340.200,00	9.109.507.554,59	17.134.847.754,59	7.723.179.222,00	8.220.729.522,00	15.943.908.744,00
24	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	16.611.617.700,00	8.561.683.895,40	25.173.301.595,40	14.762.055.493,00	8.125.467.665,00	22.887.523.158,00
25	Dinas Perdagangan	7.028.805.300,00	4.723.854.989,00	11.752.660.289,00	6.542.808.095,00	4.121.904.021,00	10.664.712.116,00
26	Dinas Perindustrian	7.012.945.100,00	5.664.577.226,20	12.677.522.326,20	6.845.947.968,00	5.469.467.594,00	12.315.415.562,00
27	Sekretariat Daerah Kota	44.045.500.300,00	100.869.799.078,20	144.915.299.378,20	41.038.895.709,00	90.941.850.197,00	131.980.745.906,00
28	Sekretariat DPRD Kota	8.250.844.900,00	86.126.434.566,00	94.377.279.466,00	7.377.726.088,00	82.203.745.330,00	89.581.471.418,00
29	Kecamatan Ilir Timur I	11.301.651.800,00	13.753.070.140,00	25.054.721.940,00	10.670.716.985,00	10.620.743.878,00	21.291.460.863,00
30	Kecamatan Ilir Timur II	6.875.291.200,00	9.347.052.000,00	16.222.343.200,00	6.742.965.643,00	8.877.000.734,00	15.619.966.377,00
31	Kecamatan Seberang Ulu I	6.509.992.000,00	11.582.192.169,60	18.092.184.169,60	10.670.716.985,00	10.620.743.878,00	21.291.460.863,00
32	Kecamatan Seberang Ulu II	7.871.171.600,00	12.501.694.081,80	20.372.865.681,80	7.440.070.775,00	11.857.116.984,00	19.297.187.759,00
33	Kecamatan Ilir barat I	8.579.560.100,00	10.949.366.112,56	19.528.926.212,56	8.065.857.496,00	10.541.012.819,00	18.606.870.315,00
34	Kecamatan Ilir Barat II	7.961.309.900,00	11.548.590.395,80	19.509.900.295,80	8.065.857.496,00	10.541.012.819,00	18.606.870.315,00
35	Kecamatan Sukarama	10.273.823.200,00	11.627.195.871,80	21.901.019.071,80	9.777.589.214,00	11.129.661.060,00	20.907.250.274,00
36	Kecamatan Sako	7.853.411.600,00	10.140.760.048,20	17.994.171.648,20	7.799.163.765,00	9.857.167.550,00	17.656.331.315,00
37	Kecamatan Kemuning	7.603.632.100,00	9.809.217.751,00	17.412.849.851,00	7.242.580.417,00	9.673.987.395,00	16.916.567.812,00
38	Kecamatan Kalidoni	7.139.082.200,00	10.488.627.734,20	17.627.709.934,20	7.040.034.389,00	9.730.901.454,00	16.770.935.843,00
39	Kecamatan Kertapati	8.114.075.200,00	9.669.484.195,12	17.783.559.395,12	6.980.036.679,00	8.960.226.004,00	15.940.262.683,00
40	Kecamatan Plaju	8.399.636.900,00	9.879.512.342,60	18.279.149.242,60	7.838.250.560,00	9.777.105.903,00	17.615.356.463,00
41	Kecamatan Bukit Kecil	7.223.996.400,00	11.236.925.818,80	18.460.922.218,80	6.707.458.825,00	10.823.124.979,00	17.530.583.804,00
42	Kecamatan Gandus	6.517.811.100,00	8.420.024.000,00	14.937.835.100,00	5.964.858.412,00	7.924.699.887,00	13.889.558.299,00
43	Kecamatan Alang-Alang Lebar	7.515.016.200,00	10.872.224.910,00	18.387.241.110,00	6.896.603.205,00	10.212.522.209,00	17.109.125.414,00
44	Kecamatan Sematang Borang	6.784.067.200,00	6.915.821.017,40	13.699.888.217,40	6.231.342.764,00	6.782.115.030,00	13.013.457.794,00
45	Kecamatan IT III	6.699.271.000,00	9.776.116.714,00	16.475.387.714,00	6.550.517.310,00	9.368.517.560,00	15.919.034.870,00
46	Kecamatan Jakabaring	6.808.880.900,00	11.170.025.779,60	17.978.906.679,60	6.584.817.151,00	9.796.517.061,00	16.381.334.212,00
47	Inspektorat Kota Palembang	14.270.679.900,00	4.025.894.410,59	18.296.574.310,59	13.763.873.623,00	3.586.606.759,00	17.350.480.382,00
48	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	12.797.334.100,00	14.960.418.581,03	27.757.752.681,03	11.984.121.104,00	11.587.909.652,00	23.572.030.756,00
49	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	47.990.413.100,00	11.055.178.708,19	59.045.591.808,19	46.388.374.112,00	8.330.865.457,00	54.719.239.569,00
50	Badan Pengelolaan Pajak Daerah	94.554.528.900,00	17.650.232.507,20	112.204.761.407,20	69.098.703.988,00	16.919.296.525,00	86.018.000.513,00
51	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13.524.614.000,00	11.809.991.950,40	25.334.605.950,40	13.344.965.203,00	10.873.104.603,00	24.218.069.806,00
JUMLAH		1.728.650.295.785,67	2.451.918.516.548,09	4.180.568.812.333,76	1.441.565.228.699,00	2.083.567.492.834,75	3.534.430.114.826,75

Tabel 3.66
EFISIENSI ANGGARAN PER ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
PADA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2020

No.	PERANGKAT DAERAH	APBD INDUK	APBDP	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	Dinas Pendidikan	1,357,334,137,000.00	1,141,694,216,462.87	(215,639,920,537.13)
2	Dinas Kesehatan	362,901,158,000.00	430,872,172,364.09	67,971,014,364.09
3	Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI	198,544,795,000.00	172,107,397,873.04	(26,437,397,126.96)
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	772,153,823,000.00	638,656,258,151.26	(133,497,564,848.74)
5	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman	227,552,170,000.00	258,726,498,871.68	31,174,328,871.68
6	Satuan Polisi Pamong Praja	62,652,322,000.00	50,504,653,800.00	(12,147,668,200.00)
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	53,652,344,000.00	49,837,683,650.00	(3,814,660,350.00)
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14,815,484,000.00	9,604,782,213.80	(5,210,701,786.20)
9	Dinas Sosial	17,291,039,000.00	12,674,708,891.00	(4,616,330,109.00)
10	Dinas Ketenagakerjaan	15,121,066,000.00	12,761,154,250.00	(2,359,911,750.00)
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	16,633,575,000.00	10,825,784,871.80	(5,807,790,128.20)
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	97,271,569,000.00	93,869,996,716.20	(3,401,572,283.80)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28,319,875,000.00	23,160,055,053.00	(5,159,819,947.00)

14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	24,122,454,000.00	18,100,723,915.20	(6,021,730,084.80)
15	Dinas Perhubungan	60,794,416,000.00	46,003,998,113.80	(14,790,417,886.20)
16	Dinas Komunikasi & Informatika	37,989,546,000.00	32,623,362,066.51	(5,366,183,933.49)
17	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	12,102,913,000.00	14,251,343,367.00	2,148,430,367.00
18	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40,426,060,000.00	38,519,105,142.43	(1,906,954,857.57)
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	17,400,798,000.00	12,535,777,892.20	(4,865,020,107.80)
20	Dinas Kebudayaan	15,085,166,000.00	13,371,531,750.73	(1,713,634,249.27)
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	18,019,703,000.00	16,088,318,232.20	(1,931,384,767.80)
22	Dinas Perikanan	17,456,351,000.00	13,531,002,850.00	(3,925,348,150.00)
23	Dinas Pariwisata	25,917,235,500.00	17,134,847,754.59	(8,782,387,745.41)
24	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	29,145,247,000.00	25,173,301,595.40	(3,971,945,404.60)
25	Dinas Perdagangan	14,961,028,000.00	11,752,660,289.00	(3,208,367,711.00)
26	Dinas Perindustrian	12,980,378,000.00	12,677,522,326.20	(302,855,673.80)
27	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	35,363,000,000.00	35,363,000,000.00	0.00
28	Walikota dan Wakil Walikota	6,503,003,000.00	6,160,168,061.67	(342,834,938.33)
29	Sekretariat Daerah Kota	206,217,231,000.00	144,915,299,378.20	(61,301,931,621.80)
30	Sekretariat DPRD Kota	105,355,996,000.00	94,377,279,466.00	(10,978,716,534.00)

31	Kecamatan Ilir Timur I	34,118,046,000.00	25,054,721,940.00	(9,063,324,060.00)
32	Kecamatan Ilir Timur II	22,561,444,000.00	16,222,343,200.00	(6,339,100,800.00)
33	Kecamatan Seberang Ulu I	19,550,266,000.00	18,092,184,169.60	(1,458,081,830.40)
34	Kecamatan Seberang Ulu II	25,028,054,000.00	20,372,865,681.80	(4,655,188,318.20)
35	Kecamatan Ilir barat I	24,256,547,000.00	19,528,926,212.56	(4,727,620,787.44)
36	Kecamatan Ilir Barat II	23,394,528,000.00	19,509,900,295.80	(3,884,627,704.20)
37	Kecamatan Sukarame	25,517,274,000.00	21,901,019,071.80	(3,616,254,928.20)
38	Kecamatan Sako	20,509,215,000.00	17,994,171,648.20	(2,515,043,351.80)
39	Kecamatan Kemuning	21,417,580,000.00	17,412,849,851.00	(4,004,730,149.00)
40	Kecamatan Kalidoni	21,009,643,000.00	17,627,709,934.20	(3,381,933,065.80)
41	Kecamatan Kertapati	21,727,003,000.00	17,783,559,395.12	(3,943,443,604.88)
42	Kecamatan Plaju	23,894,582,000.00	18,279,149,242.60	(5,615,432,757.40)
43	Kecamatan Bukit Kecil	21,236,134,000.00	18,460,922,218.80	(2,775,211,781.20)
44	Kecamatan Gandus	17,146,354,000.00	14,937,835,100.00	(2,208,518,900.00)
45	Kecamatan Alang-Alang Lebar	21,226,540,000.00	18,387,241,110.00	(2,839,298,890.00)
46	Kecamatan Sematang Borang	16,567,764,000.00	13,699,888,217.40	(2,867,875,782.60)
47	Kecamatan IT III	21,688,230,000.00	16,475,387,714.00	(5,212,842,286.00)
48	Kecamatan Jakabaring	23,304,554,000.00	17,978,906,679.60	(5,325,647,320.40)
49	Inspektorat Kota Palembang	35,066,920,000.00	18,296,574,310.59	(16,770,345,689.41)

50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	36,165,180,000.00	27,757,752,681.03	(8,407,427,318.97)
51	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	131,062,371,500.00	209,380,930,932.19	78,318,559,432.19
52	Badan Pengelolaan Pajak Daerah	127,855,947,000.00	112,204,761,407.20	(15,651,185,592.80)
53	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	41,133,059,000.00	25,334,605,950.40	(15,798,453,049.60)
TOTAL		4,679,521,118,000.00	4,180,568,812,333.76	(498,952,305,666.24)

Catatan :

1. Penambahan Anggaran pada Dinas Kesehatan karena ada refocussing untuk penanggulangan COVID-19 Bidang Kesehatan;
2. Penambahan Anggaran pada BPKAD karena ada refocussing ke anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanggulangan COVID-19.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kota Palembang Tahun 2020 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance result*) tahun 2020 dan merupakan tahun kedua RPJMD Kota Palembang (2018-2023). Dengan kata lain, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis. Selain itu laporan ini juga mengungkapkan keberhasilan, kegagalan dan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, beserta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Capaian kinerja Pemerintah Kota Palembang selama tahun 2020 dalam mewujudkan misi dan tujuan RPJMD 2018-2023 serta 10 sasaran strategisnya dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama. Hasil pengukuran pada 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama Kota Palembang yang telah ditetapkan pada tahun 2020, sebagai berikut :

- 7 indikator kinerja bermakna Baik Sekali;
- 5 Indikator kinerja bermakna Baik;
- 2 Indikator kinerja bermakna Cukup;
- 1 Indikator kinerja berkategori Kurang;
- 1 Indikator kinerja belum keluar hasil penilaian (Nilai SAKIP Kota Palembang



Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kota Palembang didukung dengan APBD Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp 4.180.568.812.333,76** (*Empat Triliun Seratus Delapan Puluh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Tujuh Puluh Enam Rupiah*)

Jumlah tersebut telah direalisasi sebesar **Rp 3.534.430.114.826,75** (*Tiga Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Koma Tujuh Puluh Lima Rupiah*)) atau **84,54%**.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2020 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal terhadap target yang tercapai. Pemerintah Kota Palembang akan melakukan langkah konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama tahun 2020 akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja, program dan kegiatan agar dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Solusi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan SAKIP agar sesuai dengan harapan diantaranya dengan :

1. Meningkatkan kualitas dokumen-dokumen yang terkait dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), mulai dokumen perencanaan strategis (Renstra),



pengukuran kinerja (IKU) hingga pedoman monitoring dan evaluasi agar antara dokumen-dokumen tersebut dapat berjalan sinergis, selaras dan terukur hingga dapat terlihat capaian keluaran (output), hasil (outcome), hingga manfaat (benefit) yang mencerminkan kinerja organisasi perangkat daerah;

2. Melaksanakan Road Show SAKIP ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna Meningkatkan pemahaman kepada pimpinan opd terkait dengan pohon kinerja dan perjanjian kinerja yang akan melahirkan program dan kegiatan yang berkualitas sesuai target permasalahan utama yang akan diselesaikan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang Tahun 2020 ini semoga menjadi bahan referensi evaluasi perbaikan kinerja Pemerintah Kota Palembang di tahun berikutnya.

Palembang Emas
Darussalam
2018-2023


charming
palembang



Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang